



UNIVERSITAS INDONESIA

AGRESIVITAS TURKI DI *MIDDLE EASTERN REGIONAL SECURITY COMPLEX (MERSC) PERIODE AKP (JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY) 2002-2011: TANTANGAN TURKI TERHADAP KONSEP *INSULATOR**

TESIS

**HERRI CAHYADI
1006743550**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

AGRESIVITAS TURKI DI *MIDDLE EASTERN REGIONAL SECURITY COMPLEX (MERSC)* PERIODE AKP (*JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY*) 2002-2011: TANTANGAN TURKI TERHADAP KONSEP *INSULATOR*

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**HERRI CAHYADI
1006743550**

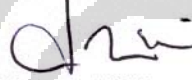
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Herri Cahyadi

NPM : 1006743550

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Herri Cahyadi
NPM : 1006743550
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Agresivitas Turki di *Middle Eastern Regional Security Complex (MERSC) Periode AKP (Justice and Development Party) 2002-2011: Tantangan Turki Terhadap Konsep Insulator*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, M.Sc., M.S. (.....)
Sekretaris : Asra Virgianita, M.A. (.....)
Pembimbing : Broto Wardoyo, M.A. (.....)
Penguji Ahli : Yeremia Lalisang, M.Sc. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat selesai dengan baik. Meski tidak sempurna, namun apa yang tertulis di dalamnya merupakan jerih-payah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hubungan Internasional. *Shalawat* dan *salam* semoga selalu tercurah kepada “panglima” tertinggi, Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Tak lupa, salam takzim kepada mereka yang terus berjuang membangun *ustaziyatul'alam* (soko guru peradaban) dari Rabat (Maghribi) hingga Iskandariah, dari Istanbul hingga Xin Jiang, dari Delhi hingga Maluku. Salam persaudaraan!

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak yang ikut membantu baik berupa dukungan materi dan imateri. Mereka adalah:

1. Bapak Broto Wardoyo, M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan pelajaran berharga mengenai ilmu HI, khususnya sekuritisasi dan RSCT. Terima kasih pula atas pengertiannya selama ini. Saya mohon maaf apabila kurang optimal dalam pengerjaan tesis ini, Mas Itok.
2. Rivki Hendriyan atas bantuan tak terkira, *thank you, brotha!* Krismansyah, Muksalmina, Nono Sukarno yang juga ikut membantu. Habis ini, butuh “bantuan” yang lain lagi.
3. Teman-teman di KSP, khususnya Bang Iis dan Ariatman atas nama Yayasan Kaifia Cendekia. Terima kasih atas pengertiannya yang tak terkira. Semoga makin eksis yayasan KSP.
4. Yasti Refrides atas dukungan dan doanya, serta pendampingan selama menyusun tesis. Meski jarak memisahkan, namun “kakek dan nenek” terus berdekatan.
5. Teman-teman S2 HI UI angkatan 2010, khususnya Donny yang sudah banyak membantu di setiap perkuliahan, Akbar, Ita, Lala, Ratih, Yusa, Luthfi, Murad, Mega, Rinda, Lely, Kus, Ahadi, Coki, Intan, dll yang tak bisa disebutkan satu persatu. Dua tahun yang tak akan terlupa, *folks!*

6. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih tak berhingga kepada mereka yang telah memberikan dukungan melalui jejaring sosial, pesan, dsb. Teman-teman dekat yang sering memberikan dukungan seluruh aktivitas penulis. Penulis meyakini, doa mereka jauh lebih berkontribusi dan melengkapi usaha yang telah penulis lakukan.
7. Kepada Dewan Penguji; Mas Andi Widjajanto, Mba Asra Virgianita, Mas Yeremia. Seluruh jajaran pengajar dan staf Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.

Terima kasih kepada semuanya dan mereka yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam Kata Pengantar ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah, *insyaAllah*.

Semoga buah karya ini memberikan informasi baru bagi para pembaca, terutama penggiat diskursus ilmu hubungan internasional di manapun berada. Segala kekurangan yang terdapat di dalamnya merupakan berasal dari penulis sendiri. Sedangkan kelebihan dan kebenaran datangnya dari anugerah Allah SWT semata. *Salam!*

Depok, 13 Juni 2012

Herri Cahyadi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herri Cahyadi
NPM : 1006743550
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Agresivitas Turki di Middle Eastern Regional Security Complex (MERSC) Periode AKP (Justice and Development Party) 2002-2011: Tantangan Turki Terhadap Konsep Insulator

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 13 Juni 2012

Yang menyatakan


(Herri Cahyadi)

vi

ABSTRAK

Nama : Herri Cahyadi
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Agresivitas Turki di *Middle Eastern Regional Security Complex (MERSC)* Periode AKP (*Justice and Development Party*) 2002-2011: Tantangan Turki Terhadap Konsep *Insulator*

Buzan dan Waever dalam *Regions and Powers: The Structure of International Security* menjelaskan posisi Turki sebagai *insulator* bagi *regional security complex (RSC)* Eropa, *Middle Eastern* dan Kaukasus. *Insulator* adalah sebuah kawasan yang berada di antara dua atau lebih RSC yang memiliki karakter pasif dan tidak dapat menyatukan dua RSC dalam satu arena strategis keamanan. Dinamika Turki masa AKP (2002-2011) ternyata tidak lagi relevan dengan status *insulator*. Perubahan orientasi dari Barat ke Timur merupakan salah satu indikasi bagaimana Turki mencoba “keluar” dari status tersebut. Perubahan orientasi ini terkarakterisasi dengan agresivitas peran Turki di regional MERSC, khususnya dalam isu keamanan, dan perekonomian yang terus membaik.

Kata kunci:

Turki, *regional security complex*, *insulator*, *great power*

ABSTRACT

Name : Herri Cahyadi
Study Program : International Relations
Title : Turkey's Aggresiveness in Middle Eastern Regional Security Complex (MERSC) By AKP (Justice and Development Party) Period 2001-2011: Challenge to Insulator Concept

In *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Buzan and Waever explain that Turkey is an insulator between Europe, Middle Eastern, and Caucasus regional security complexes. Insulator is a term that used to describe a regional between two or more RSCs which has been occupied by one state. The state must be weak, passive and cannot bring those RSCs together in one strategic security arena. According to Turkey's internal and external dynamic by 2002-2001 or AKP's period, insulator concept does not relevant anymore to figure out Turkey's position and status. Changing in Turkey's foreign policy which is being turned to East poses a challenge to that status. Turkey's trying to get out of insulator state. This changing is characterized by Turkey's aggressivity role in MERSC, especially in security issue and emerging economic.

Keywords:

Turkey, regional security complex, insulator, great power

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	8
1.3 Metodologi Penelitian	9
1.4 Kerangka Pemikiran	11
1.4.1 Tinjauan Pustaka.....	11
1.4.2 Landasan Teori	17
1.4.3 Operasionalisasi Konsep.....	23
1.4.4 Model Analisa.....	26
1.4.5 Hipotesa	26
1.5 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	26
1.5.1 Tujuan Penelitian	26
1.5.2 Signifikansi Penelitian	27
1.6 Sistematika Penelitian	27
BAB 2 DARI BARAT KE TIMUR: BAGAIMANA TURKI MEMAINKAN PERAN YANG “TIDAK BIASA”	29
2.1 Turki pada Periode 1923-2002	30
2.1.1 Turki pada Masa Perang Dingin	31
2.1.2 Turki Pasca Perang Dingin	34
2.2 Turki pada Masa 2002-2011.....	36

2.2.1 Turki di MERSC.....	38
2.2.2 Sekuritisasi Isu Palestina	40
2.2.3 Desekuritisasi Isu Utama Turki (Kurdi dan Islamisme).....	47
BAB 3 SIGNIFIKANSI PERKEMBANGAN TURKI: KAPASITAS DAN STATUS OF THE STATE DI REGIONAL	57
3.1 <i>Three-Tier Scheme of Power</i>	57
3.2 Kemampuan Material (Militer dan Ekonomi).....	62
3.2.1 Kekuatan Militer Turki.....	63
3.2.2 Kekuatan Ekonomi Turki	67
3.3 Persepsi Terhadap Diri Sendiri dan Pengakuan dari Aktor Lain	76
3.4 Sekuritisasi dan Desekuritisasi	80
3.5 Diperhitungkan oleh Aktor Lain	85
BAB 4 TURKI MENJAWAB TEORI <i>INSULATOR</i>	89
4.1 Turki Menantang Teori <i>Insulator</i>	89
4.2 Turki adalah <i>Great Power In The Making</i>	94
4.3 Perubahan dari Dalam atau Dorongan Eksternal.....	99
4.4 Kemungkinan Revisi Teori.....	103
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1. Tinjauan Pustaka	15
Tabel 2. Operasionalisasi Konsep	25
Tabel 3. Kronologi hubungan Turki-Iran pada 2011	51
Tabel 4. Kronologi hubungan Turki-Irak pada 2011	53
Tabel 5. Kronologi hubungan Turki-Suriah pada 2011	55
Tabel 6. Tipologi <i>power</i> menurut Buzan dan Waever	59
Tabel 7. Top 15 negara dengan <i>budget</i> militer terbesar di dunia 2011	64
Tabel 8. Data ekspor-impor Turki	73
Tabel 9. Data ekspor Turki ke negara berdasarkan region	74
Tabel 10. List isu keamanan yang di(de)sekuritisasi Turki	83
Tabel 11. Klasifikasi <i>Three-Tier Scheme</i>	98

GAMBAR

Gambar 1. Kompleksitas MERSC	8
Gambar 2. Turki sebagai <i>insulator</i>	19
Gambar 3. Turki dan MERSC	20
Gambar 4. Pola RSC pasca era Perang Dingin	35
Gambar 5. Tipologi <i>Skema Three-Tier Power</i>	61
Gambar 6. Kenaikan <i>Military Expenditure</i> Turki sejak 1988-2011	66
Gambar 7. GDP Turki untuk periode 2000-2011	69
Gambar 8. GDP <i>Per Capita</i> dan GDP-PPP <i>Per Capita</i>	70
Gambar 9. <i>Annual Economic Growth Rates</i> 2001-2011	71
Gambar 10. <i>Real GDP Growth Selected Country</i> 2010	72
Gambar 11. Jalur pipa minyak dan gas dari Timur Tengah dan Rusia menuju Turki dan Eropa melalui wilayah Turki	75
Gambar 12. Temuan utama dalam analisa	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data ekspor-impor Turki semenjak 1980-2011	116
Lampiran 2. GDP Nominal (dalam \$ billion)	117



BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Dingin memberikan dampak bagi pola hubungan internasional di dunia. Tren regionalisme justru berkembang dengan baik setelah dunia global berada dalam fase multipolaritas—setelah runtuhnya Uni Soviet yang menandakan berakhirnya bipolaritas. Masing-masing negara di dalam kawasan mengembangkan pola interaksi berdasarkan kedekatan geografis, kultur, sejarah, dsb yang pada akhirnya mereka membentuk struktur di kawasan. Kedekatan potensi keamanan membentuk regionalisme menjadi lebih kompleks.

Pembahasan keamanan tingkat regional dalam hubungan internasional sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Namun, kebanyakan dari mereka tidak membahas dengan detail dasar-dasar apa yang membentuk “keamanan regional” itu sendiri¹. Buzan dan Wæver memberikan pandangan yang lebih dalam mengenai keamanan regional dengan pendekatan konstruktivis-strukturalis—khususnya Copenhagen School. Menurut Buzan dan Wæver, *regional security complex (RSC)* adalah “*a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another*”². Buzan dan Wæver berpendapat, *regional security complex* adalah proses sekuritisasi dan desekuritisasi yang dilakukan oleh aktor dalam regional yang tidak bisa terlepas dari persinggungan permasalahan keamanan satu dan yang lainnya. Level analisa yang digunakan adalah regional dengan konsentrasi pembahasan keamanan³. Sebab itu, ide sekuritisasi dan desekuritisasi menjadi kunci utama dari *regional*

¹ Wayne McLean, “Regional Security Complex Theory and *Insulator* States: The case of Turkey”, (Tesis, School of Government, University of Tasmania, 3rd June, 2011), hal. 11.

² Barry Buzan, Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (New York: Cambridge University Press, 2003), hal. 44.

³ *Ibid.*, hal. 48.

security complex theory (RSCT)⁴. Menurut keduanya, sebuah RSC membutuhkan kriteria sebagai berikut: 1) batas (*boundary*) 2) struktur anarki (terdiri dari dua atau lebih unit otonom) 3) polaritas (distribusi *power* dalam kawasan) 4) struktur sosial (ditekankan pada pola *amity* dan *enmity*)⁵. Keempat poin tersebut menjadi syarat terbentuknya kompleksitas keamanan kawasan.

Buzan dan Wæver dalam *grand theory*-nya juga menyebutkan sebuah kawasan yang didiami oleh sebuah bangsa atau negara yang berada di ujung dua atau lebih RSC di mana negara tersebut ikut merasakan dampak kompleksitas di dalamnya yang disebut sebagai *insulator*⁶. Berbeda dengan *buffer state*, *insulator* tidak berada di dalam RSC dan tidak menjadi sentral tempat pertarungan kekuatan besar, tetapi berada di luar RSC tersebut. Disebabkan posisinya yang terjepit antara dua atau lebih RSC, karakter *insulator*—menurut Buzan dan Wæver—menjadi pasif dan tidak mungkin dapat menyatukan kedua (atau lebih) RSC di sekitarnya. Negara-negara yang termasuk *insulator* di antaranya adalah Turki, Afghanistan, Burma. Khusus untuk Turki, Buzan dan Wæver memberikan notifikasi spesial disebabkan potensi kapasitas dan kapabilitas Turki, serta tingkah lakunya di kawasan. Menurut mereka, Turki adalah *insulator* yang tidak biasa⁷.

Turki merupakan negara yang berada pada posisi persinggungan antara tiga kawasan, Eropa, Middle Eastern (Timur Tengah), dan Kaukasus (Asia Tengah). Posisi ini menyebabkan Turki menjadi wilayah strategis dan dilematis. Strategis karena Turki dapat terlibat dalam segala aspek yang terjalin di kawasan seperti ekonomi, politik, termasuk keamanan yang menguntungkan. Sedangkan dilematis adalah Turki dapat terjebak pada posisi sulit ketika harus berhadapan dengan isu keamanan yang lebih luas. Berdasarkan situasi Turki pasca Perang Dunia ke-2, Perang Dingin, dan pasca Perang Dingin, Turki relatif jauh lebih pasif dan tidak memainkan peran yang signifikan di kawasan sekitarnya⁸. Keberadaan Turki di tengah persinggungan tiga kawasan keamanan kompleks menyebabkan

⁴ Buzan dan Wæver menjelaskan mengenai evolusi RSCT. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam buku-buku dan artikel yang disebutkan Buzan dan Wæver. Selengkapnya dapat dibaca dalam *Regions and Powers: The Structure of International Security*, hal. 41-42.

⁵ *Ibid.*, hal. 53.

⁶ *Ibid.*, hal. 41.

⁷ *Ibid.*, hal. 394.

⁸ *Ibid.*, hal. 393.

Turki harus menyerap seluruh dinamika yang terjadi di masing-masing RSC. Meskipun Turki mengambil kebijakan untuk pasif atau tidak terlibat lebih dalam di salah satu kawasan, MERSC misalnya, dampak dinamika di kawasan tersebut tetap potensial mempengaruhi Turki.

Meski dilabeli sebagai negara *insulator*, Turki termasuk ke dalam negara yang memiliki kapasitas *power*—militer dan ekonomi—relatif cukup kuat. Turki merupakan pendiri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 1961, anggota G-20 semenjak 1999 dan pada 1995 bergabung dengan EU Custom Union. Turki juga menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI). Perekonomian Turki terus meningkat sehingga Turki masuk ke dalam kategori negara yang sedang berkembang, bahkan CIA mengklasifikasi Turki sebagai *developed country*⁹. GDP Turki berkembang pesat tiga kali semenjak AKP (Justice and Development Party) berkuasa pada 2002 hingga saat ini. Dalam kekuatan militer, Turki mempunyai personil militer aktif lebih dari 700.000¹⁰. Dengan *budget* militer sebesar \$17.9 (billion), di mana *share* GDP-nya sebesar 2.3%, Turki menempati posisi 15 besar dunia pada tahun 2011¹¹. Kombinasi kapasitas material (*power*) tersebut dengan sistem sosial yang mumpuni menjadikan Turki tidak seperti negara *insulator* lainnya¹². Dengan kapasitas itu, Turki selalu berupaya keluar dari posisi *insulator*. Salah satu upaya Turki untuk keluar dari label *insulator* adalah dengan mendefinisikan diri menjadi lebih “West” dan “Europe”. Menurut Buzan, negara *insulator* secara tradisional relatif lebih pasif karena harus mengantisipasi risiko konflik dari segala penjuru¹³. Itulah yang terjadi dengan Turki selama ini.

Namun, di tengah label *insulator* dan konflik formasi di kawasan, Turki justru memainkan peran yang cukup besar di Kaukasus RSC dan Middle Eastern

⁹ CIA, *CIA Fact Book*, (Washington D.C, 2012).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ SIPRI, “*SIPRI Military Expenditure Database*”, <<http://www.sipri.org/databases/milex/>>

¹² Wayne McLean, *loc. cit.*, hal. 23.

¹³ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 392-393.

RSC (MERSC). Turki cukup banyak terlibat dalam keamanan kawasan tersebut¹⁴. Satu dekade terakhir, peningkatan itu semakin nyata ketika Turki berada di bawah pemerintahan AKP yang disinyalir membawa perubahan gradual Turki lebih ke Timur.

Aktivisme Turki—yang sekaligus perubahan paling terlihat dewasa ini—adalah ketika Turki dengan aktif menyebarkan gagasan politik di MERSC yang berbeda secara signifikan dari kebijakan beberapa dekade sebelumnya¹⁵. Turki secara gradual aktif memberikan dukungan kepada Libya pasca kejatuhan Muammar Khadafi, serta dukungan terbuka untuk revolusi Tunisia dan Mesir. Turki juga aktif dalam revolusi rakyat Suriah yang masih berlangsung saat ini dengan membuka dialog antara oposisi dengan rezim Bashar Assad dan komunitas internasional. Tidak hanya itu saja, Turki melakukan kritik terbuka kepada Assad atas tindakan kerasnya terhadap demonstran yang menyebabkan korban lebih dari 10.000 jiwa dan pengungsi yang membanjiri Hatay (provinsi di selatan Turki). Setahun yang lalu, Turki berada pada posisi terdekat dengan Suriah setelah proses desekuritisasi isu perbatasan dan etnis Kurdi.

Dinamika internal Turki ikut menjadi penyebab utama perubahan gradual kebijakan luar negeri Turki, terutama di MERSC. Setelah AKP memenangi pemilihan umum selama tiga kali berturut-turut pada 2002, 2007 dan 2011, kebijakan luar negeri Turki semakin matang dengan prinsip “*zero problem with neighbors*” dalam doktrin *Strategic Depth*¹⁶. Turki yang jauh lebih demokratis pasca kekalahan rezim Kemalist—yang mempertahankan status quo sekulerisme ala militer—membawa dampak perubahan dalam konteks sekuritisasi dan desekuritisasi suatu isu. Perubahan ini menghasilkan redefinisi dari aktor keamanan terhadap potensi ancaman terhadap negara. Sebagai contoh, bagaimana Turki memandang berbeda Iran, Irak, dan Suriah sebagai ancaman laten bagi keamanan negara terkait isu Kurdi dan Islamisme. Sekuritisasi Turki terhadap isu

¹⁴ Malik Mufti, “A Little America: The Emergence of Turkish Hegemony”, *Crown center for Middle East Studies*, No. 51 (May, 2011), hal. 3-5.

¹⁵ Henri J. Barkey, “Turkish Foreign Policy and the Middle East”, *CERI Strategy Paper*, CERI CNRS & SciencesPo., No. 10 (6 Juni, 2011), hal. 1-13.

¹⁶ Gulbahar Yelken Aktas, “Turkish Foreign Policy: New Concepts and Reflection”, (Tesis, Graduate School of Social Sciences, Middle East Technical University, Desember 2010), hal. 38-42.

tersebut membawa dampak kecurigaan yang menyebabkan dingginya hubungan Turki dengan MERSC. Namun, seiring desekritisasi Turki terhadap kedua isu—Kurdi dan Islamisme—MERSC yang memiliki ikatan sejarah, agama, dan sosial dengan Turki menjadi nampak lebih dekat setelah AKP berada dalam tampuk kekuasaan¹⁷.

Jika dengan negara-negara seperti Iran, Irak dan Suriah yang notabeneanya memiliki hubungan tak harmonis dengan Turki sebelum periode AKP menjadi lebih dekat, justru sebaliknya dengan Israel. Hubungan Turki dengan Israel memburuk semenjak 2004 hingga 2011, di mana pada 2009-2010 disebut sebagai “*the years of crisis*”¹⁸. Turki mulai melakukan kritik keras terhadap Tel Aviv dan semakin keras saat Tragedi Mavi Marmara pada 2010. Sebelumnya diketahui bahwa Turki memiliki hubungan yang cukup erat dengan Israel di hampir semua bidang utama seperti militer, ekonomi, pariwisata, dan teknologi¹⁹. Namun, semenjak tampuk kekuasaan pemerintah dikendalikan oleh AKP, kebijakan luar negeri Turki berubah cukup drastis, terutama interaksinya dengan Israel²⁰. Momen Perang Gaza (2008), di mana Israel memblokade seluruh Gaza dari darat, laut dan udara menjadi pemicu permusuhan yang lebih dalam antara Turki dengan Israel²¹.

Penggunaan isu Palestina lebih menjadi sarana ambisi Turki untuk memainkan peran yang lebih di kawasan²². Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *speech act* kritis yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan. *Speech act* paling keras yang dinyatakan Erdogan adalah saat menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada 2009. Dalam forum tersebut, Erdogan mengungkapkan pernyataan kemarahan kepada presiden Israel, Simon Perez²³. Banyak analis mengatakan itulah pernyataan paling keras dari aktor negara ke negara lain secara langsung di forum terbuka.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 17-38.

¹⁸ SETA, *Turkey in 2011: Policy Report*, (Ankara, Januari, 2012), hal. 62.

¹⁹ Bülent Aras, “The Academic Perceptions Of Turkish- Israeli Relations”, *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, Vol.1, No.1 (Spring 2002), hal. 8.

²⁰ Efraim Inbar, “Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifications”, *Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute*, 2010, hal. 7. Juga terdapat dalam BESA Center Perspectives Paper, No. 132 (27 Februari, 2011).

²¹ *Ibid.*

²² Malik Mufti, *loc. cit.*, hal. 3-5.

²³ Wayne McLean, *loc. cit.*, hal. 27.

Semenjak itu hubungan Turki dengan Israel semakin memburuk dan memuncak saat tragedi Mavi Marmara²⁴.

Pada tahun 2010, Turki dan Israel mengalami semacam titik balik terendah hubungan bagi kedua negara. Turki dalam kasus tersebut menunjukkan ketegasan menuntut permintaan maaf Israel atas aksi yang dianggap ilegal oleh Turki. Bentuk ketegasan Turki dalam hal ini adalah dengan menghentikan seluruh aktivitas kerja sama militer yang telah dibangun semenjak pertengahan '90-an. Selain itu, Turki juga mengusir Duta Besar Israel untuk Turki dan menurunkan level diplomatis ke tingkat yang paling rendah sejak 1991. Bahkan, tidak hanya itu saja, Turki melakukan aksi “balas dendam” terhadap warga Israel yang melakukan kunjungan ke Turki dengan memperlakukan mereka seperti “teroris”; ditahan, digeledah, dan diinterogasi²⁵. Kerasnya Turki mempolitisasi isu Palestina ke dalam kebijakan luar negerinya menjadi permasalahan baru yang mempengaruhi interaksi kawasan. Sekuritisasi Turki terhadap isu Palestina (terutama selama pemerintahan dikendalikan AKP) menjadi momentum Turki untuk “unjuk gigi” dalam perannya yang tidak sebatas *insulator*.

Sekuritisasi bukanlah kondisi objek dan material. Sekuritisasi lebih tepat dikatakan sebagai *speech act* atau suatu hal yang dianggap dan dideklarasikan sebagai masalah keamanan oleh elit sebuah negara²⁶. Dari perspektif ini, sekuriti adalah olah konsep konstruksi sosial. Sesuatu hal khusus dianggap sebagai isu keamanan ketika dianggap berpotensi mengancam eksistensi dan membutuhkan penanganan dengan ukuran tertentu yang ditentukan oleh elit negara. Dengan mengklaim suatu isu sebagai isu keamanan, aktor keamanan dapat menggunakan cara-cara khusus, langsung dan diutamakan lebih dari prosedur penanganan biasa. Dalam RSCT, sekuritisasi dan desekuritisasi menempati gagasan paling utama mengenai unsur pembentuk kompleksitas keamanan, termasuk aktor yang berperan di dalamnya. Sebab sekuritisasi adalah gagasan politik yang dilegitimasi

²⁴ Tragedi Mavi Marmara adalah aksi ilegal Israel di perairan internasional yang melakukan serangan militer terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marara yang berbendera Turki dan menewaskan 9 warga Turki, pada 31 Mei 2010.

²⁵ Adam Szymański, “Crisis in Turkey–Israel Relations”, *The Polish Institute of International Affairs*, No. 18 (94) (February 3, 2010), hal. 7.

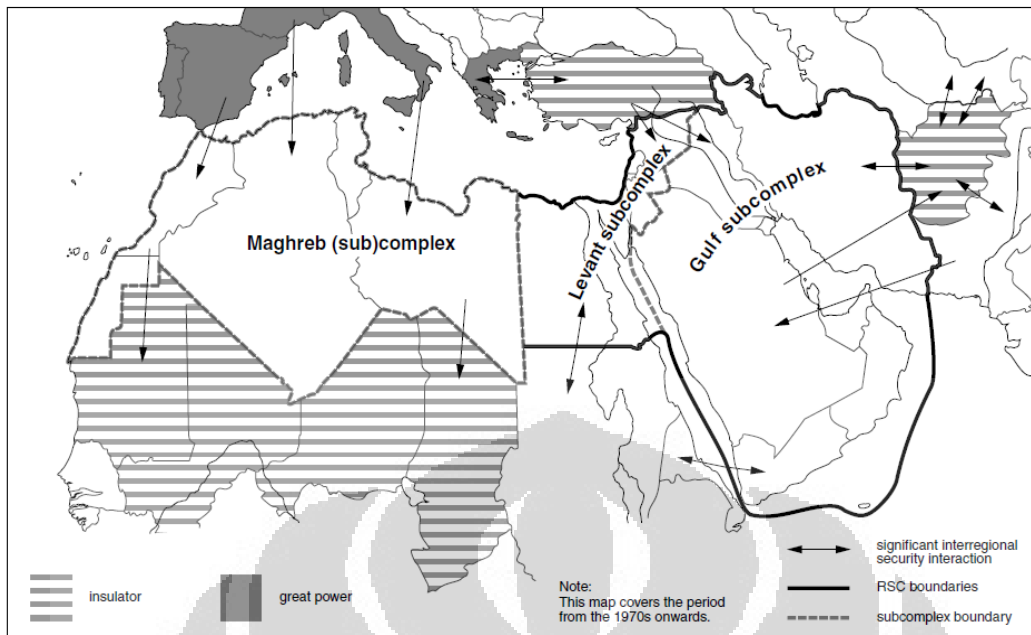
²⁶ Ole Wæver, “Securitization and Desecuritization”, *On Security*, diedit oleh Ronnie Lipschutz, (New York: Columbia University Press. 1995), hal. 47.

oleh negara yang berkembang menjadi kebijakan politis. Hal itulah mengapa Buzan dan Wæver mengatakan sekuritisasi dan desekuritisasi domestik juga ikut mempengaruhi sekuritisasi dan desekuritisasi eksternal (regional). Turki dengan kepercayaan diri tinggi, semenjak AKP berkuasa, telah melakukannya dengan cukup sukses hingga saat ini.

Dengan kapasitas dan kapabilitas (militer dan ekonomi) yang besar, doktrin kebijakan luar negeri yang proaktif dan terlibat lebih jauh, serta sekuritisasi dan desekuritisasi terhadap suatu isu keamanan regional, Turki telah berupaya keluar dari label *insulator state*. Fenomena ini terjadi setelah AKP berkuasa hingga sekarang. Sedangkan argumen insulasi Turki di kawasan oleh Buzan dan Wæver menggunakan analisa situasi dan kondisi sebelum itu (2003). Di sinilah kemudian terjadi diskursus menarik mengenai status Turki sebagai *insulator state*. Apakah status tersebut masih relevan digunakan untuk mencerminkan kondisi Turki kontemporer? Jika tidak, apakah yang menyebabkan Turki berperilaku demikian? Sebab menurut Buzan, suatu *regional security complex* hanya dibentuk dari tiga komponen, yaitu *global power*, *insulator* dan RSC itu sendiri. Skema *power* yang mempengaruhi pun terbatas pada konsep *three-tier scheme* yang terdiri dari dua *power level* sistemik yaitu *superpower* dan *great powers*, dan *power level* regional yaitu *regional power*²⁷.

Dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas, yang menjadi persoalan adalah apakah perkembangan yang terjadi setelah *grand theory* Buzan dan Wæver pada tahun 2003, di mana bahan analisa teori tersebut tentu sebelum tahun tersebut, masih relevan dengan dinamika Turki yang cukup pesat saat ini? Tesis ini akan mencoba memberikan pandangan lain mengapa Turki berperilaku cukup aktif di MERSC, menganalisa proses sekuritisasi dan desekuritisasi Turki di RSC, serta menjabarkan fakta bahwa Turki bukan sekadar *insulator* dan *regional power*—tentunya menggunakan rumusan Buzan dan Wæver sendiri.

²⁷ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 34-35.



Gambar 1. Kompleksitas MERSC beserta gambaran peran negara *insulator/buffer* dan pembagian *subcomplex states*²⁸.

1. 2 Rumusan Permasalahan

Menurut Barry Buzan dan Ole Wæver, Turki merupakan negara *insulator* yang telah ditakdirkan mendiami wilayah yang berada di antara tiga kawasan besar (regional), yaitu Europe RSC, MERSC, dan Caucasus RSC. Kondisi ini berdampak pada bagaimana Turki berinteraksi dengan kawasan sekitarnya. Negara *insulator* memiliki peran yang relatif lebih pasif dan cenderung mengakomodasi seluruh identitas atau kepentingan kawasan. Di sisi lain, kondisi ini cukup menguntungkan apabila Turki dapat beranjak menjadi pemain yang lebih aktif. Namun, jika demikian adanya akan mengubah pola interaksi kawasan dan sedikit bertentangan dengan “kutukan” *insulator* ala Buzan dan Ole Wæver.

Turki dengan arah kebijakan yang banyak mengalami perubahan semenjak AKP berkuasa (2002) disinyalir menjadi lebih ke Timur, dibandingkan sebelumnya yang gencar berkampanye mendapatkan identitas Barat. Keaktifan Turki dalam permasalahan di MERSC menjadi bukti bahwa terjadi pergeseran kebijakan luar negeri Turki. Paling hangat adalah isu Palestina yang menyebabkan

²⁸ *Ibid.*, hal. 189.

hubungan Turki-Israel mengalami titik terendah pasca Perang Dingin. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya aktivisme positif Turki dengan negara-negara MERSC yang dulunya mengalami konflik disebabkan potensi ancaman yang sangat besar bagi Turki. Kondisi ini menjadi dilema bagi teori “*insulator*” yang dipaparkan Buzan dan Wæver. Jika benar Turki adalah *insulator*, maka seharusnya Turki jauh lebih pasif seperti yang disampaikan dalam RSCT. Namun, fakta kontemporer tidak mengatakan demikian.

Tesis ini mencoba untuk memberikan penjelasan akademik mengenai ambisi Turki untuk keluar dari “kutukan” negara *insulator* dengan memainkan peran yang lebih aktif dalam *Middle Eastern regional security complex* (MERSC). Yang menarik untuk dikaji lebih lanjut—sekaligus menjadi pertanyaan penelitian dalam tesis ini—adalah **mengapa orientasi kebijakan luar negeri Turki terlihat sangat agresif terhadap *Middle Eastern Regional Security Complex* pada masa AKP (2002-2011)?**

Tesis ini akan fokus pada pertanyaan penelitian tersebut, sehingga mampu memberikan jawaban yang relevan dan menjadi pandangan baru bagi kajian *regional security complex*, khususnya kajian mengenai negara *insulator*.

1.3 Metodologi Penelitian

Tesis ini menggunakan *theory-based process* untuk mendapatkan keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Pendekatan *theory-based* ini didasari oleh teori yang disampaikan oleh Alexander George dan Andrew Bennet, di mana mereka mengatakan kemungkinan identifikasi kausalitas antara variable-variabel independen²⁹. Dengan demikian *tracing* kasus-kasus yang digunakan menggunakan teori lebih kepada penggunaan narasi tema berbasis sektoral daripada pendekatan kuantitatif³⁰. *Tracing* kasuistik, misalnya, membutuhkan penafsiran makna sehingga akan terbentuk kebenaran asumptif.

²⁹ Alexander L. George, Andrew Bennet, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*, (Cambridge: The MIT Press, 2005)

³⁰ Tulia G. Falletti, “Theory-Guided Process-Tracing in Comparative Politics: Something Old, Something New.” *Newsletter of the Organized Section in Comparative Politics of the American Political Science Association*, edisi 17 (2006), hal. 1.

Dengan demikian, *gap* antara realitas (kasus) dengan teori-teori dapat dijelaskan secara spesifik.

Data yang digunakan didapatkan dari data primer seperti dokumen *speech act*, wawancara media massa, dan liputan *online media* internasional terpercaya seperti New York Times, BBC, Guardian, Telegraph, Hurriyet, Todays Zaman, Haaretz. Untuk portal *online* lokal menggunakan Jakarta Post dan Jakarta Globe. Sedangkan data sekunder didapatkan dari skripsi, tesis ataupun disertasi, jurnal, artikel, buku, dsb. Jurnal akademik yang banyak digunakan adalah The Middle East Journal, Middle Eastern Studies, dll. Sedangkan *policy report* atau *working paper* banyak berasal dari SETA Foundation for Political, Economic, and Social Research, dsb. Keterangan lebih lengkap mengenai sumber-sumber data dapat dilihat di *footnote* ataupun Daftar Pustaka.

Penelitian ini berbasis teori, oleh sebab itu ada beberapa teori yang akan digunakan, yaitu *regional security complex theory* dan sekuritisasi. Kedua teori tersebut merupakan teori yang dikeluarkan oleh cendekiawan yang sama, Buzan dan Wæver. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas, penggunaan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas RSCT dengan studi kasus tertentu menjadi prioritas. Sebab, hal tersebut memudahkan dalam melakukan komparasi analisa dan penggunaan RSCT itu sendiri. Sedangkan untuk kasus-kasus yang diangkat tidak akan keluar dari konsep keamanan yang ada dalam teori-teori di atas.

Untuk memudahkan memotret perubahan kebijakan luar negeri Turki, tesis ini akan dibatasi penggunaan waktu kejadian saat AKP memerintah semenjak tahun 2002 hingga 2011. Batasan ini diambil sebab secara umum disepakati bahwa Turki mengalami perubahan signifikan semenjak AKP berkuasa. Oleh sebab itu, penting untuk dijadikan acuan penelaahan lebih lanjut. Penelitian ini pun dibatasi hanya membahas Turki sebagai *state* dan MERSC sebagai regional (negara-negara di dalamnya bagian dari regional). Tesis ini tidak membahas politik domestik di Turki seperti progres AKP atau mundurnya gerakan Kemalist, aktivitas PKK (Kurdi), sekuritisasi domestik seperti isu jilbab dan revivalisme Islam di Turki, dsb secara mendalam. Namun, hanya menjabarkan secara singkat keterkaitan isu-isu tersebut terhadap sekuritisasi dan desekuritisasi Turki di ranah

regional. Sebab, bagaimanapun juga isu-isu domestik tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan luar negeri Turki. Tesis ini juga tidak membahas tentang RSC Eropa, melainkan hanya menyebut sedikit saja sebagai tambahan referensi. Sebab model yang digunakan dalam tesis ini adalah bukan perbandingan kebijakan Turki terhadap kedua RSC, melainkan penjabaran mendalam mengenai Turki di MERSC. Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian tentang konsep Turki sebagai *insulator* yang dipaparkan oleh Buzan dan Wæver, menjadi lebih fokus dan mendalam.

1. 4 Kerangka Pemikiran

Kerangka teori yang akan digunakan berdasarkan tinjauan pustaka dan studi literatur. Tinjauan pustaka terdiri dari berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan topik yang hendak diangkat. Sedangkan landasan teori digunakan sebagai pisau bedah untuk pemaparan kasus atau fenomena yang dijadikan bahan analisa. Tinjauan pustaka penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu tema dibahas oleh para akademisi, sehingga tidak terjadi repetisi penelitian dan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan yang lebih baru.

1. 4. 1 Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan tesis ini, dilakukan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tema yang hendak diangkat telah dibahas oleh akademisi lain. Selain itu, dengan melakukan tinjauan pustaka diharapkan dapat ditemukan keterkaitan pembahasan dengan topik yang hendak diangkat, signifikansi dan orisinalitas dari topik tersebut.

Berdasarkan literatur yang telah dibaca, sejauh ini jurnal yang membahas tema yang hendak diangkat masih minim. Hal ini disebabkan memang fenomena dan kejadian yang sangat baru, terutama semenjak Turki berada pada pemerintahan AKP. Untuk puncak kasus yang hendak diangkat sendiri merupakan kejadian yang masih segar terjadi yaitu pada kisaran tahun 2011, bertepatan dengan pembacaan hasil investigasi PBB terhadap momen tragedi Mavi Marmara. Hal ini wajar mengingat butuh waktu untuk menghasilkan artikel atau jurnal akademik. Oleh sebab itu, di sinilah peluang untuk dapat menghasilkan karya tulis

(tesis) yang relatif baru dan ikut memberikan pandangan pada fenomena yang terjadi.

Bahan pertama yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah tesis yang berjudul *Regional Security Complex Theory and Insulator States: The Case of Turkey* yang ditulis oleh Mayne McClean. Tesis ini sangat membantu dalam memberikan gambaran mengenai posisi Turki sebagai *insulator state* yang diapit oleh tiga RCS. Tesis ini memberikan informasi mengenai hubungan Turki dengan MERSC dan RSC Eropa. Penulis tesis tersebut menggunakan tiga sektor keamanan untuk melukiskan realitas RSC dan keterlibatan Turki di dalamnya, yaitu sektor politik, sektor sosial, dan sektor ekonomi. Dengan menggunakan kerangka RSCT Buzan dan Wæver, penulis tesis berhasil memberikan gambaran utuh Turki sebagai negara *insulator*. Dengan demikian tesis tersebut sangat membantu memberikan informasi untuk penelitian yang sedang dikerjakan. Meski sama-sama menggunakan Turki sebagai studi kasus, namun sudut pandang yang digunakan serta kasus yang menjadi bahan cukup berbeda. Penulis menggunakan studi kasus sekuritisasi isu Palestina dan desekuritisasi isu Kurdi dan Islamisme dalam membahas peran Turki. Perbedaan yang sangat mendasar adalah jika tesis tersebut mendeskripsikan Turki sebagai *insulator*, maka penulis dalam hal ini justru menyampaikan hipotesa bahwa Turki bukanlah *insulator*.

Bahan kedua yang ditinjau adalah tesis dengan judul *Turkey's Position in the Middle East: Regional Hegemon or Peripheral Bystander?* Yang ditulis oleh Rick Brouwer. Tulisan kedua ini cukup memberikan banyak informasi dan referensi pustaka mengenai posisi Turki di Middle East. Penulis tesis memaparkan secara deskriptif dan analitik mengenai Turki menggunakan teori *regional hegemony* dengan menganalisa tulisan menggunakan tiga bagian, yaitu *perceptions, projection, dan provision*. Persepsi sangat erat kaitannya dengan status sebuah negara yang dipersepsikan oleh aktor politiknya sendiri dari dalam negeri. Persepsi tersebut kemudian mendapat pengakuan dari aktor lain dari luar. Hal ini menjadi landasan utama bagi pemikir konstruktivis dalam ilmu hubungan internasional. Sebab, bagi mereka tanpa adanya persepsi dan pengakuan dari para aktor internasional, sebuah negara tidak akan mendapatkan status tertentu.

Dari tinjauan pustaka tesis ini, penulis mendapatkan referensi baru mengenai status sebuah negara. Ini sangat sesuai dengan yang disampaikan Buzan dan Wæver dalam *three-tier scheme*. Bahwasanya sebuah negara harus mendapatkan pengakuan dari aktor negara lain di dunia.

Artikel berikutnya yang didapat berjudul *Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifications*, Efraim Inbar, Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute, 2010. Dalam artikel ini penulis memaparkan secara gamblang deklinasi hubungan Turki-Israel yang dipicu oleh tragedi Mavi Marmara (Gaza Flotilla) pada Juni 2010. Disebutkan bahwa momen tersebut menjadi titik balik reorientasi kebijakan luar negeri Turki, terutama terhadap Israel. Artikel tersebut juga menjelaskan dengan rinci rasionalisasi hubungan Turki-Israel (*strategic partnership*) semenjak 1990-an dan di awal abad ke-21. Berbagai bentuk kerja sama yang dibangun oleh kedua negara pada masa-masa “hubungan yang erat”. Penulis lebih menekankan kepada “*defense trade*” dan *strategic partnership* dalam bidang militer, seperti latihan bersama angkatan bersenjata bilateral. Yang menarik artikel tersebut juga menjelaskan mengenai perubahan pola kebijakan luar negeri Turki yang sangat berpola *Western* menjadi sesuatu yang sedang berjalan saat ini (menuju *Eastern*). Penulis juga menggambarkan bagaimana perubahan lingkungan strategis Turki di abad ke-21 yang jelas dipengaruhi pula oleh situasi domestik yang pada akhirnya menggiring reorientasi kebijakan luar negeri Turki dan ketegangan pada hubungan bilateral Turki-Israel. Kemudian pada akhirnya penulis memberikan dampak dari perubahan kebijakan luar negeri Turki dan reorientasi hubungan Turki-Israel terhadap stabilitas regional Timur Tengah dan politik global.

Jurnal tersebut setelah dibaca cukup memberikan gambaran atas apa yang hendak tesis ini hasilkan. Namun, apa yang disampaikan di dalam jurnal tersebut masihlah belum lengkap karena diterbitkan pada tahun 2010, sedangkan puncak dari apa yang disampaikan di dalam jurnal tersebut justru terjadi pada tahun 2011. Namun, secara keseluruhan artikel tersebut telah memberikan dampak cukup signifikan dari tesis yang akan ditulis, sehingga artikel tersebut dijadikan rujukan utama dalam pembahasan tesis.

Artikel lain yang cukup membantu dalam pemetaan pembahasan topik yang hendak diangkat adalah *Turkish-Israeli-Syrian Relations and Their Impact on the Middle East* Author(s): Alain Gresh Source: *Middle East Journal*, Vol. 52, No. 2 (Spring, 1998), pp. 188-203. Penulis memberikan gambaran bahwa aliansi Turki-Israel menjadi elemen geopolitik yang cukup fundamental di kawasan Timur Tengah. Aliansi bilateral antara Turki-Israel menyebabkan kekhawatiran negara lain di kawasan tersebut karena cenderung menjadi aliansi anti-Arab. Salah satu negara yang cukup khawatir terhadap aliansi antara Turki-Israel adalah Suriah. Artikel tersebut mencoba mengulas hubungan antara ketiga negara menggunakan pendekatan keamanan regional. Dimulai dari memberikan gambaran historis ketiga negara. Pola hubungan yang rumit menjadi salah satu bahasan menarik dari artikel tersebut, sehingga penulis mencoba untuk memberikan gambaran utuh bagaimana sebenarnya bentuk nyata dari hubungan ketiga negara. Perspektif masalah dicoba dijelaskan sebagai akar dari ketegangan trilateral, terutama Turki-Israel dengan Suriah.

Berikutnya yang cukup memberikan informasi tentang topik yang hendak diangkat adalah *A Little America: The Emergence of Turkish Hegemony*. Prof. Malik Mufti. *Crown center for Middle East Studies*. No. 51. May 2011. Dalam artikel ini penulis menjelaskan beberapa momen di mana Turki berkeinginan untuk menjadi negara hegemon di kawasan. Diawali dari sejarah pada tahun 1957 di mana presiden Turki saat itu berpidato bawah Turki suatu hari nanti akan menjadi Little America. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam analisa yang menarik yang menggambarkan bagaimana Turki berupaya untuk merealisasikannya. Penulis menjelaskan melalui perubahan gaya orientasi kebijakan luar negeri Turki yang digambarkan bagai gelombang. Kemudian, upaya Turki untuk berkonflik sebagai salah satu diplomasi agresif sebagai upaya “unjuk gigi”. Di paragraph berikutnya, penulis mencoba memberikan definisi hegemoni ala Turki dan menyambungkannya dengan apa yang telah disampaikan di paragraph awal. Pada akhir kesimpulannya penulis mengatakan bahwa Turki dapat dengan mudah menjadi Little Amerika setelah menelaah berbagai fenomena yang terjadi.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka.

No	Judul	Ringkasan	Penulis
1	<i>Regional Security Complex Theory and Insulator States: The Case of Turkey.</i>	Memberikan gambaran mengenai posisi Turki sebagai <i>insulator states</i> dan diapit oleh tiga RCS. Tesis ini memberikan informasi mengenai hubungan Turki dengan MERSC dan RSC Eropa. Penulis tesis tersebut menggunakan tiga sektor keamanan untuk melukiskan realitas RSC dan keterlibatan Turki di dalamnya, yaitu sektor politik, sektor sosial, dan sektor ekonomi. Menggunakan kerangka RSCT Buzan dan Wæver.	Wayne McLean
2	<i>Turkey's Position in the Middle East: Regional Hegemon or Peripheral Bystander?</i>	Membahas posisi Turki di Timur Tengah. Bahwa Turki adalah <i>regional power</i> yang terus mengembangkan posisinya. Dalam tulisan ini, penulis tesis menjabarkan dan menganalisa bagaimana Turki menjadi kekuatan regional dan diakui keberadaannya oleh negara lain. Pengakuan ini menjadi penting dalam teori <i>regional hegemon</i> dalam mazhab konstruktivis. Dengan demikian menjelaskan posisi Turki yang cukup signifikan mempengaruhi dinamika Timur Tengah.	Rick Brouwer
3	<i>Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifications, Efraim Inbar, Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute, 2010</i>	Paparan deklinasi hubungan Turki-Israel yang dipicu oleh tragedi Mavi Marmara (Gaza Flotilla) pada Juni 2010. Menjelaskan dengan rinci rasionalisasi hubungan Turki-Israel (<i>strategic partnership</i>) semenjak 1990-an dan di awal abad ke-21. Lebih menekankan kepada " <i>defense trade</i> " dan <i>strategic partnership</i> dalam bidang militer, seperti latihan bersama angkatan bersenjata bilateral. Perubahan pola kebijakan luar negeri Turki yang sangat berpola <i>Western</i> menjadi sesuatu yang sedang berjalan	Efraim Inbar

		saat ini (menuju <i>Eastern</i>). Reorientasi kebijakan luar negeri Turki dan ketegangan pada hubungan bilateral Turki-Israel. Perubahan kebijakan luar negeri Turki dan reorientasi hubungan Turki-Israel terhadap stabilitas regional Timur Tengah dan politik global.	
4	<i>Turkish-Israeli-Syrian Relations and Their Impact on the Middle East. Middle East Journal, Vol. 52, No. 2 (Spring, 1998), pp. 188-203.</i>	Aliansi Turki-Israel menjadi elemen geopolitik yang cukup fundamental di kawasan Timur Tengah. Aliansi bilateral antara Turki-Israel menyebabkan kekhawatiran negara lain di kawasan tersebut karena cenderung menjadi aliansi anti-Arab. Salah satu negara yang cukup khawatir terhadap aliansi antara Turki-Israel adalah Suriah. Pola hubungan yang rumit menjadi salah satu bahasan menarik dari artikel tersebut, sehingga penulis mencoba untuk memberikan gambaran utuh bagaimana sebenarnya bentuk nyata dari hubungan ketiga negara. Perspektif masalah dicoba dijelaskan sebagai akar dari ketegangan trilateral, terutama Turki-Israel dengan Suriah.	Alain Gresh
5	<i>A Little America: The Emergence of Turkish Hegemony. Crown center for Middle East Studies. No. 51. May 2011</i>	Momen di mana Turki berkeinginan untuk menjadi negara hegemon di kawasan. Diawali dari sejarah pada tahun 1957 di mana presiden Turki saat itu berpidato bawah Turki suatu hari nanti akan menjadi Little America. Kemudian, upaya Turki untuk berkonflik sebagai salah satu diplomasi agresif sebagai upaya “unjuk gigi”. Pada akhir kesimpulannya penulis mengatakan bahwa Turki dapat dengan mudah menjadi Little Amerika setelah menelaah berbagai fenomena yang terjadi.	Malik Mufti.

1. 4. 2 Landasan Teori

Untuk membedah permasalahan yang diajukan, digunakanlah teori dalam studi keamanan/strategis hubungan internasional. Teori ini berfungsi sebagai pisau analisa mengapa suatu fenomena dapat terjadi, sekaligus memberikan korelasi akurat mengenai dampak fenomena tersebut. Ada dua teori besar yang digunakan untuk menjabarkan masalah, yaitu *regional security complex theory* (RSCT) dan sekuritisasi. Keduanya merupakan produk dari Buzan dan Ole Wæver yang terdapat dalam bukunya *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003) dan *Security: A New Framework for Analysis* (1998)³¹. Kedua teori dapat ditemukan dalam kedua buku atau salah satunya.

Regional Security Complex Theory (RSCT)

Salah satu tujuan penggunaan konsep RSC adalah menempatkan “regional” sebagai salah satu level analisis yang tepat guna. Dua level analisa yang mendominasi dalam level analisa, nasional dan global, memiliki hubungan relasional yang inheren tidak bisa saling menegasikan. Level nasional dan global kadang menjadi kutub ekstrim yang sulit menjelaskan fenomena regional. *National security*, misalnya, sering menggunakan level *state* sebagai pusat keamanannya sendiri. Sedangkan level global, lebih kepada sebuah aspirasi ketimbang realitas³². Untuk itulah dibutuhkan konsep yang lebih presisi dalam menjelaskan hubungan antara kedua kutub tersebut. Level regional merujuk pada kondisi negara, aktor, atau unit di dalamnya berinteraksi bersama, di mana keamanan mereka tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Regional merupakan kawasan tempat bertemunya kepentingan nasional dan global secara bersamaan dan lebih sering terjadi³³.

RSC menurut Buzan dan Wæver adalah “*a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one*”

³¹ Untuk buku ini, selain Buzan dan Wæver, terdapat penulis lain yaitu Jaap de Wilde. Lihat Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1998)

³² Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 43.

³³ *Ibid.*, hal. 37.

*another*³⁴. Sebuah RSC membutuhkan kriteria sebagai berikut: 1) batas (*boundary*) 2) struktur anarki (terdiri dari dua atau lebih unit otonom) 3) polaritas (distribusi power dalam kawasan) 4) struktur sosial (termasuk pola *amity* dan *enmity*)³⁵.

RSCT adalah pendekatan baru dalam ilmu hubungan internasional. Pertama kali diperkenalkan oleh Barry Buzan pada 1983 dalam *People, states, and fear*, dan kemudian ditampilkan sebagai *grand theory* dalam *Regions and Powers* (Buzan & Wæver, 2003)³⁶. RSCT memiliki akar konstruktivis karena formasi dan operasionalisasi konsep RSCT bergantung pada pola *amity* dan *enmity* antar unit dalam sistem, di mana sistem regional dependen terhadap aksi-aksi dan interpretasi aktor di dalamnya³⁷. Pola tersebut membentuk interdependensi keamanan yang logis berdasarkan geografis (subglobal), misalnya. Karakter lokal RSC akan selalu dipengaruhi oleh sejarah kawasan, seperti permusuhan lama antara orang-orang Yunani dan Turki, Arab dengan Persia, Khmer dengan Vietnam, dsb atau secara umum tervisualisasi dengan rivalitas peradaban seperti Arab, Eropa, Asia, dan Amerika³⁸.

Level analisa dalam RSCT terbagi menjadi empat, yaitu 1) domestik, 2) hubungan *state-to-state*, 3) *region-to-region*, 4) *interplay* kekuatan global dengan struktur keamanan regional³⁹.

Insulator

Keamanan regional membentuk subsistem di mana dominan interaksi keamanan bersifat internal. Negara khawatir terhadap negara tetangganya dan beraliansi dengan aktor regional lain⁴⁰. Wilayah batas antar regional (secara geografis) adalah zona interaksi yang lemah atau diduduki oleh *insulator* (Turki, Burma, Afghanistan). Negara *insulator* harus menghadapi kedua beban tersebut; menerima posisi sulit dan tidak cukup kuat untuk menyatukan kedua atau lebih

³⁴ *Ibid.*, hal. 44.

³⁵ *Ibid.*, hal. 53.

³⁶ Wayne McLean, *loc. cit.*, hal. 7.

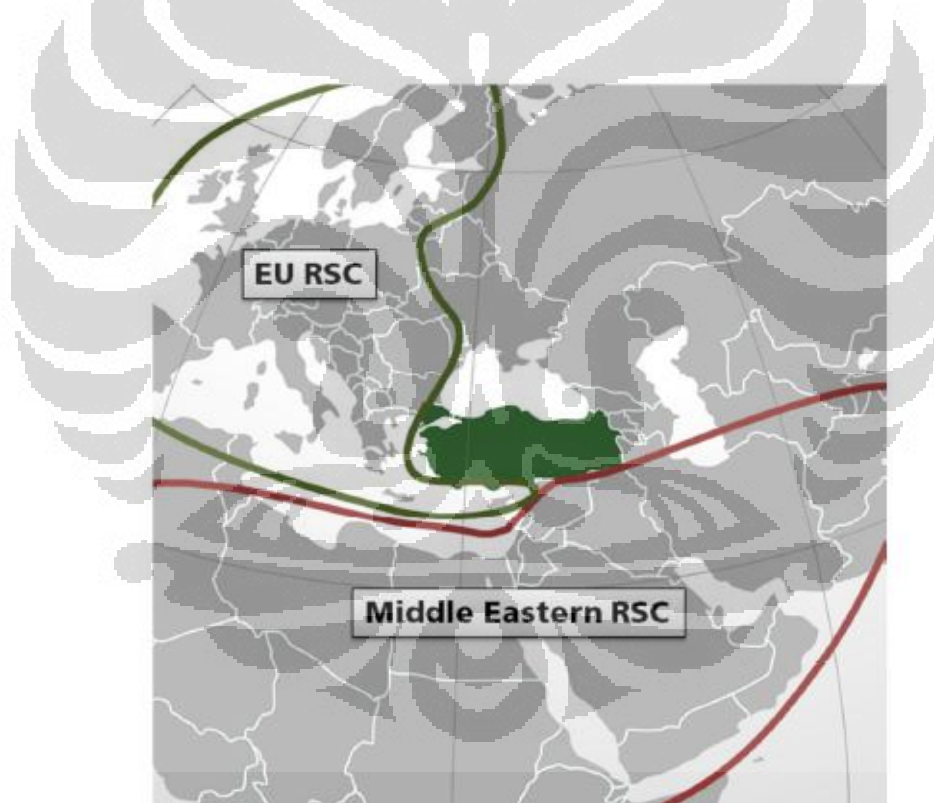
³⁷ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 40.

³⁸ *Ibid.*, hal. 45.

³⁹ *Ibid.*, hal. 51.

⁴⁰ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 41.

RSC dalam satu arena keamanan strategis yang koheren. *Insulator* adalah negara atau unit yang menduduki suatu wilayah di mana berdampingan dengan RSC yang lebih besar secara hadap-hadapan. *Insulator* berbeda dengan *buffer state* yang berada pada sentral sekuritisasi yang sangat kuat, bukan di ujung atau tepi dari RSC⁴¹. Seperti yang diperagakan gambar 2 di bawah (contoh langsung menggunakan Turki), bahwa *insulator* berbeda dengan *buffer*. *Insulator* menurut Buzan dan Wæver tidak seperti *buffer state* yang berada di tengah pusat sekuritisasi. Namun, *insulator* berada di ujung dua atau lebih RSC. Negara *insulator* haruslah memainkan peran pasif akibat banyaknya menerima “energi” atau masalah keamanan dari RSC di sekitarnya. Garis batas pada gambar tersebut merupakan garis khayal koherensial isu keamanan yang membentuk kompleksitas keamanan kawasan.

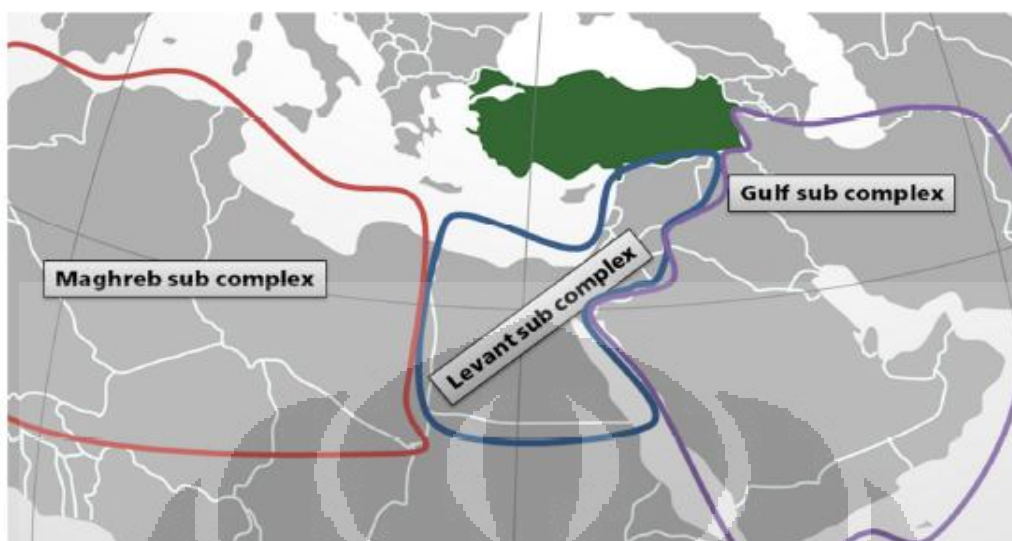


Gambar 2. Turki sebagai *insulator* (warna hijau) di tengah RSC European dan MERSC⁴².

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wayne McLean, *loc. cit.*, hal. 19.

Middle Eastern Regional Security Complex (MERSC)



Gambar 3. Turki (hijau) dan MERSC serta *subcomplex* Maghreb, Levant, dan Gulf⁴³.

MERSC kawasan yang didiami oleh bangsa Arab, Persia, dan Afrika⁴⁴ yang terdiri dari tiga *subcomplex*, yaitu *Maghreb subcomplex*, *Levant subcomplex*, dan *Gulf subcomplex*. Masing-masing *subcomplex* memiliki karakter dan problema keamanannya sendiri. *Levant subcomplex* terdiri dari Mesir, Israel, Suriah, Libanon, dan Jordan. *Maghreb subcomplex* terdiri dari Tunisia, Maroko, Libya, Aljazair. Sedangkan *Gulf subcomplex* terdiri dari Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Irak dan Iran⁴⁵. Seperti Asia Selatan, menurut Buzan dan Wæver, MERSC dilahirkan untuk berkonflik. Permasalahan keamanan paling krusial dalam MERSC adalah sengketa antara imigran Zionis dengan penduduk lokal Palestina. Isu ini telah berkembang sedemikian rupa dan menjadi perang *interstate* terbanyak⁴⁶. Sebab itu pula isu keamanan yang melibatkan konflik kedua bangsa tersebut dapat menjadi pemicu bagi ketegangan di kawasan. Selain itu, permasalahan lain yang sering terjadi

⁴³ Wayne McLean, *loc. cit.*, hal. 26.

⁴⁴ Daerah ini kadang juga disebut MENA atau Middle East and North Africa. Di dalam tesis ini menggunakan terminologi Buzan dkk yang didasari kompleksitas keamanan kawasan.

⁴⁵ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 191-193.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 188.

adalah konflik sektarian yang lebih kepada aktor *non-state*⁴⁷. Namun, tidak seperti Asia Selatan di mana dinamika regionalnya berkisar pada rivalitas tunggal dari dua *regional power*, MERSC memiliki pola yang jauh lebih kompleks yang terdiri dari lebih 20 negara yang relatif seimbang atau saling mengimbangi.

Gulf *subcomplex* dan Levant *subcomplex* merupakan dua sub-RSC yang paling sering mengalami dinamika keamanan di dalam MERSC. Maghreb *subcomplex* relatif lebih stabil, terdiri dari *weak states*, dan tidak banyak mengalami gejolak (sebelum Arab Spring)⁴⁸. Polaritas di dalam Gulf dan Levant *subcomplex* sangat menentukan dinamika keamanan yang terjadi, terutama pada era kejatuhan Saddam Hussein (2003), invasi Gaza (2008), dan Arab Springs (2010). Iran muncul menjadi kekuatan utama di Gulf *subcomplex*, invasi Israel ke Gaza telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di era modern yang menyebabkan 1500 orang tewas dan memicu perang dengan Hizbullah di Libanon, dan revolusi di dunia Arab telah menumbangkan rezim-rezim berkuasa di Tunisia, Libya, dan Mesir (Suriah, Yaman, dan Bahrain masih terus bergejolak)⁴⁹. Dinamika tersebut menimbulkan interaksi regional yang lebih riskan dan berpotensi membentuk polaritas baru di kawasan.

Sekuritisasi

Pendekatan RSCT dibangun oleh konsep “keamanan”⁵⁰, terutama konsep sekuritisasi. Menurut perspektif teori sekuritisasi, sekuriti tidak dibingkai dalam kondisi sebuah objek atau materi, tetapi lebih kepada *speech act* seperti yang dikatakan oleh Wæver: “*something is a security problem when the elites declare it to be so*”⁵¹. Sekuritisasi merupakan respon dari semakin meluasnya bentuk-bentuk ancaman suatu negara. Menurut para pemikir yang berasal dari The Copenhagen School seperti Barry Buzan, Ole Wæver, dll, “*security is about survival*”. Isu keamanan muncul ketika adanya ancaman nyata yang ditujukan pada suatu objek. Sekuritisasi memiliki arti bahwa sebuah masalah dapat menjadi ancaman

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 190.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 193.

⁴⁹ Sampai tesis ini ditulis, gejolak penentangan rezim yang berkuasa di Suriah, Yaman dan Bahrain masih terjadi menyusul suksesnya revolusi di Tunisia, Libya dan Mesir.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 48.

⁵¹ Ole Wæver, *op. cit.*, hal. 47.

keamanan negara, sehingga memerlukan suatu tindakan. Ancaman tersebut diasumsikan atau dirancang masuk ke dalam politisasi kebijakan. Oleh sebab itu, suatu subjek dapat saja menjadi masalah keamanan meski bersifat subjektif karena dinyatakan oleh aktor-aktor yang memiliki wewenang untuk itu. Menurut Buzan dkk, suatu masalah non-politis dapat dipolitisasi untuk kemudian menjadi isu sekuritisasi⁵².

Perangkat utama dalam RSCT adalah analisis sektoral. Perangkat ini merupakan perluasan dari sektor militer-politik dengan penambahan ekonomi, lingkungan, dan sosial⁵³. Buzan dkk, mengkategorisasikan *security* menjadi lima yaitu militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Dinamika dari kategorisasi tersebut ditentukan oleh aktor yang melakukan sekuritisasi dan objek yang dituju atau *referent objects*. Aktor didefinisikan sebagai subjek yang mensekuritisasikan isu-isu tertentu dengan melakukan deklarasi terhadap suatu objek tertentu mengenai ancaman-ancaman tertentu. Aktor ini bisa berupa pemimpin politik (kepala negara dan pemerintahan), birokrasi (seperti menteri luar negeri, gubernur, dll), kepala polisi, para pelobi, dan kelompok penekan (aktivis sosial dan kemanusiaan). Sedangkan *referent objects* adalah segala hal yang diasumsikan secara nyata terancam dan memiliki hak untuk bertahan atau dipertahankan. Di sini meliputi negara, kedaulatan nasional, ekonomi nasional, identitas kolektif, habitat lingkungan, dsb⁵⁴.

Sedangkan desekuritisasi adalah proses normalisasi suatu isu atau perluasan dari isu politik yang normal. Jika sekuritisasi membutuhkan *speech act*, maka desekuritisasi pengurangan *speech act*, bahkan tidak perlu ada sama sekali. Desekuritisasi juga merupakan produk politik yang dilakukan oleh elit suatu negara di mana melihat suatu isu keamanan sebagai isu politis biasa dan tidak perlu penyikapian khusus. Dengan kata lain, desekuritisasi merupakan kebalikan dari sekuritisasi.

⁵² Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, *op. cit.*

⁵³ Wayne Mclean, *loc. cit.*, hal. 8.

⁵⁴ *Ibid.*

Three-tier scheme

Untuk menjelaskan tentang aktor-aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi di level regional, Buzan dan Wæver memberikan tipologi khusus di tengah banyaknya definisi mengenai aktor tersebut. Aktor tersebut memiliki *power* untuk menentukan sekuritisasi dan desekuritisasi yang terbagi menjadi tiga skema atau *three-tier scheme*, yaitu *superpower*, *great power* dan *regional power*. *Superpower* menempati satu sudut spektrum besar, sedangkan *regional power* di sudut yang lain. Di antaran kedua sudut spektrum terdapat *great powers*⁵⁵. Dengan tipologi ini, Buzan dan Wæver menjelaskan siapa saja yang berada atau menjadi aktor dalam RSCT. Di samping itu, Buzan dan Wæver juga menjelaskan komponen yang ada dalam RSCT, yaitu RSC, *insulator*, dan *global power*. RSC adalah batas atau level analisa regional, *insulator* adalah batas kawasan spasial yang memisahkan satu RSC dengan RSC lainnya, dan *global power* adalah unsur eksternal yang mempengaruhi dinamika dalam RSC.

Untuk mendapatkan status *power* tersebut, sebuah negara haruslah memenuhi empat kriteria yang mencakup kapasitas dan kapabilitas material (militer dan ekonomi), klaim atau statemen mengenai perilakunya serta pengakuan formal, melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi, dan keberadaannya dalam level global diperhitungkan oleh aktor lainnya.

1. 4. 3 Operasionalisasi Konsep

Landasan teori di atas digunakan sebagai pisau bedah latar belakang permasalahan yang ada dalam topik tesis ini. Dengan permasalahan yang relatif kompleks, dan memerlukan penjabaran dengan jawaban terstruktur, maka dibutuhkanlah operasionalisasi konsep yang jelas dan runut. Operasionalisasi konsep ini menjadi landasan logika berpikir bagaimana menjawab pertanyaan penelitian.

Seperti yang telah disebutkan di dalam latar belakang dan permasalahan yang ada di dalamnya, maka untuk menjawab kompleksitas permasalahan ini digunakanlah konsep *regional security complex theory* (RSCT). Penggunaan teori

⁵⁵ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 34.

ini sangat jelas mengingat kasus yang diambil berasal dari *gap* antara kondisi normatif (teori *insulator*) dan realitas di lapangan. Teori *insulator*—seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya—menjelaskan posisi Turki yang seharusnya pasif dalam interaksi dengan RSC sekitarnya (Eropa, Kaukasus, dan Middle Eastern). Teori tersebut tidak secara gamblang mengulas apa itu *insulator* dan bagaimana Turki bisa dimasukkan ke dalam kelompok negara-negara *insulator*, meski dengan notifikasi khusus. Untuk menjelaskan *gap* tersebut maka indikator “aktif-pasif” digunakan sebagai penjelas posisi kebijakan luar negeri Turki beserta peran Turki di kawasan. Dengan menjabarkan berbagai kebijakan luar negeri Turki selama republik ini berdiri yang berhubungan dengan proses (de)sekritisasi, dan khususnya penekanan pada periode 2002-2011 (periode AKP), diharapkan dapat terpotret dengan jelas perubahan yang terjadi pada periode tersebut. Kebijakan-kebijakan ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebab itu dibutuhkan penjelasan lebih dalam penyebab terjadinya kondisi ini (dependen).

Perubahan yang terjadi tentu tidak berlangsung begitu saja, namun disebabkan oleh hal-hal yang bersifat penentu dan tidak tergantung (independen). Dalam teorinya, Buzan dan Wæver menyebutkan bahwa *insulator state* biasanya negara lemah dan tidak masuk ke dalam *three-tier scheme*. Negara-negara di luar RSC, selain *insulator*, yaitu terdiri dari negara *overlay* dan *penetrator*. Mereka terdiri dari negara-negara besar dengan klasifikasi *great power* atau *superpower*. Oleh karena Turki menunjukkan indikasi perilaku bukan *insulator*, sesuai dengan teori RSCT, maka Turki haruslah berada di antara tiga kategori skema *power* Buzan dan Wæver. *Three-tier Scheme* adalah *regional power*, *great power*, dan *superpower*. Jika Turki memiliki kapasitas lebih dari sekadar negara *insulator*, maka kemungkinan lain Turki adalah *regional power*. Jika demikian, maka struktur anarki dan distribusi kawasan haruslah berubah—itulah yang dikatakan oleh Buzan dan Wæver. Turki harus dimasukkan ke dalam RSC bersangkutan, misalnya MERSC. Namun, jika ternyata Turki tidak hanya memainkan peran dan atau memiliki kapasitas yang lebih dari *regional power*—seperti melakukan aktivitas sekritisasi lintas kawasan yang berbeda, maka Turki dapat dikategorikan sebagai *great power*. *Great power* memiliki kriteria tersendiri yang

harus dipenuhi seperti aspek material (militer dan ekonomi), perilaku sebagai “*great*”, sekuritisasi dan desekuritisasi, dan pengakuan dari aktor lain. Jika menggunakan terminologi Buzan dan Wæver, Turki tidak mungkin disebut *superpower*, sebab hanya ada satu *superpower* saat ini, yaitu AS.

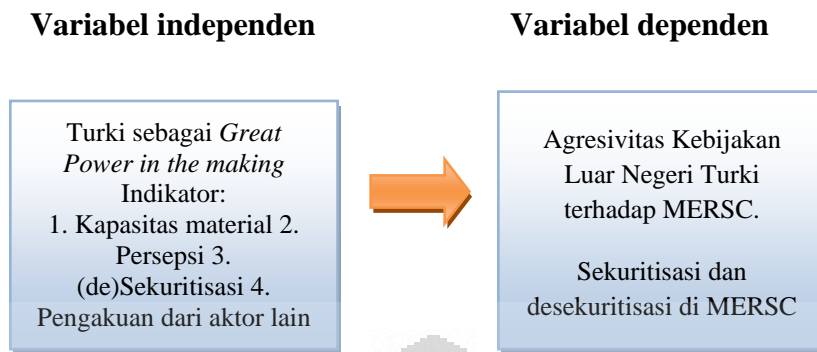
Jika demikian, maka argumentasi Turki bukan negara *insulator* (dalam Bab 2, variabel dependen) dapat dijawab menggunakan konsep *three-tier scheme* (dalam Bab 3, variabel independen). Hasil yang diharapkan adalah jawaban mengapa Turki sangat aktif di MERSC disebabkan Turki bukanlah negara *insulator* seperti yang disebutkan dalam RSCT dan sangat alamiah jika Turki aktif di kawasan. Setidaknya, selama periode 2002-2011 perilaku Turki menunjukkan perubahan gradual antara *regional power* dengan *great power*. Sebab itulah mengapa pada akhirnya Turki tidak lagi relevan untuk disebut sebagai *insulator state*.

Temuan-temuan dari proses penjabaran variabel dependen dan independen dibahas dalam kerangka analisa dan disimpulkan dalam bab akhir tesis ini.

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep.

Teori	Konsep	Indikator	Hasil
<i>Regional Security Complex Theory</i> (RSCT)	<i>Insulator</i>	Pasif dan tidak dapat mempertemukan dua RSC atau lebih dalam satu arena strategis keamanan	Turki kontemporer bukanlah <i>insulator state</i> , tetapi <i>great power in the making</i> , sehingga keaktifan sekuritisasi dan desekuritisasi di MERSC adalah sifat alamiah Turki
	<i>Three-tier scheme</i> (<i>superpower, great power, dan regional power</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas material <ol style="list-style-type: none"> a. Militer b. Ekonomi 2. Persepsi dan pengakuan formal 3. Sekuritisasi dan desekuritisasi 4. Diperhitungkan aktor lain sebagai <i>potential threat</i> 	

1. 4. 4 Model Analisa



1. 4. 5 Hipotesa

Hipotesa adalah serangkaian fenomena yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Tesis ini memiliki hipotesa bahwa kebijakan luar negeri Turki yang sangat agresif di MERSC menunjukkan bahwa Turki bukanlah negara *insulator*, tetapi *great power in the making*. Pada periode 2002-2011, Turki mengalami transformasi yang signifikan terkait berbagai peran (de)sekuritisasi Turki di kawasan, terutama MERSC. Aktivisme Turki di MERSC memberikan potret kontemporer Turki yang tidak relevan lagi dengan penjabaran Buzan dan Wæver dalam RSCT. Periode 2002-2011 masih relatif singkat untuk menegaskan Turki adalah *great power*, namun proses yang berjalan menunjukkan Turki menuju kesana. Dengan demikian menandakan proses Turki adalah *great power in the making*. Hipotesis ini sangat menarik untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga ada bahan diskusi dan analisa baru tentang konsep Turki sebagai *insulator*. Apakah masih dapat dipertahankan atau perlu ada revisi penjelasan *grand theory* Buzan dan Wæver terhadap MERSC dan Turki sebagai *insulator*.

1. 5 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. 5. 1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dinamika kawasan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara di dalam kawasan tersebut, termasuk *insulator*. Menurut Buzan dan Wæver, kondisi keamanan kawasan akan mempengaruhi negara-negara di dalamnya. Dalam kasus Turki sebagai negara

insulator—seperti yang dijelaskan oleh Buzan dan Wæver, seharusnya memainkan peran yang pasif di kawasan. Namun, hal itu ternyata tidak terjadi pada Turki. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak menjelaskan tentang:

1. Mengapa Turki memainkan peran sangat aktif, bahkan agresif, terhadap MERSC dengan melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi isu yang berkembang di dalam kawasan tersebut.
2. Status sebuah negara yang sangat aktif dan mempunyai pengaruh di regional, bahkan di tingkat global. Negara ini disebut juga sebagai *great power*. *Great power* mempunyai karakter aktif dan kepercayaan diri tinggi dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri disebabkan beberapa syarat menurut Buzan dan Wæver, sehingga dapat melakukan penetrasi pengaruh ke dalam kawasan lain.

1. 5. 2 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini menggambarkan bentuk hubungan antara negara *insulator* dengan RSC. Turki sebagai *insulator* memiliki peran yang cukup signifikan di kawasan, terutama MERSC. Dengan adanya karakterisasi *three-tier scheme*, karakter *insulator*—yang menurut Buzan adalah pasif—dapat menjadi lebih aktif dengan syarat *insulator* tersebut adalah *great power*. Hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik mengenai potret realitas hubungan antar aktor yang mempengaruhi keamanan regional. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam kajian keamanan terutama dalam kaitannya dengan *regional security complex*, khususnya referensi akademik mengenai *insulator*.

1. 6 Sistematika Penelitian

Tesis ini akan disusun dengan beberapa bab dan sub-bab. Secara singkat, bab-bab tersebut adalah:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, metodologi penelitian, kerangka teori yang terbagi menjadi tinjauan pustaka dan landasan teori, model analisa, hipotesa, tujuan dan

signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini menjelaskan secara utuh gambaran tesis yang hendak ditulis.

Bab II adalah pemaparan mengenai berbagai kebijakan Turki yang dibagi menjadi dua periode: periode pra-AKP (1923-2002) yaitu pada masa Perang Dingin (1923-1990) dan pasca Perang Dingin (1990-2002); periode AKP (2002-2011). Periode AKP akan fokus pada dua isu utama yaitu sekuritisasi isu Palestina dan desekuritisasi isu Kurdi dan revivalisme Islam. Sekuritisasi dan desekuritisasi isu regional menjadi problema bagi konsep *insulator*. Sebab, seharusnya Turki bersikap pasif atau maksimum reaktif. Namun, pada kenyataannya Turki sangat aktif menyikapi isu regional.

Bab III adalah pemaparan mengenai Turki sebagai *great power in the making* menggunakan *three-tier scheme*. Pada bab ini akan dijabarkan secara empirik bahwa Turki adalah *great power in the making* melalui data set dan perbandingan kuantitatif. Penjabaran tentang *great power* penting untuk membuktikan mengapa Turki bersikap seperti di Bab II.

Bab IV adalah analisa dari Bab II dan Bab III menggunakan kerangka teori yang telah diberikan di Bab I. Dengan membedah kedua variabel dependen dan independen menggunakan teori-teori yang ada, diharapkan dihasilkan potret realitas asumsi dan hipotesa yang telah dibangun. Dari sini kemudian akan didapat sebuah kesimpulan paripurna, yang menjawab pertanyaan penelitian di awal.

Bab V adalah bab kesimpulan yang telah didapatkan dari perpaduan pemaparan serta analisa di bab sebelumnya. Sehingga menjadi poin-poin penting gagasan yang menjawab pertanyaan penelitian. Serta tidak lupa penyampaian saran akademik terhadap kajian ini untuk masukan bagi kajian akademik berikutnya.

BAB 2

DARI BARAT KE TIMUR: BAGAIMANA TURKI MEMAINKAN PERAN YANG “TIDAK BIASA”

Buzan dan Wæver dalam berbagai buku dan jurnal telah menjelaskan pentingnya untuk memahami secara empirik dinamika keamanan kawasan dan interdependensi di dalamnya. Mereka berargumen bahwa tidak ada negara di dunia—di dalam kawasan—yang tidak mengalami implikasi dari dinamika sekitarnya. Sedangkan analisa global terhadap permasalahan keamanan suatu negara kadang terlalu generik dan tidak relevan dalam memahami kompleksitas keamanan di dalam kawasan tersebut, begitu pula konstelasi domestiknya. Sebab itu, Buzan dan Wæver memberikan kerangka konseptual bagaimana memahami dinamika keamanan suatu negara yang berkaitan erat dengan kawasan (regional) melalui *grand theory* dalam buku *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Di sinilah kemudian analisa keamanan level regional menjadi penting untuk membedah lebih lanjut dinamika keamanan suatu kawasan.

Untuk memahami dinamika regional tersebut, harus dimengerti bahwa kebijakan keamanan suatu negara dapat berkontribusi terhadap interaksi di kawasan. Interdependensi isu keamanan domestik dengan regional saling mempengaruhi. Turki merupakan salah satu contoh negara yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh regional yang kemudian mempengaruhi dinamika keamanan domestik di dalam Turki sendiri.

Bab ini akan membahas mengenai berbagai kebijakan luar negeri Turki yang mengalami reorientasi dan cenderung lebih aktif ke Timur Tengah. Penjabaran pada bab ini penting untuk memberikan gambaran kontemporer mengenai tingkah laku (keterkaitan antara sekuriti dengan sekuritisasi dan desekuritisasi) Turki di percaturan politik internasional, khususnya Timur Tengah dan bagaimana kawasan tersebut mempengaruhi kebijakan Turki. Sebab ada yang “tidak biasa” yang ditunjukkan oleh Turki bertolak belakang dengan kondisi normatifnya.

Untuk memudahkan melihat perkembangan dan perubahan kebijakan luar negeri Turki, penulis membaginya menjadi dua fase utama, yaitu fase 1923-2002 dan fase 2002-2011. Fase 1923-2002 akan diturunkan menjadi Turki pada masa Perang Dingin dan Turki pada pasca Perang Dingin. Sedangkan kebijakan luar negeri Turki pada 2002-2011 akan berfokus pada kebijakan yang fundamental serta bersifat regional seperti sekuritisasi isu Palestina dan desekuritisasi isu Kurdi dan Islamisme dengan negara sekitar seperti Iran, Irak, dan Suriah. Dengan membandingkan kedua fase tersebut dan penjabaran mendetail mengenai kasus sekuritisasi dan desekuritisasi, diharapkan dapat ditemukan perbedaan yang signifikan dari reorientasi kebijakan luar negeri Turki.

2. 1 Turki pada Periode 1923-2002

Turki pada periode ini merupakan pembaruan dari Turki Ottoman yang runtuh pada 1923 oleh Mustafa Kemal Pasha atau yang lebih dikenal dengan Attaturk⁵⁶. Turki Ottoman yang telah berkuasa selama lebih dari 400 tahun dan menjadi kekuatan utama dunia runtuh menandakan berakhirnya imperium terbesar, sekaligus mengakhiri kekuasaan Islam politik di sistem global⁵⁷. Turki kemudian mengalami restorasi besar-besaran dengan merujuk ke barat dan melakukan modernisasi. Modernisasi yang dimaksud adalah *taking place in the civilization of Europe. Western civilization* seringkali merujuk pada Eropa Barat, khususnya Inggris dan Perancis. Selama periode ini, orientasi kebijakan luar negeri Turki dengan jelas merujuk kepada Barat⁵⁸, baik sebagai aliansi maupun referensi. Dua orientasi utama dari kebijakan luar negeri Turki. Pertama, menjaga eksistensi negara sesuai kedaulatannya dan membangun kembali fondasi-fondasi berbangsa dan bernegara. Kedua, merealisasikan formasi kebijakan luar negeri *Western-oriented* dengan mengalihkan konsentrasi ke Barat⁵⁹.

⁵⁶ Attaturk berarti “Bapak Turki”. Mustafa Kemal Pasha melakukan reformasi revolusioner terhadap Turki, terutama mengubah Turki dari mornarki absolut (kesultanan) menjadi republik dan melakukan westernisasi termasuk melarang agama memasuki ruang publik. Rezim baru ini kemudian disebut Kemalist.

⁵⁷ Yucel Bozdoglioglu, *Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: a Constructivist Approach*, (New York & London: Routledge, 2003), hal. 35.

⁵⁸ “Barat” yang dimaksud dalam tesis ini adalah merujuk pada Eropa dan Amerika Serikat.

⁵⁹ Gulbahar Yelken Aktas, *loc. cit.*, hal. 5.

2. 1. 1 Turki pada Masa Perang Dingin

Setelah mengalami *independence war* (1920-an) dan *inter-state war* (1923-1945), Turki mengambil kebijakan netral dan melakukan konsolidasi rezim Kemalist. Namun, meski demikian Turki tetap melakukan upaya westernisasi di bidang ekonomi dan politik. Selama *inter-state war* Turki menjalin hubungan erat dengan Inggris dan Perancis, sedangkan selama Perang Dunia ke-2, Turki menjalin hubungan sangat dekat dengan Amerika Serikat (AS). Orientasi ini terus berlangsung pasca Perang Dunia ke-2, bahkan menjadi lebih kuat. Turki merupakan satu-satunya negara di antara Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang menjadi aliansi Barat. Upaya ini merupakan tujuan utama dari modernisasi Turki rezim Kemalist⁶⁰.

Selepas Perang Dunia ke-2, konstelasi hubungan internasional diwarnai oleh bipolaritas yang membawa dampak signifikan terhadap negara-negara di dunia. Dunia secara sederhana dibagi menjadi dua blok: blok barat yang dipimpin oleh AS dan blok Timur yang dikomandoi Uni Soviet. Kompetisi dan rivalitas antar kedua blok—lebih tepatnya kedua negara—menciptakan atmosfer kompetitif dan rasa saling curiga. Sebab itu, masa-masa ini sering juga disebut Perang Dingin. Periode ini merupakan salah satu titik balik kebijakan luar negeri Turki⁶¹. Polaritas dunia yang terbagi menjadi bipolar di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet hampir sangat mustahil memberikan opsi netralitas bagi Turki yang berada tepat di pertemuan tiga benua (Eropa, Asia, dan Kaukasus). Posisi tersebut menjadikan Turki sebagai jembatan rivalitas antar kedua blok dan memaksa Turki untuk memilih. Orientasi Kemalist yang menginginkan Turki Muda menjadi bagian dari Eropa membuat Turki akhirnya memutuskan bergabung dengan blok AS—sebagai representasi dari “Barat”. Semenjak 1947, Turki secara resmi beraliansi dengan Barat, terutama AS. AS, di bawah Truman Doctrine, memberikan bantuan finansial dan militer kepada Turki untuk membendung pengaruh komunisme Uni Soviet⁶².

⁶⁰ *Ibid*, hal. 57.

⁶¹ Yucel Bozdaglioglu, *op. cit.*, hal. 57-106

⁶² *Ibid.*, hal. 58.

Keberpihakan Turki semakin kuat saat bergabung dengan NATO pada 1952 yang menunjukkan posisi Turki terhadap Barat⁶³. *Positioning* ini memberikan dampak terhadap politik, ekonomi, dan strategi keamanan di internal Turki maupun eksternal Turki. Dampak eksternal yang paling terlihat bagi kawasan tetangga Turki adalah hubungan dengan negara-negara Arab. Sebagai contoh, Baghdad Pact dan Balkan Treaty yang semakin menguatkan hal tersebut, di mana Turki mengambil kebijakan “jaga jarak”⁶⁴. Meski Turki ikut dalam Konferensi Asia-Afrika, *positioning* tadi menciptakan kecurigaan dan sentimen khususnya negara-negara Timur Tengah yang menganggap Turki hanyalah alat bagi dunia Barat⁶⁵. Kondisi ini diperburuk dengan dukungan Turki terhadap Inggris dan Perancis dalam krisis Suez (1956), perbedaan sikap dalam kasus Kudeta Irak (1958), dan ancaman terhadap Suriah dalam krisis AS-Suriah (1957). Puncaknya adalah saat Turki menjadi negeri Muslim pertama yang mengakui Israel⁶⁶. Meski mengambil posisi netral, sebenarnya negara-negara MERSC sendiri menjalin hubungan yang erat dengan salah satu dari *superpower*. Pada periode ini, jelas Turki sangat menjaga jarak dengan MERSC dan pengaruhnya di kawasan ini sangatlah terbatas. Sebab para aktor sekuriti di Turki menganggap MERSC sangatlah tidak stabil dan dipenuhi berbagai macam konflik seperti isu sektarian, politik, ekonomi, dsb.

Pada awal 1960-an, konflik Siprus membuat Turki sempat kecewa terhadap Barat, terutama AS. Respon AS terhadap kebijakan Turki mengenai Siprus membuat hubungan yang memburuk dan memicu sentimen anti-AS di dalam negeri Turki. Kondisi ini memperkuat suara oposisi dalam negeri untuk mempertimbangkan kembali hubungan erat Turki dengan Barat. Namun, pada 1963 Turki mendapatkan status *associate member of EU* dan pada 1987 secara resmi mengajukan proposal untuk bergabung ke dalam EU.

⁶³ Meliha Benli Altunisik, “The Possibilities and Limits of Turkey’s Soft Power in the Middle East”, *Insight Turkey*, Vol. 10, No. 2 (2008), pg. 41-54, hal. 42.

⁶⁴ Ofra Bengio, Gencer Ozcan, “Old Grievances, New Fears: Arab Perceptions of Turkey and Its Alignment with Israel”, *Middle Eastern Studies*, Vol. 37, No. 2 (April 2001), pp. 50-92, hal. 54

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 42.

⁶⁶ Ofra Bengio, Gencer Ozcan, *loc. cit.*, hal. 57.

Tiga perkembangan penting yang terjadi pada 1980-an yang mengubah persepsi ancaman Turki: revolusi Iran (1979), invasi Soviet ke Afghanistan, dan Perang Iran-Irak. Bagi Turki, dinamika ini menambah pentingnya keanggotaan dalam NATO dan aliansi Barat. Di Timur Tengah, Turki tetap menjaga jarak dari Perang Iran-Irak, tetapi tetap meningkatkan perdagangan dengan keduanya. Gagasan “jaga jarak” ini sebenarnya sudah dimulai semenjak Sadabad Pact ditandatangani oleh Turki, Irak, Iran dan Afghanistan⁶⁷. Perlahan namun pasti rezim Kemalist menerapkan kebijakan “menjauh” dari Timur Tengah di mana Sadabad Pact berisi afirmasi masing-masing negara untuk tidak saling intervensi. Semenjak itu sampai awal 1990-an, Turki cenderung tidak ingin terlibat dalam isu keamanan dengan Timur Tengah. Meski dalam hal perdagangan, tetaplah dilakukan dengan intensitas yang cenderung tidak terlalu besar. Setelah Saddam Hussein menginvasi Kuwait, Turki mendukung AS untuk mendorong PBB menerapkan embargo terhadap Irak. Meski pada masa Turgut Ozal Turki nampak lebih independen dalam ekonomi, tetapi tidak mengurangi pandangan bahwa Turki tetaplah negara satelit (perpanjangan) Barat⁶⁸.

Pada periode ini, Turki tidak otonom karena mengekor pada kebijakan Barat. Sesuai dengan amanat doktrin Kemalist, Turki jauh lebih pasif dan reaktif terhadap Timur Tengah. Bagi Barat, posisi Turki sangatlah strategis. Sebab itu, Turki menjadi pembendung utama dari negara-negara di Kaukasus dan Balkan (selain Yunani) yang mendapatkan pengaruh komunis⁶⁹. Itulah mengapa pada masa Perang Dingin, sikap Turki terhadap dua kawasan tersebut sangat terbatas, tertekan, dan berhati-hati. Sikap yang sama juga ditunjukkan kepada negara-negara di Timur Tengah.

⁶⁷ Bezen Balamir-Coskun, “Turkey, the Middle East and the EU: Bridging Across Troubled Lands or Just Pragmatism?” (Paper, presentasi pada Turkey and the EU: Opportunities and Challenges in the Accession Process, The University Association for Contemporary European Studies & Turkish University Association for European Studies, Istanbul, 16-18 Juni 2010), hal. 2.

⁶⁸ *Ibid.*, hal 3.

⁶⁹ Dİbid Ekinci, “Turkey between the Balkans and the Caucasus in the Post-Cold War Era: ‘Insulator’ or Player State?” *Cankaya University Journal of Humanity and Social Sciences*, 7/2 (November, 2010), pp. 441-465, hal. 442.

2. 1. 2 Turki Pasca Perang Dingin

Perang dingin diakhiri dengan runtuhnya Unit Soviet, sehingga tidak ada lagi bipolaritas di dunia. Kondisi ini mengkhawatirkan bagi Turki sebab alasan untuk bergabung dengan Barat dapat saja sudah tidak relevan lagi, tak ada lagi yang harus dibendung (komunisme). Turki sebagai jembatan penghubung antara dunia Barat dan Timur hanya tinggal normatifnya saja. Setidaknya, pada masa Perang Dingin, Turki fokus pada dua hal utama. Pertama, menjaga independensi negara, meningkatkan keamanan dan menjaga *status quo* doktrin Kemalist yang berkonsentrasi pada modernisasi, sekularisasi, dan nasionalisasi. Kedua, menjadikan Turki sepenuhnya ekuivalen dengan negara-negara Eropa lainnya dalam EU⁷⁰. Fokus ini membuat Turki terus berorientasi pada Barat dan tetap menjaga jarak dengan Timur Tengah hingga berakhir Perang Dingin.

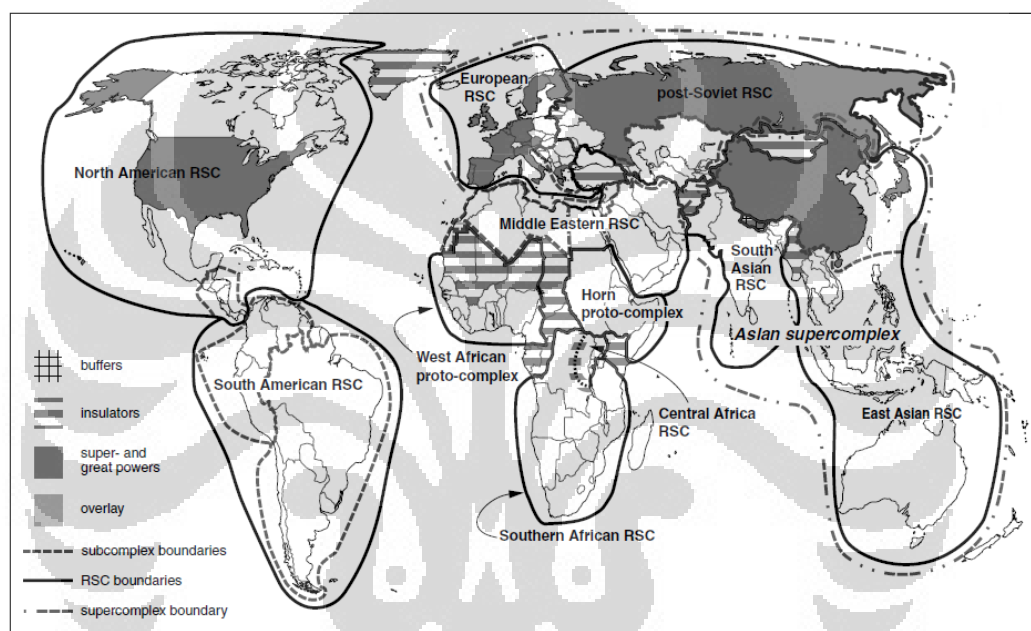
Dengan berakhirnya bipolaritas kekuatan dunia, Turki—sebagai negara yang berada dalam proteksi Barat dan menjadi alat untuk membendung Komunisme selama Perang Dingin—menemukan kebimbangan posisi. Fase pasif pada saat beraliansi penuh dengan Barat mulai ditinggalkan. Turki pada masa ini jauh lebih asertif dan aktif pada sekitarnya dengan membangun kebijakan luar negeri multi-arah, membangun hubungan dengan Kaukasus dan Republik Turki Siprus, berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian di Balkan, mempromosikan hubungan perekonomian dengan negara-negara Laut Hitam, dan meningkatkan hubungan ekonomi dan politik kepada Timur Tengah⁷¹. Berakhirnya Perang Dingin menjadi titik balik bagi hubungan Turki dengan kawasan sekitarnya, terutama MERSC di mana selama Perang Dingin hubungan keduanya cukup dingin.

Meski Perang Dingin telah berakhir dan intensitas Turki ke regional seperti MERSC meningkat, bukan berarti menunjukkan berkurangnya masalah keamanan domestik dan regional. Turki justru semakin aktif melakukan sekuritisasi terhadap isu-isu sensitif terkait keamanan nasional. Dalam hal ini,

⁷⁰ Bezen Balamir-Coskun, *loc. cit.*, hal 3.

⁷¹ Paula Sandrin, "Turkish Foreign Policy after the end of Cold war: From Securitising to Desecuritising Actor", hal. 1, file diunduh dari <http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/ContemporaryTurkishStudies/Paper%20PS.pdf>

contoh nyata yang paling menonjol adalah penggunaan kekuatan militer untuk menekan “ancaman nasional” Turki dari luar. Serangan militer ke utara Irak untuk menghancurkan kekuatan PKK (Partai Pekerja Kurdistan), ancaman terhadap Suriah dengan mengerahkan sejumlah pasukan di perbatasan kedua negara, dsb. Tahun 1995, Parlemen Turki mengumumkan jika Yunani memperluas wilayah lautnya dari 6 menjadi 12 mil, Turki akan berperang melawan Yunani⁷². Pengerahan itu bukan sekadar gertak sambal Turki. Hampir saja perang besar terjadi jika kedua negara tidak menahan diri.



Gambar 4. Pola RSC pasca era Perang Dingin⁷³.

Rezim militer yang dominan ikut menentukan kebijakan luar negeri Turki. Persepsi ancaman nasional yang terbentuk pada dasarnya adalah persepsi militer. Persepsi ini juga yang kemudian membentuk definisi ancaman internal Turki, seperti revivalisme Islam dan Kurdi. Ini ditunjukkan dengan merevisi Red Book (Dokumen Kebijakan Keamanan Nasional) yang memasukkan separatisme Kurdi sebagai ancaman utama pada 1992 dan pada 1997 memasukkan gerakan politik Islam.⁷⁴ Sebab, militer sendiri berpandangan ancaman internal Turki terbentuk dari ancaman eksternal. Dengan demikian, pandangan yang terbentuk adalah

⁷² *Ibid.*

⁷³ Barry Buzan dan Ole Wæver, *op. cit.*, hal. 28.

⁷⁴ Paula Sandrin, *loc. cit.*

Turks have no friends but Turks. Pada masa ini, Turki harus menghadapi peningkatan serangan PKK, bangkitnya kekuatan Islamis di Turki (Partai Refah), dan selesainya Perang Dingin yang mengkhawatirkan Turki kehilangan orientasi Baratnya (keanggotaan NATO). Bagi Turki, keberadaan di NATO merupakan simbolisasi dari identitas ke-Eropa-an. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Turki sangat khawatir NATO tidak lagi menjadi penting—sebab tak ada lawan lagi (Uni Soviet). Inilah kemudian yang menyebabkan Turki semakin dekat dengan Israel, keras dengan Kurdi dan negara-negara tetangga yang menyokong radikal revivalisme Islam dan gerakan Kurdi, seperti Iran, Irak dan Suriah⁷⁵.

Penjagaan identitas ke-Eropa-an Turki melalui upaya menggabungkan diri ke dalam EU tentu pada akhirnya akan membawa dampak bagi internal Turki. Sebagai contoh, demokratisasi yang dihembuskan oleh EU sebagai syarat keanggotaan membawa perubahan positif bagi atmosfer politik domestik Turki. Reduksi peran militer seperti Dewan Keamanan Nasional, memberikan wajah baru Turki yang lebih demokratis. AKP sebagai entitas politik yang memenangi pemilihan umum Turki telah memunculkan corak baru Turki modern yang lebih demokratis, dialogis, dan aktif⁷⁶. Corak ini cukup terlihat dalam kebijakan luar negerinya. Salah satu yang paling menonjol dari sekian banyak kebijakan populis AKP adalah sikap keras Turki terhadap Israel yang berbeda 180 derajat dari rezim sebelumnya. Dalam hal ini, Erdogan melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu Palestina melalui berbagai *speech act*-nya dan mengeluarkan kebijakan yang menempatkan hubungan Turki-Israel berada pada level terendah selama 20 tahun terakhir. Karakter positif inilah yang kemudian mewarnai kebijakan luar negeri Turki selama satu dekade berikutnya.

2. 2 Turki pada Masa 2002-2011

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan aktor politik dalam negeri dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu bangsa. Aktor tersebut secara politis

⁷⁵ Ofra Bengio dan Gencer Ozcan, *loc. cit.*, hal 50-92.

⁷⁶ Pengaruh proses integrasi keanggotaan ke dalam EU sangat terasa pada transformasi internal Turki. Persyaratan yang harus dilaksanakan Turki mempengaruhi proses demokratisasi, karakter dialogis, dan reformasi hukum. Selebihnya dapat dilihat dalam jurnal akademik yang ditulis oleh Emiliano Alessandri, "The New Turkish Foreign Policy and the Future of Turkey-EU Relations", *Instituto Affari Internazionali*, (3 Februari, 2010), hal. 1-19.

akan bertindak atas nama bangsa dan negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sebab itu, pembagian fase sejak tahun 2002 menjadi penting karena pada titik itulah dimulainya politik luar negeri Turki yang dihasilkan kelompok pemenang pemilu. Fase ini ditandai dengan perubahan politik domestik yang terjadi di Turki yang dimenangi oleh *Adalet ve Kalkınma Partisi (The Justice and Development Party, Partai Keadilan dan Pembangunan)* yang biasa disingkat AKP. AKP telah banyak mengeluarkan kebijakan luar negeri progresif dan berbeda dari fase sebelumnya.

Ada semacam konsensus yang diakui oleh para pembuat kebijakan, jurnalis, akademisi, dan komponen lain di Turki bahwa pada masa ini Turki mengalami periode transformasi⁷⁷. Stabilitas politik yang baik, ekonomi yang progresif, dan proses demokratisasi yang positif membentuk wajah baru Turki. Hal ini memberikan kesimpulan sederhana bahwa Turki sedang beranjak dari Turki Lama (*the Old Turkey*) menuju Turki Baru. Perubahan ini tidak hanya terjadi di level domestik, tetapi juga sangat signifikan mempengaruhi realitas geopolitik dan geo-strategis Turki⁷⁸. Demokratisasi membawa dampak signifikan terhadap potensi ancaman yang diberlakukan negara. Pada era 1990-an hingga 2000-an, Turki sangat dipengaruhi oleh rezim militer, termasuk kebijakan luar negerinya. Permasalahan Kurdi dan Siprus, misalnya, telah membawa Turki menggunakan kekuatan militer dalam penanganannya. Sekuritisasi keduanya berdasarkan pengalaman pahit disintegrasi era Ottoman yang menjadikan Turki kehilangan separuh lebih wilayah kekuasaannya.

Menteri Luar Negeri Turki, H. E. Ahmet Davutoglu, yang sekaligus arsitek kebijakan luar negeri Turki modern, mengatakan dalam Konferensi Internasional di Oxford, bahwa doktrin kebijakan luar negeri Turki yang dirumuskan dalam *Strategic Depth*⁷⁹ berdasarkan empat isu sentral. Yaitu, stabilitas kawasan berdasarkan kesepahaman terhadap isu keamanan, proaktif

⁷⁷ Paula Sandrin, *loc. cit.*, penjelasan detail dapat dilihat di dalam catatan kaki Paula Sandrin.

⁷⁸ Talip Küçükcan, Müjge Küçükkeles, "European Perceptions of Turkish Foreign Policy", SETA Policy Report, No. 19 (April, 2012), hal. 10.

⁷⁹ *Strategic Depth* adalah doktrin luar negeri Turki yang diadaptasi dari buku Ahmet Davutoglu yang dipublikasi pada 2001. Ahmet Davutoglu adalah professor di Universitas, seorang akademisi, dan penasehat Erdogan.

terlibat dalam suasana politik yang dialogis, menumbuhkan interdependensi ekonomi regional, dan mempromosikan perdamaian multikultural, multisektarian, dan harmonisasi⁸⁰. Keempat isu sentral tersebut hanya dapat diraih menggunakan pemahaman keamanan dan kebebasan (*security and freedom*). Menurut Davutoglu, “*Security and freedom are two of these key values—security and freedom for all of humanity and not just for some people and some nations.*”⁸¹” Dari sini kemudian diturunkan pula menjadi prinsip “*zero problem with neighbors*”. *Zero problem* artinya maksimalisasi kerja kooperasi (kerja sama), multidimensi kebijakan, gaya baru diplomasi yang lebih dalam terlibat, dan perhatian yang seimbang antar kawasan (EU, MERSC, dsb)⁸².

Doktrin *Strategic Depth* tidak hanya menjadi wacana semata. Turki secara proaktif melakukan kebijakan revolusioner yang sebelumnya (pra-AKP) tidak terjadi atau hanya sebatas retorika semata. Keterlibatan aktivisme regional Turki tercermin dari proses sekuritisasi dan desekuritisasi terhadap suatu isu keamanan. Sebagai contoh, semenjak 2004 Turki mulai mengambil posisi mengkritik Israel untuk isu Palestina. Meski hubungan antara keduanya sangatlah erat, namun perlahan Turki mulai bersuara. Di sisi lain, hubungan yang sebelumnya dipenuhi kecurigaan dan saling ancam antara Turki dengan Iran, Suriah, dan Irak kemudian berubah menjadi kerja sama yang lebih erat di bidang ekonomi dan keamanan. Hal ini menunjukkan perubahan drastis kebijakan Turki terhadap negara-negara di sekitarnya selama periode 2002-2011.

2. 2. 1. Turki di MERSC

“I greet with affection the people of Baghdad, Damascus, Beirut, Amman, Cairo, Tunis, Sarajevo, Baku, Nicosia, and all other friend and brother peoples who are following the news out of Turkey with great excitement. Today, the Middle East, the Caucasus and the Balkans have won as much as Turkey.” (Recep Tayyip Erdogan)

⁸⁰ SEESOX (South East European Studies at Oxford), “Turkey’s Foreign Policy in a Changing World: Old Alignments and New Neighbourhoods”, (International Conference, Oxford, 30 April – 2 Mei 2010), hal. 9-10.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 9.

⁸² *Ibid.*, hal. 13.

Begitulah isi pidato kemenangan Erdogan di Ankara beberapa jam setelah partai yang dipimpinnya memenangi 50% suara untuk pemilu parlemen Turki⁸³. Pidato tersebut ditujukan untuk orang-orang yang berada di luar Turki yang mengikuti berita kemenangan AKP dengan suka-cita. Erdogan bahkan menambahkan, “*We will become much more active in regional and global affairs. We will take on a more effective role. We will call, as we have, for rights in our region, for justice, for the rule of law, for freedom and democracy.*” Pidato tersebut menjadi landasan bagi peningkatan peran Turki di kawasan. Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat keterlibatan Turki bisa dimaknai untuk menjaga kepentingan politik dan ekonominya sendiri.

Arah kebijakan Turki terhadap Barat tidak akan berubah, hanya saja mengalami perluasan spesifik dalam memainkan peran regionalnya terutama peningkatan hubungan dengan negara-negara Islam di MERSC⁸⁴. Bukti peningkatan ini ketika Turki banyak melakukan mediasi terhadap persoalan keamanan yang terjadi di kawasan ini seperti mediasi kasus Israel-Suriah pada Januari 2004 (meski kemudian mengalami kegagalan disebabkan isolasi Barat terhadap Suriah), Perang Libanon pada 2006, dan serangan Israel ke Suriah pada 2007. Pada Desember 2008, Erdogan melakukan *dinner talks* bersama Ehud Olmert (Perdana Menteri Israel) untuk membicarakan perdamaian di Timur Tengah. Lima hari setelah itu, Israel melancarkan serangan ke Gaza yang menyebabkan proses mediasi tersebut gagal. Mediasi antara Hamas-Israel pun dilakukan Turki, meski tanpa hasil yang nyata. Menlu Turki, Davutoglu, melakukan kunjungan ke Damaskus untuk mencoba memediasi pembebasan Ghilad Shalit, tentara Israel yang ditangkap Hamas pada 2006, dengan pertukaran tahanan Palestina. Keterlibatan kedua saat terjadi serangan Israel ke Gaza pada Desember 2008 - Januari 2009, di mana Davutoglu berkunjung ke Damaskus dan Kairo untuk membujuk Hamas melakukan gencatan senjata dengan Israel⁸⁵.

⁸³ Susanne Gusten, “Mandate for a New Turkish Era”, *International Herald Tribune*, 16 Juni 2011, diakses dari www.weltreporter.net edisi cetak.

⁸⁴ Ak Parti Official Web Site, <http://www.akparti.org.tr/english>, akses pada 28 Mei 2012.

⁸⁵ Meliha Benli Altunisik, “Turkey’s Changing Middle East Policy”, (Discussion Paper, UNISCI, No. 23, Mei, 2010), hal. 157-161.

Aktivitas lain adalah ketika Turki aktif memediasi pembahasan nuklir Iran dengan P5+1 (anggota tetap DK PBB ditambah Jerman) pada tahun 2006. Sampai tahun ini, Turki masih terus berupaya memediasi pembahasan nuklir Iran dengan negara-negara barat di mana kedua kubu relatif bisa menerima mediasi ini⁸⁶. Suksesnya mediasi Turki nampak pada dukungan terhadap pemimpin Sunni di Irak untuk mengikuti pemilihan umum, dan juga rekonsiliasi hubungan Suriah-Irak setelah Suriah melakukan serangan ke Baghdad pada 2009. Meski kasus-kasus ini mencakup wilayah yang kecil, namun keterlibatan Turki dalam isu keamanan di MERSC merupakan hal yang sangat kontradiktif dibandingkan dengan masa lalu.

2. 2. 2 Sekuritisasi Isu Palestina

Telah menjadi rahasia umum bahwa semenjak berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, mempengaruhi hubungan negara-negara Arab dengan Israel dan Amerika. Dukungan yang menurun terhadap Soviet, membuat Israel merasa jauh lebih aman di wilayah MERSC. Oslo Peace Process menjadi kesepakatan perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab, khususnya Palestina. Pada periode ini, Turki yang sebelumnya memiliki hubungan tidak baik dengan Israel meningkatkan tingkat diplomasi ke level kedutaan. Oslo Peace Process menjadi landasan asumsi bagi Turki bahwa Israel benar-benar siap untuk melaksanakan perdamaian di Timur tengah⁸⁷. Pada tahun 1997, Turki menandatangani perjanjian kerja sama militer dengan Israel tentang latihan bersama dan kunjungan mutualisme. Tidak hanya itu, hubungan Turki-Israel juga mencakup bisnis komersil seperti perdagangan dan telekomunikasi, akademis, kebudayaan, turisme, dan kerja sama teknologi. Kerja sama ini terus berlanjut hingga bidang *sharing* intelijen, pertahanan, energi dan air⁸⁸. Hubungan ini membawa kedua negara pada hubungan terdekat dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 154-157.

⁸⁷ WISE TALK 6, "Turkey-Israel Relations in the Last Period", (Wawancara dengan Ret. Ambassador Ozdem SANBERK, Wise Men Center for Strategic Studies, May, 2010), hal. 2.

⁸⁸ Ofra Bengio, "Altering Interests and Orientations between Israel and Turkey: A View from Israel", *Insight Turkey*, Vol. 11, No. 2 (2009), hal. 43-55.

Namun, hubungan khusus tersebut ternyata tidak bertahan lebih lama semenjak awal *intifada*⁸⁹ kedua berlangsung (2000). Pada 2002, Perdana Menteri Turki, Bulent Acevit, mendeskripsikan serangan Israel ke Jenin (Palestina) sebagai aksi “genosida”. Menyusul kemudian pernyataan lebih keras dari Perdana Menteri Turki yang sekarang, Recep Tayyip Erdogan di berbagai kesempatan. Asumsi kesiapan menciptakan perdamaian Israel di MERSC berdasarkan Oslo Peace Process sedikit demi sedikit terkikis disebabkan aksi sepihak Israel di lapangan⁹⁰. Kondisi tersebut menciptakan opini publik yang tidak nyaman, sehingga aktor politik domestik menggunakan isu Palestina sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Turki. Perang Libanon (2006) dan Perang Gaza (2008) menjadikan argumentasi hilangnya kepercayaan Turki terhadap Israel semakin kuat. Aktor keamanan—dalam hal ini pemegang kunci *speech act* Turki—melakukan sekuritisasi isu Palestina. Tidak hanya itu, sekuritisasi isu Palestina yang dilakukan meluas hingga masuk ke dalam forum formal seperti World Economic Forum (WEF). Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, menunjukkan kemarahan yang luar biasa saat berlangsungnya diskusi panel WEF di Davos, Swiss, 30 Januari 2009⁹¹. Erdogan berkomentar cukup pedas sesaat sebelum ia melakukan *walk out* dari forum tersebut dan mengatakan tidak akan pernah datang lagi:

“Mr. Peres, you are older than me,” “Your voice comes out in a very loud tone. And the loudness of your voice has to do with a guilty conscience. My voice, however, will not come out in the same tone.” “When it comes to killing, you know well how to kill.” “And so Davos is over for me from now on.”

Aksi Erdogan di dalam forum terbuka WEF merupakan pernyataan keras dari seorang aktor pemerintahan Turki yang menunjukkan simpati terhadap isu Palestina. Banyak pengamat menyatakan momen Davos telah membawa

⁸⁹ Gerakan perlawanan rakyat Palestina yang sering didefinisikan sebagai perlawanan menggunakan batu dan ketapel.

⁹⁰ Ofra Bengio, *loc. cit.*, hal. 3.

⁹¹ Katrin Bennhold, “Leaders of Turkey and Israel Clash at Davos Panel”, http://www.nytimes.com/2009/01/30/world/europe/30clash.html?_r=1, 29 Januari 2009, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 11.45.

hubungan Turki-Israel ke tingkat terendah semenjak berakhirnya Perang Dingin. Kondisi tersebut berkembang hingga memasuki “*the years of crisis*” periode 2009-2010. Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan periode 1990-an di mana Turki dengan Israel begitu dekat yang menciptakan kecurigaan serta kekecewaan di negara-negara Arab. Semua berbalik arah ketika memasuki awal 2000-an, dan sampai periode 2009-2010 hingga sekarang.

Kondisi paling mutakhir sampai tesis ini ditulis adalah memanasnya hubungan Turki-Israel pasca tragedi Mavi Marmara, di mana Israel membunuh 9 aktivis kemanusiaan Freedom Flotilla⁹² “*Palestine Our Route, Humanitarian Aid Our Load*” yang akan menuju Gaza. Mavi Marmara—kapal berbendera Turki yang mengangkut 577 relawan dari 748 orang dari berbagai negara⁹³ termasuk Indonesia⁹⁴—berangkat dari pelabuhan di Istanbul diperkirakan sampai pada 31 Mei. Namun, tepat pada 31 Mei 2010, pukul 04.30 Israel melakukan intersep di perairan internasional. Aksi militer Israel tersebut menghasilkan 9 orang relawan tewas tertembus timah panas⁹⁵. Sontak kekerasan Israel tersebut mendapat reaksi keras dari seluruh dunia⁹⁶, sebab laporan kejadian disampaikan secara *live* dari berbagai kantor berita internasional⁹⁷.

⁹² Freedom Flotilla adalah aksi kemanusiaan internasional dalam upaya memberikan bantuan kepada rakyat Gaza yang telah diblokade Israel semenjak 2008. Aksi ini melibatkan aktivis dari seluruh dunia yang menggunakan armada kecil kapal dan yang terbesar Mavi Marmara (mengangkut 577 penumpang), *Palestine Our Route, Humanitarian Aid Our Load*, Flotilla Campaign Summary Report, IHH, 2010.

⁹³ Total seluruh partisipan berasal dari 36 negara dengan 8 kapal. Di antara penumpang Freedom Flotilla terdapat beberapa tokoh internasional seperti Henning Mankell (penulis), Huwaida Arraf (aktivis), Mairead Corrigan-Maguire (penerima Nober Perdamaian), Hassan Ghani (jurnalis), Sandra Law, Caoime Butterly (aktivis pasivis), David Schermerhorn (produser film), Ewa Jasiewicz (jurnalis), dll. Lihat <http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/31/gaza-freedom-flotilla-activists-passengers-israel>, 31 Mei 2010, akses pada 19 Mei 2012, pkl. 13.42

⁹⁴ Relawan asal Indonesia yang ikut dalam konvoi Freedom Flotilla, kapal Mavi Marmara adalah Nur Fitri Taher, Arief Rachman, Abdillah Onim, Nur Ikhwan Abadi, Okvianto Baharudin, Ferry Nur, Muhendri Muchtar Lubis, Hardjito Warno, Muhammad Yassin, Surya Fahrizal,

⁹⁵ Nama-nama aktivis yang tewas dapat dilihat di dalam *Palmer Report*, United Nations (PBB), Human Right Council, dokumen no. A/HRC/15/21, hal. 29-30

⁹⁶ Pemerintah Indonesia sendiri dengan tegas mengutuk keras serangan Israel terhadap Mavi Marmara, menyusul terdapat 12 WNI dalam kapal relawan tersebut. Baca: *Indonesia condemns Israel's attack on Gaza aid flotilla*, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/01/indonesia-condemns-israel039s-attack-gaza-aid-flotilla.html>

⁹⁷ Di Indonesia sendiri *live report streaming* dari Al-Jazeera English dan tvOne dengan reporter Muhammad Yassin.

Tragedi Mavi Marmara memicu reaksi keras Ankara. PBB kemudian melakukan investigasi dan mengeluarkan Palmer Report yang menyatakan tindakan Israel “tidak melanggar hukum internasional” tetapi “disayangkan” karena menimbulkan korban jiwa⁹⁸. Ankara menolak laporan PBB tersebut dan mengeluarkan laporan investigasi independen yang menyatakan Israel bersalah. Israel sendiri membentuk Turkel Commission yang menyelidiki kejadian tersebut dan menyatakan bahwa Israel dibenarkan untuk melakukan tindakan penyerangan Mavi Marmara⁹⁹. Situasi sulit ini diperparah dengan penolakan Benyamin Netanyahu untuk meminta maaf kepada Turki dan hanya menyesalkan kematian para aktivis Freedom Flotilla. Netanyahu berargumen bahwa publik Israel menyatakan menolak meminta maaf atas tragedi tersebut.

Kantor Perdana Menteri Turki mengeluarkan dokumen yang tidak dipublikasikan sebelumnya, yaitu transkrip wawancara Erdogan dengan Al-Jazeera Arabic. Isinya mengenai pernyataan Erdogan mengenai kemungkinan pembenaran Turki untuk berperang dengan Israel terkait pembunuhan terhadap sembilan aktivis di perairan internasional¹⁰⁰. Sampai selesainya kasus Mavi Marmara, Turki membekukan kerjasama militer dengan Israel, termasuk latihan bersama dan industri pertahanan. Di samping itu, Turki juga melakukan Plan B setelah skenario tuntutan Turki terhadap Israel tidak berjalan, yaitu mengusir Dubes Israel untuk Turki dan menurunkan level diplomatik kedua negara¹⁰¹. Mengantisipasi kejadian serupa Mavi Marmara, Turki mengancam akan menggunakan kekuatan laut untuk mengawal kapal bantuan yang akan memasuki Gaza lewat perairan internasional¹⁰².

Sekuritisasi Turki terhadap isu Palestina semakin nampak saat sebuah harian di Libanon melaporkan, bahwa Ankara akan mensupervisi pembukaan

⁹⁸ Human Rights Council, *loc. cit.*, hal. 35-40.

⁹⁹ The Turkel Commission, *The Public Commission to examine the Maritime Incident of 31 May 2010*, (Januari, 2011).

¹⁰⁰ "The attack that took place in international waters did not comply with any international law," he said. "In fact, it was grounds for war. However, befitting Turkey's greatness, we decided to act with patience." "Turkey attempts to rally diplomatic alliance against Israel", <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/8758672/Turkey-attempts-to-rally-diplomatic-alliance-against-Israel.html>, 12 Sep 2011, akses pada 19 Mei 2012, pkl. 11.23

¹⁰¹ SETA, *loc. cit.*, hal. 63.

¹⁰² "Turkey 'to escort Gaza aid ships' amid row with Israel", <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14844902>, 8 September 2011, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 21.35.

perbatasan Gaza sebagai kompensasi normalisasi hubungan Turki-Israel¹⁰³. Dengan kata lain, Turki akan “berdamai” jika Israel membuka blokade yang dilakukan terhadap Gaza. Ketegasan Turki terhadap Israel ditunjukkan dengan tiga tuntutan—terkait isu Palestina pasca tragedi Mavi Marmara. Pertama, menuntut permintaan maaf Israel terhadap aksi militer yang telah menewaskan sembilan warga Turki dalam tragedi Mavi Marmara. Kedua, menuntut Israel memberikan kompensasi terhadap para korban. Ketiga, mengakhiri dan membuka blokade terhadap Gaza¹⁰⁴. Hingga tesis ini ditulis, tidak satupun permintaan Turki dikabulkan Israel. Turki pun tetap pada pendiriannya untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Israel sampai tuntutan tersebut terealisasi. Hal ini mempertegas sikap Turki dalam melakukan sekuritisasi terhadap isu sensitif ini.

Di samping keterlibatan dalam konvoi kemanusiaan Freedom Flotilla, Turki juga dengan terbuka mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Turki dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap proposal keanggotaan Palestina di PBB¹⁰⁵. Erdogan menyatakan bahwa keanggotaan Palestina di PBB bukanlah sebuah pilihan, tetapi keharusan¹⁰⁶. Dengan begitu, Erdogan telah membawa Turki menjadi yang terdepan dalam kampanye melawan Israel di Timur Tengah setelah pengusiran Dubes Israel dan penurunan level diplomatik pasca tragedi Mavi Marmara¹⁰⁷. Ia pun mengatakan dengan sinisme bahwa mental dan tingkah laku kekanak-kanakan pemerintahan Israel menjadi penghalang perdamaian di Timur Tengah¹⁰⁸.

Di samping memberikan dukungan secara politik, Turki secara nyata juga ikut memberikan dukungan finansial bagi Palestina. Bahkan, dukungan tersebut

¹⁰³ “Palestinians welcome Turkey involvement in Gaza, Fayyad says”, <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinians-welcome-turkey-involvement-in-gaza-fayyad-says-1.295714>, 12 Juni 2010, akses pada 19 Mei 2012, pkl. 14.17.

¹⁰⁴ SETA, *loc. cit.*, hal. 62.

¹⁰⁵ Diunduh dari <http://www.quno.org/newyork/Resources/20110818Palestine.pdf>

¹⁰⁶ <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8760984/Turkey-backs-Palestinian-statehood.html>, lihat juga <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14895673>, 13 September 2011, akses pada 19 Mei 2012, pkl. 13.21.

¹⁰⁷ www.telegraph.co.uk, *Ibid.*

¹⁰⁸ www.bbc.co.uk, *Ibid.*

pada tahun 2012 menjadi donasi terbesar Turki terhadap otoritas Palestina¹⁰⁹. Turki memang meningkatkan bantuan finansialnya terhadap beberapa negara di Asia. Sebagai negara donor OECD, Turki telah meningkatkan bantuan kemanusiaannya dari 72.96 juta dolar pada 2002 menjadi 1319.6 juta dolar pada 2011¹¹⁰.

Sebelum momen WEF di Davos dan Mavi Marmara, tanda-tanda mulai menurunnya hubungan Turki-Israel sudah mulai muncul ketika Erdogan mengutuk Israel atas serangan yang dilakukan di pantai Gaza pada 2004 terhadap sebuah keluarga¹¹¹ dan menyebut Israel sebagai “*terrorist state*”¹¹². Erdogan juga melakukan hal yang sama atas pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap pemimpin gerakan militan Hamas, Ahmad Yassin dan Abdul Aziz Rantissi¹¹³. Setelah serangan Israel ke Mavi Marmara, Erdogan kembali menegaskan bahwa Israel adalah ancaman perdamaian di Timur Tengah¹¹⁴. Untuk melawan Israel di ranah legal, Turki membuka arsip lama terkait legitimasi Ottoman terhadap tanah Palestina. Turki juga menjalin kontak dengan pemerintahan Hamas di Gaza dan mengakuinya memiliki otoritas semenjak 2006. Secara resmi, Turki mengundang pemimpin Hamas yang berbasis di Damaskus, Khaled Mishal, untuk datang ke Ankara pada 2006¹¹⁵.

Ketegangan Turki dengan Israel cukup mempengaruhi peta geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya Levant *subcomplex* (Mesir, Israel, Suriah, Libanon, Jordan). Saat ini, untuk pertama kalinya semenjak 1948 tiga negara

¹⁰⁹ Arie O’Sullivan, “Turkey ups Palestinian aid in quest for influence”, <http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=268091>, 30 April 2012, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 16.08.

¹¹⁰ Untuk data Turkish Official Development Assistance dapat dilihat di http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ODA_DONOR#

¹¹¹ Tujuh orang tewas, termasuk tiga anak-anak. Bisa dilihat di sini: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5065008.stm, 9 Juni 2006, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 16.02.

¹¹² Chris McGreal, “Turkish PM accuses Israel of practising state terrorism”, <http://www.guardian.co.uk/world/2004/jun/04/turkey.israel>, 4 Juni 2010, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 13.54.

¹¹³ Kedua pemimpin tertinggi Hamas terbunuh dalam operasi militer Israel di Gaza pada Maret dan April 2004

¹¹⁴ “Turkish PM: Israel is the main threat to Mideast peace”, <http://www.haaretz.com/news/turkish-pm-israel-is-the-main-threat-to-mideast-peace-1.901>, 7 April 2010, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 14.54.

¹¹⁵ Transatlantic Academy, *Getting to Zero: Turkey, Its Neighbours and the West*, Policy Report, (2010), hal. 14.

besar, Turki, Mesir dan Iran tidak melakukan aliansi dengan Israel. Jelas hal ini mengubah peta hubungan politik di kawasan. Kondisi ini ditambah dengan fenomena Arab Spring¹¹⁶ yang menjalar hampir seluruh negara di kawasan tersebut. Sehingga, pemutusan kerja sama antara Turki dengan Israel ikut memicu ketegangan yang lebih luas¹¹⁷.

Aktivisme Erdogan di Timur Tengah telah menjadikan Turki sebagai “pemimpin” isu populis isu Palestina. Erdogan pun muncul sebagai pengkritik keras Israel selain Ahmadinejad¹¹⁸. Dan, ia pun dielu-elukan sebagai “pahlawan” bagi Palestina khususnya, dan dunia Arab umumnya disebabkan keberaniannya mengkritik Israel secara terbuka¹¹⁹. Akrobatik politik Erdogan dari mulai di Davos, tragedi Mavi Marmara, dan dukungan penuh terhadap proposal keanggotaan Palestina di PBB semakin memperkuat posisi Turki yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak pengamat mengatakan Turki sedang mencari simpati Timur Tengah dan ingin menjadi kekuatan berpengaruh di kawasan dengan mengubah pola *enmity* dan *amity*—dalam hal ini isu Palestina. Terlepas dari itu semua, Turki sedang bergeliat menjadi pembela keras Palestina seperti yang dikatakan Erdogan¹²⁰:

"Turkey will continue to stand by the Palestinians, who have been suffering injustice for years now..."

Simpati masyarakat Arab terhadap Erdogan semakin meningkat seiring revolusi yang terjadi di Timur Tengah. TESEV (Turkish Economic and Social Studies Foundation) merilis hasil survei yang menunjukkan 75% responden Arab mengatakan Turki adalah model nyata yang sukses menyatukan antara Islam dan

¹¹⁶ Arab Spring adalah sebutan untuk revolusi yang terjadi di dunia Arab yang diinisiasi dari revolusi mawar di Tunisia, berlanjut ke Revolusi 25 Januari di Mesir, dsb.

¹¹⁷ Ifri Dorothee SCHMID, “Europe confronting the degradation of Turkish-Israeli relations: Is there room for arbitration?” Final Draft, Israel European Policy Network, (May, 2011).

¹¹⁸ www.telegraph.co.uk, *loc. cit.*

¹¹⁹ Daniel Steinvorth, “A Turkey-Israel Clash at Davos: Erdogan's Feeling for Rage”, <http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,604650,00.html>, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 11.20.

¹²⁰ “Erdogan calls on Israelis to oppose Gaza 'massacre'”, www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=261722, 13 Maret 2012, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 15.05.

demokrasi dan menginginkan peran yang lebih di kawasan¹²¹. Keterlibatan Turki di MERSC sangatlah penting dan membawa perubahan fundamental persepsi Turki terhadap kawasan tersebut. Di saat para pemimpin Arab reaktif terhadap berbagai permasalahan keamanan di kawasan, seperti isu Palestina, nuklir Iran, Arab Spring, dsb, Turki justru proaktif dan menjadi populer karena hal itu. Dan, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Turki, Turki dianggap berhasil menjembatani relasi antara Barat dan Timur¹²². Hal ini sangat menguntungkan Turki sebagai salah satu kekuatan yang terus tumbuh.

2. 2. 3 Desekuritisasi Isu Utama Turki (Kurdi dan Islamisme)

Kebijakan paling signifikan yang nampak pada periode 2002 hingga 2011 adalah intensitas hubungan antara Turki dengan negara-negara perbatasan di MERSC, seperti Iran, Irak, dan Suriah. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Turki memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan negara-negara tersebut terkait isu keamanan domestik Turki. Isu keamanan domestik Turki muncul akibat proses politisasi aktor keamanan terhadap potensi ancaman negara seperti ideologi (sering diasosiasikan segala ideologi yang mengancam sekulerisme Kemalist, seperti Islamisme) dan separatisme (suku minoritas Kurdi). Kedua isu tersebut merupakan permasalahan utama yang terus membayangi stabilitas internal Turki¹²³. Isu-isu tersebut membawa Turki pada proses sekuritisasi yang kemudian berkembang menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Turki terhadap negara-negara Iran, Irak dan Suriah.

Dengan dinamika politik domestik Turki di mana terjadi demokratisasi, interdependensi ekonomi tingkat regional, dan peningkatan peran di level global Turki melakukan proses desekuritisasi terhadap kedua isu tersebut. Desekuritisasi merupakan sebuah proses perluasan batas normal dari politisasi. Dengan kata lain, menjadikan berbagai isu keamanan yang berpotensi disekuritisasi menjadi hal

¹²¹ “Arab World Favors Turkey, Sees as Model, Study Reveal”, <http://www.todayzaman.com/news-210462-arab-world-favors-turkey-sees-as-model-study-reveals.html>, 18 Mei 2010, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 11.22.

¹²² James M. Dorsey, “Change in the Middle East Puts Turkey in the Eye of the Storm”, *Turkish Policy Quarterly*, Vol. 9, No. 4 (2011), hal. 41-53.

¹²³ Bülent Aras dan Rabia Karakaya Polat, “From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey's Relations with Syria and Iran”, *Security Dialogue*, Vol. 39, No. 5 (Oktober, 2008), 495-515, hal. 496.

yang normal dan tidak dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi negara. Jika sekuritisasi disimbolisasi dengan *speech act*, maka desekuritisasi adalah pengurangan *speech act* atau bahkan ketiadaan *speech act* itu sendiri. Sebagai contoh, aktor keamanan melakukan dialog dan diplomasi “persahabatan” dengan saling kunjung antar pejabat negara.

Suku Kurdi yang berada di daerah selatan memiliki jaringan hingga negara tetangga, seperti Iran, Irak dan Suriah. Di negara-negara tersebut, pemberontak Kurdi diklaim mendapatkan sokongan suplai senjata secara ilegal dan *training* militer. Selain permasalahan etnis minoritas Kurdi, revolusi Islam Iran sangat dikhawatirkan memicu gerakan Islamisme baru di Turki yang akan mengganggu stabilitas sekulerisme Attaturk¹²⁴. Kedua permasalahan utama bagi Turki tersebut dikhawatirkan mengimpor gangguan keamanan. Cara pandang ini pada akhirnya menyebabkan hubungan Turki dengan Iran, Irak dan Suriah tidak baik dan sering memanas. Rezim Kemalist Turki mempertahankan sudut pandang ini untuk mempertahankan eksistensinya.

Akan tetapi, semenjak AKP berkuasa, ada perubahan cara pandang terhadap kedua permasalahan keamanan tadi. Turki relatif lebih lunak terhadap Iran dan Suriah, terutama ketika kedua negara sedang berada dalam tekanan dan perhatian komunitas internasional. Para akademisi sepakat bahwa perubahan kebijakan Turki terhadap Iran dan Suriah dilatarbelakangi kehadiran AKP di pemerintahan berkuasa, krisis Irak yang tak kunjung usai, dan kekhawatiran pemisahan Irak Kurdistan di utara menjadi negara sendiri¹²⁵. Turki pun menyambut baik proses demokratisasi Irak pasca kejatuhan rezim Saddam Hussein dan membangun hubungan baik dengan Republik Irak Kurdistan untuk mengurangi pengaruhnya terhadap suku Kurdi di Turki.

Erdogan selaku Perdana Menteri Turki mengatakan bahwa selama ini ada pendekatan negara yang salah dalam menyikapi suku Kurdi. Hal ini memberikan sinyal perubahan cara pandang negara dalam menghadapi isu separatisme Kurdi yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Turki pra-AKP. Turki

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 497.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 496.

perlahan mulai melakukan desekuritisasi terhadap isu Kurdi. Pernyataan Erdogan ini sejalan dengan karakter yang dikembangkan Turki pada periode AKP yaitu mengembangkan proses dialog, pendekatan kultural, dan stabilitas keamanan. Paket reformasi yang dijalankan pemerintahan Turki tidak akan terlepas dari pengaruh proposal keanggotaan Turki ke EU. Desekuritisasi ini terindikasikan sebagai bentuk penerimaan penuh Turki sebagai nilai-nilai EU di Turki.

Untuk lebih jelas bagaimana Turki melakukan desekuritisasi terhadap Iran, Irak, dan Suriah berikut di bawah ini akan dipaparkan secara singkat proses-proses tersebut.

Desekuritisasi Iran

Selama ini, kecurigaan aktor keamanan Turki (militer dan politikus) terhadap gerakan keislaman tidak hanya berada pada level domestik, tetapi juga regional. Para aktor keamanan tersebut sangat menaruh perhatian terhadap Iran yang dianggap potensial mengeksport gerakan Revolusi Islam ke Turki dengan segala maksud, termasuk mendukung secara ilegal kelompok Islam di Turki¹²⁶. Dalam kaca mata keamanan rezim militer Turki, Revolusi Islam Iran yang membawa nilai-nilai agama ke ranah politik dan negara mengancam eksistensi sekulerisme Kemalist¹²⁷. Sebab itu, Turki menghadapi problematika keamanan dengan Iran. Bagi rezim militeristik Turki pra-AKP, sekuritisasi isu revivalisme Islam di tingkat domestik dan eksternal sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Di samping itu, aktivitas suku Kurdi di Iran bagian utara PJAK (Party of Free Life of Kurdistan) diklaim berhubungan dengan aktivitas suku Kurdi yang ada di Turki (PKK)¹²⁸.

Namun, perlahan persepsi tersebut mulai diperlunak dengan desekuritisasi elit Turki terhadap Iran. Sebagai contoh, keberpihakan Turki pada Iran dalam isu nuklir terbukti saat Erdogan mengunjungi Teheran pada 2009 untuk membahas hubungan kerja sama kedua belah negara, termasuk memberikan pernyataan

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 505.

¹²⁷ Bülent Aras, "Turkish Foreign Policy Toward Iran: Ideology and Foreign Policy in Flux", *Journal of Third World Studies* 18 (1), 105–124, hal. 108.

¹²⁸ SETA, *loc. cit.*, hal. 61.

dukungan terhadap program nuklir Iran¹²⁹. Dovutoglu, saat bertemu sekretaris Supreme National Security Council (SNSC) Iran, Saeed Jalili, menegaskan dukungan terhadap program damai nuklir Iran dan menyatakan akan mengonsolidasi hubungan baik dengan Iran¹³⁰. Hal makin ini dipertegas dengan pernyataan presiden Turki, Abdullah Gull, yang akan meningkatkan hubungan bilateral dengan Iran di bidang ekonomi, keamanan, dan politik. Keberpihakan Turki semakin nyata saat Turki menolak sanksi tambahan untuk Iran pada Maret 2010 dan pada Juni 2010, Turki menolak *voting* untuk sanksi¹³¹. Erdogan mengkritik negara pemilik atau pengembang nuklir tapi menolak Iran memilikinya dengan sebutan arogan. *“If you don't want Iran to have nukes, give yours up!”*¹³²

Meski pada tahun sebelumnya (2010), hubungan Turki-Iran meningkat dengan pernyataan politis masing-masing, namun pada 2011 agenda regional kedua negara terlihat cukup berseberangan dalam kasus Arab Spring. Turki yang sedang membangun keterlibatan lebih dalam dengan negara-negara MERSC yang sedang berevolusi, mencoba memberikan pengaruh dengan pernyataan-pernyataan politis. Ini direalisasikan oleh Erdogan ketika melakukan kunjungan ke Mesir, Tunisia, dan Libya. Seperti ketika melakukan kunjungan ke Mesir dan menyarankan agar Mesir mengadopsi sekulerisme Turki yang membuat penolakan di publik Iran. Kekecewaan Ankara bertambah ketika Turki mendukung oposisi yang sedang melakukan perlawanan terhadap rezim Suriah¹³³. Iran menyatakan dukungan Turki terhadap kelompok oposisi pemerintahan di Suriah sebagai perpanjangan Barat dan memicu kecurigaan yang lebih besar di dalam negeri Iran.

¹²⁹ “Turkey disengages from Iran”,

http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=279020, 30 April 2012, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 12.45.

¹³⁰ “Turkey backs NATO & global missile defence, Iran opposes both”,

<http://www.rt.com/news/turkey-iran-velayati-government-042/>, 14 April 2012, akses pada 21 Mei 2012, pkl. 11.50.

¹³¹ “The New York Times, As Nuclear Talks Near, Iran Softens Criticism of Turkey”,

http://www.nytimes.com/2012/04/07/world/middleeast/iran-softens-criticism-of-turkey-as-nuclear-talks-approach.html?_r=1, 6 April 2012, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 13.44.

¹³² “Turkey PM: If you don't want Iran to have nukes, give yours up”,

<http://www.haaretz.com/news/turkey-pm-if-you-don-t-want-iran-to-have-nukes-give-yours-up-1.5055>, 31 Oktober 2009, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 22.05.

¹³³ “Iran and Turkey open rift over Syria”, <http://www.guardian.co.uk/world/iran-blog/2012/apr/05/iran-turkey-rift-syria>, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 17.30.

Kecurigaan ini juga muncul sebagai tanggapan atas peran regional Turki yang semakin signifikan¹³⁴. Iran dengan tegas memberikan dukungan moral terhadap rezim berkuasa di Suriah saat ini dan membela di dunia internasional, termasuk harus berseberangan dengan Turki. Kondisi ini menciptakan kecurigaan di kedua negara dan memicu selisih paham yang lebih besar. Namun, meski demikian kerja sama di bidang ekonomi tetap berjalan¹³⁵.

Tabel 3. Kronologi hubungan Turki-Iran pada 2011¹³⁶.

Kronologi 2011	Hubungan Turki-Iran
13-15 Februari	Presiden Abdullah Gul mengunjungi Iran bertemu Ahmadinejad.
5 September	Keputusan Turki untuk mengizinkan pembangunan anti-misil NATO di Turki mengecewakan Iran. Pernyataan politik dari Teheran seharusnya negeri Muslim tidak melayani kepentingan Barat.
19 September	Pemerintahan Iran menyatakan Turki melakukan aksi provokasi dalam isu Suriah.
21 September	Garda Nasional Iran menyatakan telah membersihkan perbatasan sebelah barat daya (perbatasan dengan Turki) dari militan Kurdi.
26 November	Iran menyatakan ancaman datang pertama kali dari instalasi anti-misil NATO di Turki dan akan menyerang lokasi tersebut jika diancam dengan aksi militer.

Bagi Turki era Erdogan, kerja sama dengan Iran dan Suriah adalah elemen penting untuk menjaga stabilitas regional. Ketiganya sepakat untuk mengantisipasi gerakan separatis Kurdi yang berada di masing-masing negara. Hubungan ketiganya makin erat setelah AS keluar dari Irak dan menjadikan Israel

¹³⁴ "Iranian Suspicion Grows Over Turkey's Regional Role", <http://www.reuters.com/article/2012/04/03/us-iran-turkey-criticism-idUSBRE83207E20120403>, 3 April 2012, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 17.45.

¹³⁵ Today's Zaman, *loc. cit.*

¹³⁶ SETA, *loc. cit.*, hal. 60.

sebagai potensi ancaman di kawasan¹³⁷. Namun, saat ini hubungan ketiganya sedang memanas terkait proses revolusi di dunia Arab (MERSC). Analisis internasional menyebut hubungan Turki-Iran dengan “*Turkish-Iranian relations are defined by a contradictory duet of competition and cooperation.*”¹³⁸ Kerja sama, sebab kedua negara memiliki interdependensi ekonomi yang cukup besar. Sedangkan kompetisi, sebab keduanya mencoba memiliki pengaruh yang besar di kawasan. Kebangkitan Turki di bawah periode AKP disinyalir mencoba *balancing* pengaruh Iran, terutama pamor *power* di kawasan¹³⁹.

Desekuritisasi Irak

Setelah lama tidak menjalin hubungan dengan Irak, periode AKP Turki mulai membangun kembali hubungan tersebut. Di tahun 1990-91 saat Gulf War, Turki berada di pihak Barat dengan ikut memutuskan semua perjanjian perdagangan dan energi dengan Irak. Turki juga cukup intens melakukan aktivitas militer ke Utara Irak untuk melumpuhkan PKK. Pasca kejatuhan Saddam Hussein pada 2003, kondisi Irak tidak stabil dan menimbulkan potensi gangguan keamanan bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk Turki. Permasalahan utama Turki dengan kondisi tersebut adalah meluasnya dan meningkatnya aktivitas suku Kurdi di sebelah utara Irak, yang tergabung dalam Kurdish Regional Government (KRG), yang dicurigai membantu aktivitas terorisme PKK di Turki¹⁴⁰.

Pada Maret 2010, Irak mengadakan pemilu demokratis di mana terpilih Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang dianggap mewakili seluruh kelompok yang ada di Irak. Turki menyambut baik hal ini dan mengharapkan pemerintahan bersatu di Irak segera stabil dan melanjutkan pembangunan. Isu keamanan dalam hubungan Turki-Irak menjadi prioritas utama selain ekonomi. Kerja sama terkait

¹³⁷ Efraim Inbar, “Turkey’s Changing Foreign Policy and Its International Ramification”, E-Notes, *Foreign Policy Research Institute*, (February, 2011), hal. 1.

¹³⁸ “In Balancing Act, Turkey Hosts Iranian Nuclear Talks”, <http://www.npr.org/2012/04/13/150571682/in-balancing-act-turkey-hosts-iranian-nuclear-talks>, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 14.27.

¹³⁹ Birol Baskan, “Can Turkey balance Iran?” <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/05/2012523123533559964.html>, 2 Juni 2012, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 15.37.

¹⁴⁰ SETA, *loc. cit.*, hal. 58-59.

keamanan semakin meningkat pada 2011. Peningkatan ini terlihat pada intensitas kunjungan aktor keamanan kedua negara.

Tabel 4. Kronologi hubungan Turki-Irak pada 2011¹⁴¹.

Kronologi 2011	Hubungan Turki-Irak
16 Januari	PM Turki mengunjungi Irak pertama kali pada pemerintahan yang baru terbentuk
3-6 Mei	Presiden Irak, Adil Abdulmehdi mengunjungi Turki dan bertemu dengan Presiden Abdullah Gul dan Menteri Luar Negeri Ahmet Dovutoglu.
6 Juni	Perusahaan minyak Turki menandatangani perjanjian kerja sama eksplorasi minyak bumi di Siba dan Mansuriye dengan Menteri Perminyakan Irak.
20 Oktober	Wakil pemimpin Partai Demokratik Kurdistan Irak, Nercirvan Barzani, mengunjungi Turki selepas serangan di Hakkari, Turki, dan membicarakan masa depan kerja sama.
2-5 November	Pemimpin regional Kurdistan Irak, Mesud Barzani, mengunjungi Turki.

Selain permasalahan keamanan, hubungan Turki-Irak di bidang ekonomi juga meningkat pesat. Volume perdagangan kedua negara sejumlah \$7.3 (billion) pada 2010. Turki juga berencana membuka pipa dan kerja sama dalam hal minyak dengan Irak Utara¹⁴². Pembukaan ini sebagai sarana distribusi sumber energi baru bagi Turki sekaligus meningkatkan kerja sama yang erat dengan negara perbatasan. Permasalahan Turki dengan Irak relatif tidak terlalu besar, kecuali untuk kasus suku Kurdi. Meski demikian, melunaknya Turki terhadap isu tersebut menjadikan Irak tidak lagi jadi ancaman langsung bagi Turki. Sekarang, justru Turki memanfaatkan kembali Irak sebagai sumber energi minyak.

¹⁴¹ *Ibid.*, hal 59.

¹⁴² “Turkey Drawn Into Iraq, Iran Oil Dispute”, <http://www.npr.org/2012/06/05/154377277/turkey-drawn-into-iraq-iran-oil-dispute>, 5 Juni 2012, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 15.56.

Desekuritisasi Suriah

Hubungan Turki dengan Suriah mencapai taraf keberhasilan paling gemilang bagi Turki dengan prinsipnya “*zero problem with neighbours*”¹⁴³. Di awal tahun 2011, hubungan keduanya mencapai puncak persahabatan dan desekuritisasi berbagai isu yang selama ini menghantui hubungan Turki-Suriah. Sebelum ini, Suriah merupakan ancaman paling nyata bagi Turki sebab Suriah mengklaim wilayah Hatay sebagai miliknya, menolak kebijakan air sungai Eufrat, dan dukungan Suriah terhadap PKK. Konflik Turki dengan Suriah sempat memuncak pada era 1990-an ketika Turki memobilisasi militer menuju perbatasan dengan Suriah pada Oktober 1998 untuk meminta penangkapan Abdullah Ocalan, pemimpin PKK yang berada di Suriah. Kedekatan Turki dengan Israel di periode 1990-an juga dikarenakan konfrontasi langsung terhadap Suriah. Namun kemudian, kondisi tersebut sangat berubah ketika memasuki awal 2000-an. Kunjungan bilateral yang intens dan berbagai proyek kerja sama disepakati menjadi tanda perbaikan hubungan selama dua dekade terakhir. Tahun 2000, presiden Turki Necdet Sezer mendatangi pemakaman presiden Suriah, Hafez Assad. Pada tahun 2004, presiden Suriah, Bashar Assad, melakukan kunjungan historis ke Turki. Turki menolak diplomasi isolasi yang dilakukan AS dan EU terhadap Suriah, menandatangani perjanjian bebas visa, dan membentuk komite strategis untuk perdagangan kedua negara¹⁴⁴.

Semenjak Maret 2011 hubungan keduanya mulai turun setelah rakyat Suriah menyatakan perlawanan terhadap rezim Assad dan menjadi bagian dari Arab Spring. Rezim Assad melakukan pembunuhan terhadap rakyat Suriah dan menciptakan banjir pengungsi ke Turki. Selama awal-awal terjadinya demonstrasi massif di Suriah, Turki mencoba menggunakan kekuatan diplomasi meminta Assad untuk segera melakukan reformasi. Erdogan dan Davutoglu telah melakukan banyak pertemuan dan kontak telepon dengan Assad semenjak demonstrasi berlangsung. Ini menunjukkan niatan Turki untuk terlibat lebih jauh

¹⁴³ SETA, *loc. cit.*, hal. 64.

¹⁴⁴ Alain Gresh, “Turkish-Israeli-Syrian Relations and Their Impact on the Middle East”, *Middle East Journal*, Vol. 52, No. 2 (Spring 1998), hal. 7.

dalam proses perdamaian di Suriah dan meningkatkan pamor di kawasan. Namun, Assad tak bergeming.

Turki mendukung oposisi Suriah dan menyatakan bahwa rezim Bashar Assad telah melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri. Erdogan dengan tegas membandingkan Assad seperti Hitler¹⁴⁵. Kepentingan Turki tidak hanya terkait stabilitas kawasan, tetapi juga isu pengungsi yang membanjiri Turki selatan, seperti Hatay. Turki sangat *concern* terhadap isu pengungsi dan melakukan sekuritisasi terhadap isu ini¹⁴⁶. Sebab itu, Turki tidak ambil diam dalam kasus Suriah. Desekuritisasi isu suku Kurdi tidak menjamin perbaikan hubungan kedua negara terulang. Pada faktanya, Turki sangat perhatian terhadap isu revolusi Suriah di mana terjadi perang sipil melawan militer yang tidak seimbang. Turki mengatakan dengan tegas tidak akan lagi mendukung Suriah di PBB jika tidak menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan segera melakukan rekonsiliasi¹⁴⁷.

Tabel 5. Kronologi hubungan Turki-Suriah pada 2011¹⁴⁸.

Kronologi 2011	Hubungan Turki-Suriah
6 Februari	Erdogan mengunjungi Suriah untuk menghadiri seremonial pembukaan bendungan persahabatan Turki-Suriah.
27 April	Erdogan mengundang Assad untuk yang ketiga kalinya semenjak protes anti rezim Bashar Assad berlangsung pada 17 Maret.
29 April	Gelombang pengungsi pertama Suriah memasuki Turki. Kamp pengungsi berada di Hatay, Turki.

¹⁴⁵ “Turkey PM compares Syria’s Assad to Hitler”, <http://www.euronews.com/2011/11/22/turkey-pm-compares-syria-s-assad-to-hitler>, 22 November 2011, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 15.55.

¹⁴⁶ Mengapa Turki sangat concern terhadap migrasi, termasuk pengungsi, dapat dilihat dalam artikel Kristen Biehl, “Migration ‘Securitization’ and Its Everyday Implications: an Examination of Turkish Asylum Policy and Practice”, (best participation essay, CARIM – IV Summer School on Euro-Mediterranean Migration and Development, European University Institute and European Union, 2008).

¹⁴⁷ “Turkey says will no longer support Syria in the UN”, <http://www.euronews.com/2011/06/10/turkey-says-will-no-longer-support-syria-in-the-un>, 10 Juni 2011, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 16.34.

¹⁴⁸ SETA, *loc. cit.*, hal. 65.

16-17 Juli	Pemerintahan alternatif (sementara) untuk menggantikan rezim Assad dibentuk di Istanbul, Turki, dengan dihadiri 400 pemimpin oposisi Suriah.
15 September	Setelah mengadakan pertemuan beberapa kali di Antalya, Brussels dan Istanbul, oposisi Suriah mendeklarasikan Dewan Nasional Suriah di Istanbul.
27 Oktober	Liga Arab memberikan sanksi ekonomi kepada Suriah dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh Davutoglu. Bashar Assad, Presiden Suriah, bereaksi atas tekanan Turki terhadap Suriah dengan menyatakan <i>“Turkey wants to revive new-Ottomanism, but it is impossible.”</i>
30 November	Davutoglu menyatakan Turki akan membekukan kerja sama strategis dengan pemerintahan Assad dan memberikan beberapa sanksi.

Turki sangat menaruh perhatian terhadap stabilitas Suriah dikarenakan kepentingan ekonominya sangat besar. Jika Turki dapat memberikan pengaruh perubahan ke Suriah agar mengadopsi demokrasi dan nilai-nilai yang lebih plural, ini akan menguntungkan Turki dan pemerintahan yang menggantikan.

Terlibatnya Turki secara aktif dalam berbagai kejadian di Timur Tengah menandai aktivisme Turki yang meningkat semenjak AKP berkuasa. Dinamika kebijakan luar negeri Turki semenjak Perang Dingin berakhir sampai sekarang memberikan sedikit gambaran perubahan orientasi dari Barat ke Timur. Tidak hanya itu saja, Turki lebih jauh berperan dalam memperluas pengaruhnya di Timur Tengah pasca kejenuhan proposal keanggotaan Uni Eropa. Turki nampak tidak seambisi dulu dalam bernegosiasi dengan Uni Eropa—meskipun tetap melanjutkan upaya integrasi ke sana. Desekuritisasi Turki terhadap isu revivalisme Islam dan suku Kurdi juga ikut memperkuat pengaruh Turki di kawasan, terutama dengan Suriah, Iran dan Irak. Hal ini ditambah dengan kekuatan ekonomi baru Turki yang melesat tajam satu dekade terakhir. Ini menandakan kondisi Turki yang tidak biasanya.

BAB 3

SIGNIFIKANSI PERKEMBANGAN TURKI: KAPASITAS DAN *STATUS OF THE STATE* DI REGIONAL

“From Kars (Turkey) to Morocco and Mauritania, from Sinop (Turkey) to Sudan, from the Istanbul Straits to the Gulf of Aden, Turkish and Arab geographies own the most strategic belt of the world. We want to turn it into a security and economic integration belt. The foreign policy we carry out under the leadership of PM Recep Tayyip Erdogan in fact seeks to turn this whole basin into a single basin.” (Davutoglu, Hurriyet, June 11, 2010)

3.1 *Three-Tier Scheme of Power*

Pembahasan mengenai level analisa regional, terutama bagaimana membedakan antara level regional dengan level lokal dan global, telah menjadi perdebatan dan polemik tersendiri di kalangan regionalis dan kajian keamanan¹⁴⁹. Membedakan level analisa regional dengan global bukanlah hal mudah. Bagian termudahnya adalah menspesifikasi batas (*boundary*). Namun, polemik kembali muncul ketika membahas struktur *power* yang ada seperti *superpower*, *great-middle-small power*, atau *regional power* dan tipologi lainnya sebagai bentuk analisa. Meski demikian, di tengah debat yang kompleks dan mendalam mengenai hal ini, Buzan dan Wæver mencoba memberikan tipologinya sendiri yang berfokus pada inter-relasi di antara polaritas dan keamanan regional¹⁵⁰.

Untuk memperjelas aplikasi gagasan mengenai polaritas sebagai definisi dari level sistem, dibutuhkan konsep tunggal *great power* yang teridentifikasi. Namun, klasifikasi aktor sebagai *great power* bukanlah pengukuran yang mudah. Hal tersebut membutuhkan kombinasi kapabilitas material (militer dan ekonomi), pengakuan formal dari aktor lainnya terhadap status, dan—yang paling penting menurut sudut pandang Buzan dan Wæver—observasi terhadap tingkah laku negara, khususnya pendapat atau tindakan dari aktor-aktor yang didengar oleh

¹⁴⁹ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 27.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 27-34.

negara lain dengan penuh perhitungan¹⁵¹. Selain itu, *great power* mempunyai tabiat gemar melakukan sekuritisasi sepanjang berhubungan dengan kepentingan dirinya sendiri. Ide mengenai konsep tunggal *great power* memiliki akar yang panjang. Ide ini berkembang dari penggunaan teori klasik sistem regional Westphalia menuju aplikasi sistem internasional skala global saat ini.

Tipologi yang diberikan Buzan dan Wæver berbentuk spektrum *power* yang terdiri dari tiga skema (*three-tier*) *power*, yaitu *superpower* dan *great power* pada level sistem, dan *regional power* pada level regional. *Superpower* menempati satu sudut spektrum besar, sedangkan *regional power* di sudut yang lain. Di antaranya kedua sudut spektrum terdapat *great powers*, disebabkan *great power* berperan lebih dibandingkan *regional power*, tetapi tidak cukup terkualifikasi untuk menjadi *superpower*¹⁵². Dengan tipologi ini Buzan dan Wæver menjelaskan siapa saja yang berada atau menjadi aktor dalam RSCT. Di samping itu, Buzan dan Wæver juga menjelaskan komponen yang ada dalam RSCT, yaitu RSC, *insulator*, dan *global power*. RSC adalah batas atau level analisa regional, *insulator* adalah batas kawasan spasial yang memisahkan satu RSC dengan RSC lainnya, dan *global power* adalah unsur eksternal yang mempengaruhi dinamika dalam RSC.

Superpower adalah aktor dengan kemampuan menggelar kapabilitas militer, politik, ekonomi pada tingkat global (jauh di luar wilayah kedaulatannya). Kebiikakan dan aplikasinya mencapai ke tempat terjauh di mana tidak ada lagi y⁵⁷ dapat menggapainya, memberikan pengaruh atau menentukan proses sekuritisasi dan desekuritisasi di hampir semua sektor dan wilayah dalam sistem internasional¹⁵³. *Great powers* adalah aktor-aktor yang memiliki kapasitas yang hampir sama, namun dengan kapabilitas yang berbeda. *Great powers* memiliki potensi untuk menjadi *superpower*, oleh karena itu unsur-unsur yang dimiliki oleh *superpower* juga dimiliki oleh *great powers*, namun dengan ukuran yang berbeda. *Great power* juga membutuhkan perhitungan dari aktor lain, “*treated in the calculations of the other major powers as if it has the clear economic, military,*

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁵² *Ibid.*, hal. 34.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 34-35.

and political potential to bid for superpower status in the short or medium term.¹⁵⁴” Superpower dan great power menentukan polaritas global. Yang terakhir atau *third-tier power* menurut Buzan dan Wæver adalah *regional powers*. *Regional powers* adalah aktor-aktor dengan kapasitas dan kapabilitas besar pada level regional, tetapi tidak cukup (terbatas) untuk mencapai level global. Di dalam regional (kawasan), *regional powers* menentukan polaritas.

Tabel 6. Tipologi *power* menurut Buzan dan Wæver¹⁵⁵.

Regional Power (3 rd -tier)	Great Power (2 nd -tier)	Super Power (1 st -tier)
Regional Level	Global Level	
Memiliki kapasitas dan kapabilitas tingkat regional, tetapi tidak sanggup keluar dari RSC-nya (global). Menentukan polaritas kawasan.	Memiliki kapasitas dan kapabilitas level global, namun dengan kemampuan terbatas dan tidak menyentuh seluruh sektor di seluruh kawasan. Mempengaruhi polaritas global.	Memiliki kapabilitas global (sistem internasional) tak terbatas dalam pengerahan kekuatan militer dan ekonomi. Menentukan polaritas global.
Tidak terlalu diperhitungkan (diterima) dalam level yang lebih tinggi, meski mengklaim dirinya sebagai <i>major power</i> di kawasan atau tidak.	Melihat dirinya sendiri memiliki peran lebih dibandingkan <i>regional power</i> , prospek menjadi <i>superpower</i> , dan dapat beroperasi di lebih dari satu kawasan.	Melihat dirinya sendiri dan diterima (diakui) oleh negara lain memiliki kapabilitas tersebut.
Level <i>regional power</i> akan didapat jika pengaruh dan kapabilitasnya relevan dengan proses sekuritisasi.	Aktif dalam sekuritisasi dan desekuritisasi, namun dengan kapasitas terbatas. Baik isu keamanan yang ada, maupun jangkauan yang dapat diraih.	Sangat aktif (menjadi <i>player</i>) dalam sekuritisasi dan desekuritisasi di semua (atau hampir semua) kawasan dalam sistem, baik sebagai ancaman, penjaga, aliansi, atau <i>intervener</i> .

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 34-37.

<p>Hanya akan dianggap jika keberadaannya mempengaruhi rivalitas level global <i>balance of power</i>, seperti dapat memicu konfrontasi antar <i>superpower</i>.</p>	<p>Dengan kapasitas dan kapabilitasnya, <i>great power</i> diperhitungkan oleh <i>major power</i> selama kapasitas dan kapabilitas dalam militer, ekonomi, dan politik berpotensi menjadi <i>superpower</i>.</p>	<p>Dapat memaksakan nilai-nilai (<i>values</i>) universal untuk mengendalikan system. Legitimasi sebagai <i>super power</i> tergantung dari sejauh mana menanamkan <i>values</i>. Keberadaannya diterima kebanyakan negara dalam sistem internasional.</p>
--	--	--

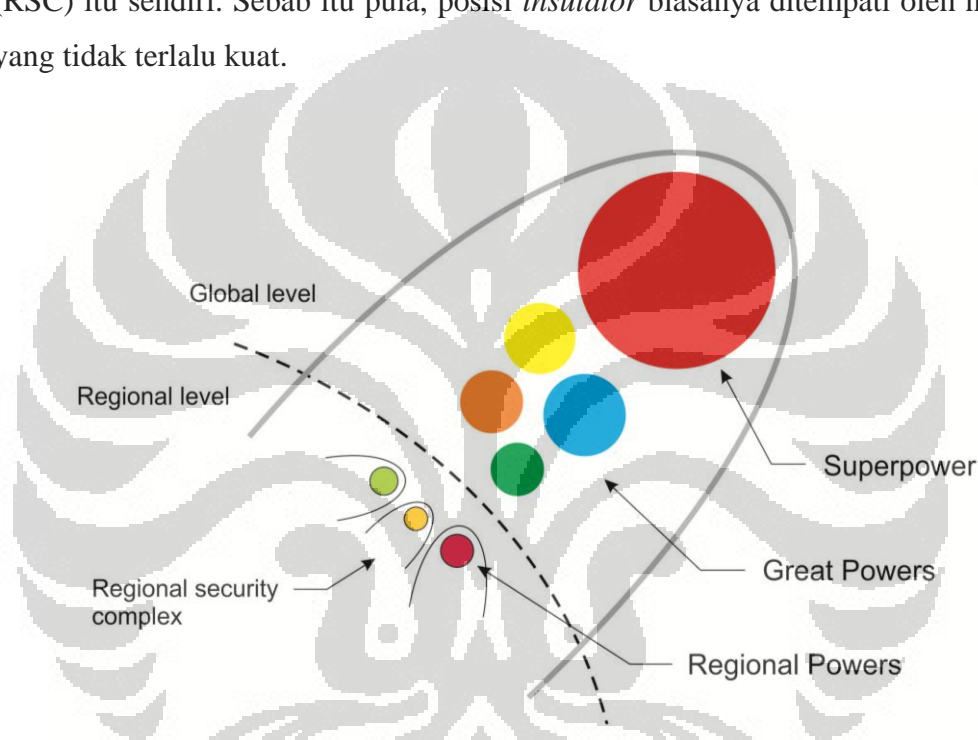
Menurut Buzan dan Wæver, saat ini hanya ada satu *superpower* di dunia yaitu Amerika Serikat. Sedangkan *great powers* dipegang oleh empat besar, yaitu Rusia, China, Jepang dan EU (Inggris/Perancis/Jerman). Pola internasional seperti ini adalah hasil dari berakhirnya Perang Dingin, di mana empat besar masih menjadi kandidat atau berpotensi bertransformasi menjadi *superpower* menggeser AS. Klasifikasi ini, menurut Buzan dan Wæver, adalah bentuk terbaik untuk menghindari banyaknya pengertian dan perdebatan panjang mengenai *power* di sistem internasional, khususnya dalam pembahasan kompleksitas keamanan regional. Buzan dan Wæver mengeliminasi beberapa asumsi—lebih tepatnya menegaskan—pendapat yang kurang tepat digunakan untuk menganalisa *power* dalam RSCT¹⁵⁶.

Dengan mendefinisikan *power* dalam sistem internasional seperti telah disebutkan di atas, dapat dijelaskan perilaku negara dan aktor regional yang terlibat dalam RSCT¹⁵⁷. *Global power* akan selalu berpikir perlu melakukan sekuritisasi jika itu berhubungan dengan kepentingan bagi dirinya. Sedangkan *insulator* normatifnya bertabiat pasif dan tidak dapat menyatukan dua RSC dalam satu arena strategis keamanan. *Global power* (*superpower* dan *great power*) sebagai aktor eksternal biasanya melakukan *penetration* dan *overlay* terhadap RSC. Turki, sebagai *insulator* misalnya, harus bersinggungan dengan dua *great*

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 37-39.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 49.

power, EU dan Rusia (menurut terminologi Buzan dan Wæver), yang juga menjadi *major power* dalam *centered RSC*. Di samping itu, Turki juga harus menyerap beban isu keamanan dari MERSC, European RSC, dan Caucasus RSC. Posisi ini menyebabkan Turki mengalami dilema keamanan yang cukup kompleks, sebab keterlibatan Turki tidak hanya ada pada satu RSC saja, tetapi lebih dari itu. Secara normatif, pada akhirnya *insulator state* haruslah bersikap pasif. Hal ini untuk menjaga stabilitas di internal (politik domestik) dan eksternal (RSC) itu sendiri. Sebab itu pula, posisi *insulator* biasanya ditempati oleh negara yang tidak terlalu kuat.



Gambar 5. Tipologi skema (spektrum) *Three-tier power* dalam sistem internasional menurut Buzan dan Wæver (gambar diolah sendiri).

Status Turki sebagai *insulator* menjadi polemik dan diskursus menarik bagi akademisi maupun praktisi pemerintahan di Turki. Kebanyakan dari mereka menolak Turki disebut sebagai *insulator*. Mereka lebih menyukai Turki disebut sebagai sentral dari seluruh dinamika RSC dan *regional power* yang sedang tumbuh menjadi *global power*. Pernyataan ini sering terungkap dalam pandangan elit pemerintahan Turki periode AKP, terutama dari arsitek kebijakan luar negeri

Turki, Erdogan dan Davutoglu¹⁵⁸. Di sinilah letak poin bagaimana menjawab permasalahan pertanyaan penelitian dalam tesis ini.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan status Turki apakah *insulator* atau bukan, dapat menggunakan pendapat Buzan dan Wæver mengenai status *power* sebuah negara dalam dinamika *regional security complex*. *Three-tier scheme of power* milik Buzan dan Wæver cukup representatif menentukan persepsi di manakah posisi Turki sebenarnya.

3. 2 Kemampuan Material (Militer dan Ekonomi)

Secara umum, untuk mengukur *power* sebuah negara digunakan indikator-indikator yang merepresentasi secara kuantitatif kekuatan material yang dimiliki. Meski tidak mudah mengukurnya, kemampuan material tetap mutlak dibutuhkan sebagai syarat bagi modalitas negara untuk mempengaruhi level sistem. Dengan kemampuan material tersebut, negara-negara dapat diklasifikasikan memiliki status seperti *regional power*, *great power* atau *superpower*. Kombinasi dari kapabilitas material tersebut dapat digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah negara¹⁵⁹. Terdapat tiga indikator umum yang paling sering digunakan untuk mengukur *power*, yaitu *military power* (biasanya menggunakan ukuran jumlah, teknologi, dan *military expenditure*), *economy power* (biasanya besar perekonomian yang diukur menggunakan GDP), dan demografi atau populasi¹⁶⁰. Untuk mengukur *power* di tingkat global, Buzan dan Wæver tidak memasukkan populasi. Mereka hanya menyatakan *military power* dan *economy power*¹⁶¹. Kapabilitas militer dan ekonomi merupakan ukuran absolut dalam menentukan *power* sebuah negara. Sebab itu, dengan parameter kapabilitas militer dan ekonomi ini, status Turki dapat diprediksi dan ditempatkan dalam salah satu unsur *three-tier scheme*.

¹⁵⁸ Berbagai pandangan Erdogan dan Davutoglu yang menyatakan ambisi Turki untuk menjadi kekuatan regional utama dan global banyak tersebar di media masa, buku, dan pidato atau *speech act* resmi pemerintah dalam berbagai forum.

¹⁵⁹ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, (New York: Random House, 1979), hal. 131.

¹⁶⁰ John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2001), hal. 60-61.

¹⁶¹ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 32.

3. 2. 1 Kekuatan Militer Turki

Kekuatan militer merupakan salah satu indikator *material power* dari suatu negara. *Military power* menjadi dasar pengukuran kapasitas dan kapabilitas suatu negara dalam menghadapi potensi ancaman dari luar, termasuk bagaimana mengimplementasikan sekuritisasi. Dengan memiliki *military power* yang besar, sebuah negara dapat diklasifikasikan menjadi negara dengan status tertentu di sistem internasional¹⁶². Buzan dan Wæver dalam hal mendefinisikan sebuah negara berada pada level *power* tertentu harus mengetahui sejauh mana kekuatan militernya berada.

Aktivisme Turki belakangan ini menunjukkan bahwa Turki bukanlah negara pasif dan reaktif, tetapi sangat aktif dan terlibat di banyak dinamika. Terlebih Turki juga dikenal sebagai negara yang sering menggunakan bahasa *hard power* untuk menyelesaikan kasus-kasus sekuritisasi seperti dengan Yunani pada kasus Siprus, Suriah pada kasus Kurdi, dan Irak juga kasus Kurdi. Penggunaan bahasa *hard power* ini tidak akan terlepas dari pengaruh rezim Kemalist yang mengandalkan militer sebagai garda pengaman ideologi dan keamanan negara. Dengan posisi geografis yang terletak di antara tiga RSC, di mana Turki berpotensi mendapatkan impor gangguan keamanan dari segala sisi, stabilitas keamanan Turki menjadi perhatian utama republik ini. Sebab itu, kekuatan militer menjadi konsentrasi prioritas para elit republik.

Turki merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kapasitas *military power* cukup besar. Berdasarkan data analitis mengenai kekuatan militer global yang dirilis oleh GlobalFirePower.com, kekuatan militer Turki berada dalam posisi 10 besar dunia, atau lebih tepatnya pada posisi keenam¹⁶³. Data analitis tersebut diukur menggunakan kombinasi seluruh kekuatan militer Turki berdasarkan statistik jumlah, teknologi, jangkauan, dsb. Menurut rilis data SIPRI, Turki berada pada posisi ke-15 besar dunia sesuai dengan kapasitas *military expenditure* sebesar \$17.9 (billion)¹⁶⁴. Jumlah tersebut berarti 2.3% *share* dari

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Global Fire Power, "Turkey 2012", http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Turkey, diakses pada 10 Juni 2012, pkl. 19.23.

¹⁶⁴ SIPRI, lihat Tabel 5.

GDP Turki dan menyumbang 1.0% dari *share* GDP dunia. Meski masih jauh dibandingkan dengan Top 5 (AS, China, Rusia, Inggris dan Perancis) dan masih setengah kali dibandingkan dengan Brazil sebagai yang paling kecil di Top 10, posisi Turki cukup diperhitungkan, baik di MERSC, Balkan, maupun Kaukasus. Sebab bagi negara-negara di kawasan tersebut, Turki menjadi kekuatan militer terbesar dari sisi *military expenditure*. Di deretan negara-negara NATO sendiri, *defense budget* Turki berada pada urutan ke-8 setelah AS, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Belanda¹⁶⁵.

Tabel 7. Top 15 negara dengan *budget* militer terbesar di dunia 2011¹⁶⁶.

Rank 2011 (2010)	Country	Spending (\$ b., MER)	Change, 2002-11 (%)	Share of GDP (% estimate) ^a	World share (%)	Spending (\$ b., PPP) ^b
1 (1)	US	711	59	4.7	41	711
2 (2)	China	[143]	170	[2.0]	[8.2]	[228]
3 (5)	Russian	[71.9]	79	[3.9]	[4.1]	[93.7]
4 (3)	United Kingdom	62.7	18	2.6	3.6	57.5
5 (4)	France	62.5	-0.6	2.3	3.6	50.1
subtotal	Top 5	1051			61	
6 (6)	Japan	59.3	-2.5	1.0	3.4	44.7
7 (7)	Saudi Arabia ^c	48.5	90	8.7	2.8	58.8
8 (9)	India	46.8	59	2.5	2.7	112
9 (8)	Germany	[46.7]	-3.7	[1.3]	[2.7]	[40.4]
10 (11)	Brazil	35.4	19	1.5	2.0	33.8
subtotal	Top 10	1288			74	
11 (10)	Italy	[34.5]	-21	[1.6]	[2.0]	[28.5]

¹⁶⁵ *The Military Balance 2011*, "Chapter Ten: Country comparisons – commitments, force levels and economics", Routledge, 111:1, 451-482

¹⁶⁶ [] = estimated figure; GDP = gross domestic product. *a* The figures for national military expenditure as a share of GDP are based on estimates for 2011 GDP from the IMF World Economic Outlook database, September 2011. *b* The figures for military expenditure at PPP exchange rates are estimates based on the projected implied PPP conversion rates for each country from the IMF World Economic Outlook database, September 2011. *c* The figures for Saudi Arabia include expenditure on public order and safety and might be slight overestimates. Sources: SIPRI Military Expenditure Database, <<http://www.sipri.org/databases/milex/>>; and International Monetary Fund, World Economic Outlook database, Sep. 2011, <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx>>.

12 (12)	South Korea	30.8	45	2.7	1.8	42.1
13 (13)	Australia	26.7	37	1.8	1.5	16.6
14 (14)	Canada	[24.7]	53	[1.4]	[1.4]	[19.9]
15 (15)	Turkey	[17.9]	-12	[2.3]	[1.0]	[25.2]
subtotal	Top 15	1422			82	
World		1735	42	2.5	100	

Dengan populasi 75.705.147 jiwa, Turki memiliki personil militer aktif sebanyak 510.600 jiwa dengan komposisi 402.000 untuk angkatan darat, 48.600 untuk angkatan laut, dan 60.000 untuk angkatan udara. Jumlah personil cadangan Turki mencapai 378.700 dan paramiliter sebanyak 50.000 personil¹⁶⁷. *Manpower* yang tersedia untuk kebutuhan militer sebanyak 21.079.077 laki-laki dan 20.558.696 perempuan¹⁶⁸. Populasi Turki yang didominasi usia muda dan dewasa menjadikan cadangan *manpower* Turki sangat besar. Jumlah *manpower* yang besar ini menempatkan Turki menjadi angkatan bersenjata terbesar di Eropa dan MERSC, kemudian terbesar kedua di NATO setelah AS¹⁶⁹. Turki pun sering mengikuti gelaran militer bersama NATO dan PBB di beberapa lokasi yang membutuhkan kapabilitas militer.

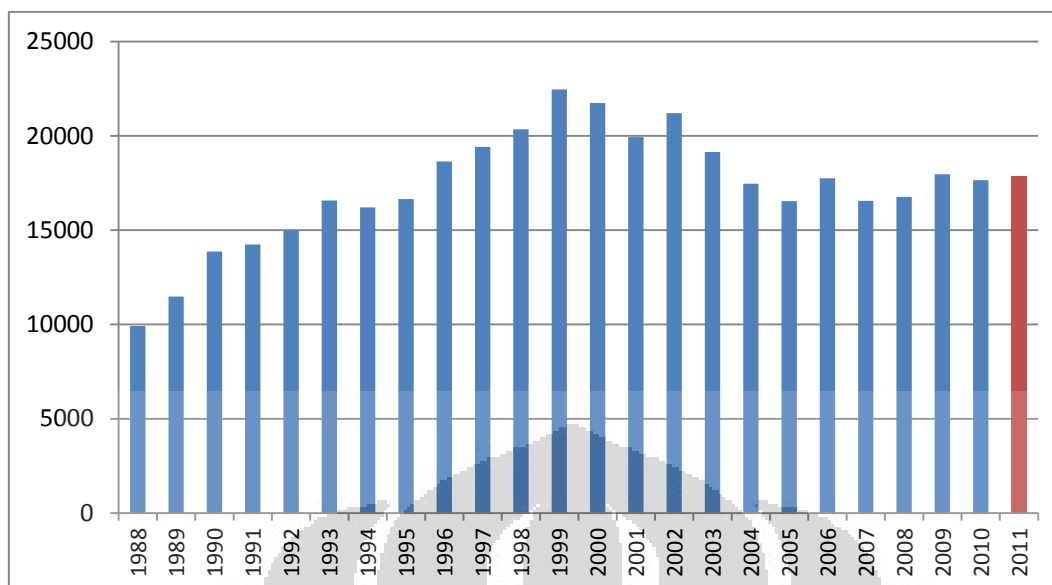
Jika dibandingkan dengan negara-negara MERSC, Turki berkompetisi dengan Israel yang memiliki *military budget spending* sebesar \$16.5 (billion) dan Iran \$11.3 (billion)¹⁷⁰. Suriah memiliki budget \$2.5 (billion) sedangkan Irak \$5.9 (billion). Di MERSC secara keseluruhan Turki tidak tertandingi secara *manpower* dan *military budget*. Saingan terberat Turki dalam kekuatan militer hanyalah Iran dan Israel, baik untuk *military budget* maupun personil militer. Negara-negara lain relatif lebih kecil dalam jumlah *manpower* dan *military budget*—kecuali Saudi Arabia yang memiliki *budget* berkali lipat dan teknologi persenjataan yang *high end* dibanding negara-negara lain di MERSC.

¹⁶⁷ *The Military Balance 2011*, “Chapter Four: Europe”, Routledge, 111:1, hal. 73-172

¹⁶⁸ CIA, *loc. cit.*

¹⁶⁹ *Military Balance 2011*, *op. cit.*, hal. 471.

¹⁷⁰ Data dari SIPRI, kecuali Iran diambil dari *Military Balance 2011*, “Chapter Seven: Middle East and North Africa”, Routledge, 111:1, 293-342.



Gambar 6. Kenaikan *military expenditure* Turki sejak 1988-2011. Sumber: SIPRI, *Military expenditure, in constant (2010) US\$ m.*

Military expenditure Turki nampak meningkat tajam semenjak tahun 1988 hingga 1999, dari \$10 (billion) menjadi \$22.5 (billion). Selama satu dekade peningkatan tersebut cukup signifikan naik dua kali lipat. Namun, nominal tersebut perlahan menurun semenjak 2003 menjadi \$19.2 (billion), di mana tahun tersebut merupakan awal dari pemerintahan AKP mulai memerintah. Penurunan terjadi hingga 2005 dan 2007 menjadi \$16.5 (billion), namun semenjak itu naik lagi dan relatif stabil hingga 2011 di angka \$17.9 (billion). *Budget* tersebut hampir sama dengan *military expenditure* Turki pada hampir dua dekade lalu. Ini artinya selama waktu itu, tidak ada peningkatan berarti *budget military* Turki. Bahkan, cenderung menurun jika dollar tidak dianggap konstan. Meski demikian, terjadi peningkatan semenjak 2008 dan ini menjadi catatan tersendiri bagi analisis SIPRI¹⁷¹.

Dalam ranah domestik, rezim Kemalist telah menisakan doktrin supremasi militer atas kendali keamanan internal dan eksternal Turki. Doktrin ini memberikan kewenangan luas kepada militer untuk melakukan proses sekuritisasi terhadap isu yang berpotensi mengancam kedaulatan negara maupun ideologi

¹⁷¹ SIPRI, <http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/trends>, akses pada 4 Juni 2012, pkl. 14.55.

sekulerisme Attaturk. Namun, setelah AKP berkuasa, proses demokratisasi berlangsung sangat intens di mana peran sipil jauh lebih ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan reduksi peran militer dan peningkatan peran kepolisian dalam keamanan internal, sebagai contoh untuk menghadapi gerakan insurgensi PKK. Meski demikian, kapasitas militer Turki masih relatif superior di kawasan MERSC dan cukup *balancing* di Eropa.

Data statistik ini menunjukkan bahwa Turki memiliki kekuatan militer yang cukup mumpuni dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Meski Anggaran pertahanan bukan merupakan satu-satunya indikator yang bisa digunakan untuk menganalisis kekuatan militer suatu negara, namun secara umum sudah cukup menggambarkan seberapa besar *concern* suatu negara terhadap sistem pertahanannya. Ada beberapa indikator lain yang dapat dipakai pula sebagai pertimbangan seperti jumlah personel militer, kekuatan darat, kekuatan laut, kekuatan udara, teknologi, pengembangan, produksi, logistik dan sebagainya. Namun, secara sederhana data yang telah disebutkan cukup menggambarkan kondisi kemampuan militer Turki saat ini.

3. 2. 2 Kekuatan Ekonomi Turki

“The old powers are losing power, both economically and intellectually. And Turkey is strong now enough to stand by itself.” (Vural Ak, 42, founder and chief executive Intercity)

Berakhirnya Perang Dingin membuat dinamika perekonomian kawasan sekitar Turki berubah secara signifikan ke arah globalisasi. Perubahan ini nampak pada keterbukaan dan liberalisasi ekonomi yang menyebabkan arus teknologi informasi dan telekomunikasi ikut berkembang sejalan dengan peningkatan mobilisasi (transportasi), skala perdagangan, dan termasuk arus migrasi penduduk¹⁷². Hal ini dilihat oleh Turgut Ozal¹⁷³ sebagai sebuah potensi perubahan yang dapat mempengaruhi dinamika domestik. Jika Turki tidak mengikuti dan

¹⁷² Transatlantic Academy, *loc. cit.*, hal. 9.

¹⁷³ Turgut Ozal sewaktu awal 1980-an menjabat sebagai ketua State Planning Organization, kudeta yang berlangsung setahun berikutnya menempatkan Ozal sebagai Deputy Perdana Menteri bidang Hubungan Ekonomi, dan pada tahun 1983 Ozal terpilih sebagai Perdana Menteri Turki.

memahami (mengantisipasi) perubahan ini, Turki dapat tertinggal dari negara-negara lain di Eropa, khususnya negara di sampingnya. Sebab itu, Ozal melakukan reformasi ekonomi yang cukup signifikan semenjak dekade 1980-an¹⁷⁴. Reformasi perekonomian Ozal adalah membuka seluas-luasnya akses perdagangan dan liberalisasi perekonomian Turki. Pada masa Ozal inilah Turki menandatangani lebih dari 40 perjanjian bilateral yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Setidaknya, ada tiga aspek utama reformasi ekonomi Turki pada periode ini: 1) stabilisasi makro-ekonomi, 2) mengubah orientasi ekonomi dengan promosi ekspor, 3) liberalisasi perdagangan dengan mengurangi hambatan impor¹⁷⁵. Pertumbuhan ekonomi Turki menjadi tertinggi di antara seluruh negara pada dekade ini. Pemerintahan Ozal meliberalisasi rezim impor sebagai bentuk utuh liberalisasi ekonomi. Konsep liberalisasi dan keterbukaan ekonomi Ozal sangat berpengaruh terhadap Turki modern dan menyisakan reformasi yang masih terus berlanjut hingga kini. Ozal pula-lah yang pertama kali memperkenalkan “neo-Ottomanisme” ke dalam ranah publik untuk menyebut era kebangkitan Turki. Sekarang, di mana terjadi fenomena “kebangkitan” Turki dari sisi politik dan ekonomi, selalu dikaitkan dengan terminologi Ozal tersebut.

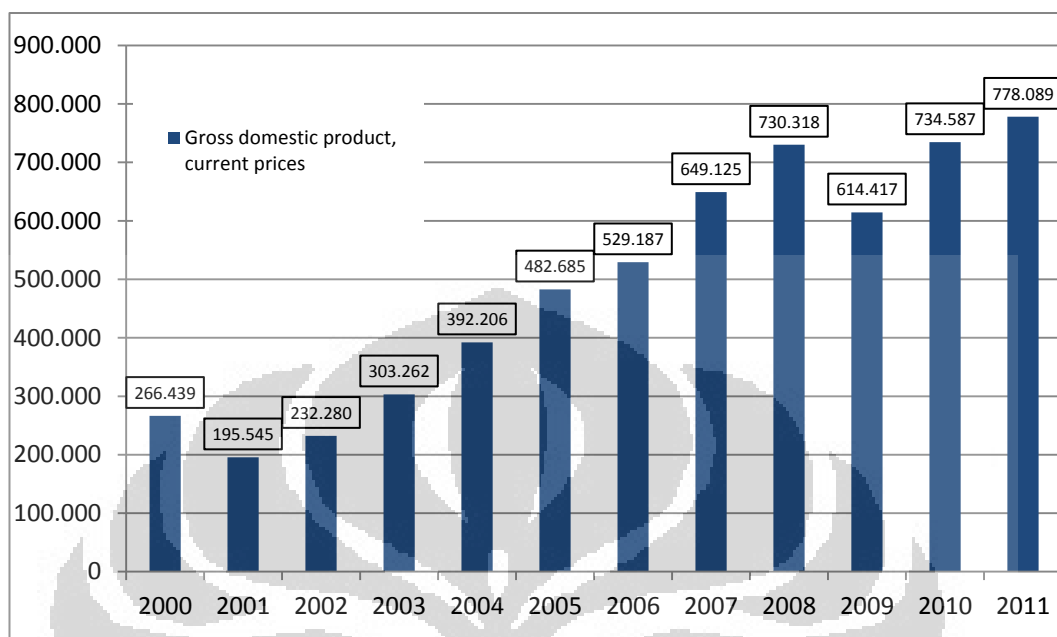
Market ekonomi Turki secara sederhana dibagi menjadi tiga kawasan. Kawasan negara-negara eks-Soviet menjadi pasar ekspor yang potensial, sumber energi dan pekerja murah. EU, semenjak Turki bergabung ke dalam Custom Union pada 1995, telah menjadi perluasan pasar ekonomi, investasi dan infrastruktur bagi Turki. Sedangkan Middle Eastern adalah *supplier* energi bagi Turki dan kawasan di sebelah utaranya. Turki menjadi kunci utama untuk transit dan distribusi minyak dan gas bagi ketiga kawasan ini¹⁷⁶. Posisi Turki yang berada di tengah jalur distribusi barang jasa tersebut menjadi potensi bagi perekonomian Turki. Stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur, dan

¹⁷⁴ Sevket Pamuk, “Economic Change in Twentieth Century Turkey: Is the Glass More than Half Full?” (Working Paper No. 41, 22 Januari 2007, American University of Paris), hal. 16-19.

¹⁷⁵ Sebnem Gumuscu, “Economic Liberalization, Devout Bourgeoisie, and Change in Political Islam: Comparing Turkey and Egypt”, (EUI Working Papers, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, No. 19, 2008), hal. 3.

¹⁷⁶ Aliye Pekin Celik, Leylac Naqvi, “Turkey: Current and Future Political, Economic, and Security Trends”, *Canadian Defence & Foreign Affairs Institute*, (Desember, 2007), hal. 4.

perjanjian kerja sama lintas geografis menjadi konsentrasi pembangunan Turki pada dekade berikutnya setelah reformasi perekonomian Ozal.



Gambar 7. GDP Turki untuk periode 2000-2011, satuan dalam \$ billion, data diambil dari IMF.

Perekonomian Turki meningkat selama satu dekade terakhir. Semenjak perbaikan ekonomi terjadi sekitar awal 2000-an, kenaikan ekonomi Turki tak terbendung. Turki melanjutkan implementasi reformasi ekonomi sebagai syarat kandidat keanggotaan EU. Dengan demikian menjadikan Turki lebih terbuka dalam perekonomian. Turki pada tahun 2011 merupakan negara dengan GDP-PPP sebesar \$1.073.565 urutan ke-16 dunia dan urutan ke-17 untuk GDP Nominal sebesar \$778 (billion)¹⁷⁷. Dengan kapasitas perekonomian yang semakin pesat, Turki diklasifikasi menjadi negara maju oleh CIA¹⁷⁸, sedangkan *The Economist*¹⁷⁹ dan World Bank¹⁸⁰ mengklasifikasikannya menjadi negara dengan perkembangan

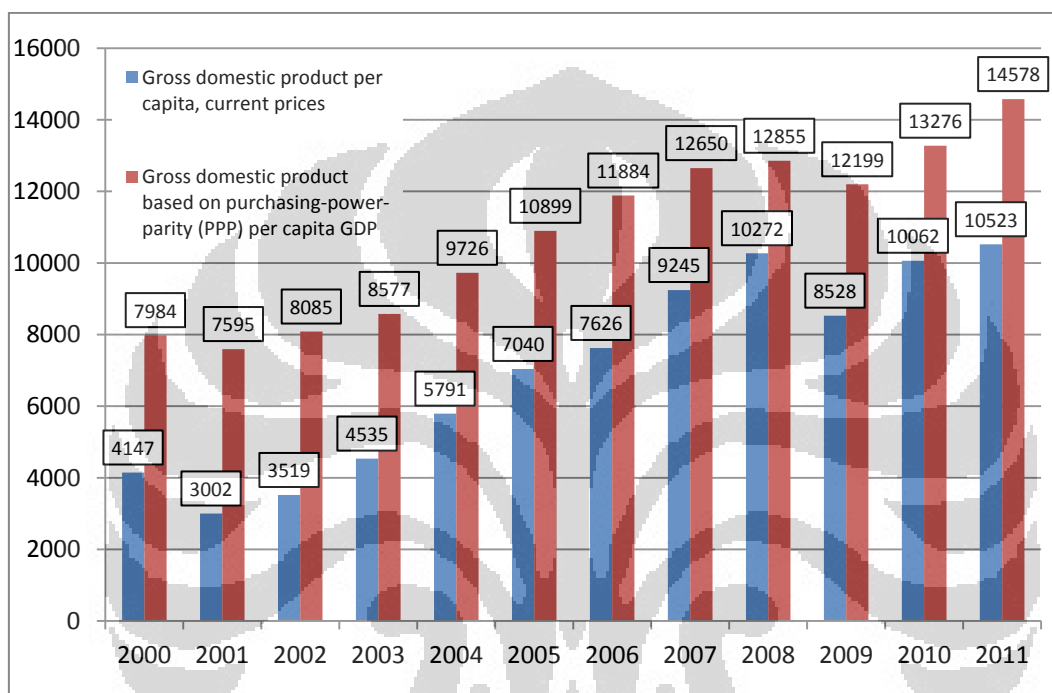
¹⁷⁷ IMF, Data Set, 2012.

¹⁷⁸ CIA, *loc. cit.*

¹⁷⁹ "Fund Management", 16 Juli 2009, dari edisi cetak, http://www.economist.com/node/14041662?story_id=14041662, akses pada 8 Juni 2012, pkl. 21.37.

¹⁸⁰ "Turkey Country Brief 2010", 5 Oktober 2010, <http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN/0,contentMDK:20630704~menuPK:361720~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:361712,00.html>, akses pada 8 Juni 2012, pkl. 21.39

market ekonomi yang signifikan. Gejolak krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008 telah memberikan dampak cukup kentara terhadap AS dan negara-negara Eropa seperti Yunani, Irlandia, Italia, dan Portugal. Dampak tersebut juga merambat ke Turki, namun dengan skala yang lebih kecil (berkurangnya *rate* pertumbuhan)¹⁸¹. Laju perekonomian Turki meningkat seiring intensifikasi pemerintah terhadap beberapa sektor industri dan perbankan.



Gambar 8. GDP Per Capita dan GDP-PPP Per Capita, data diambil dari IMF.

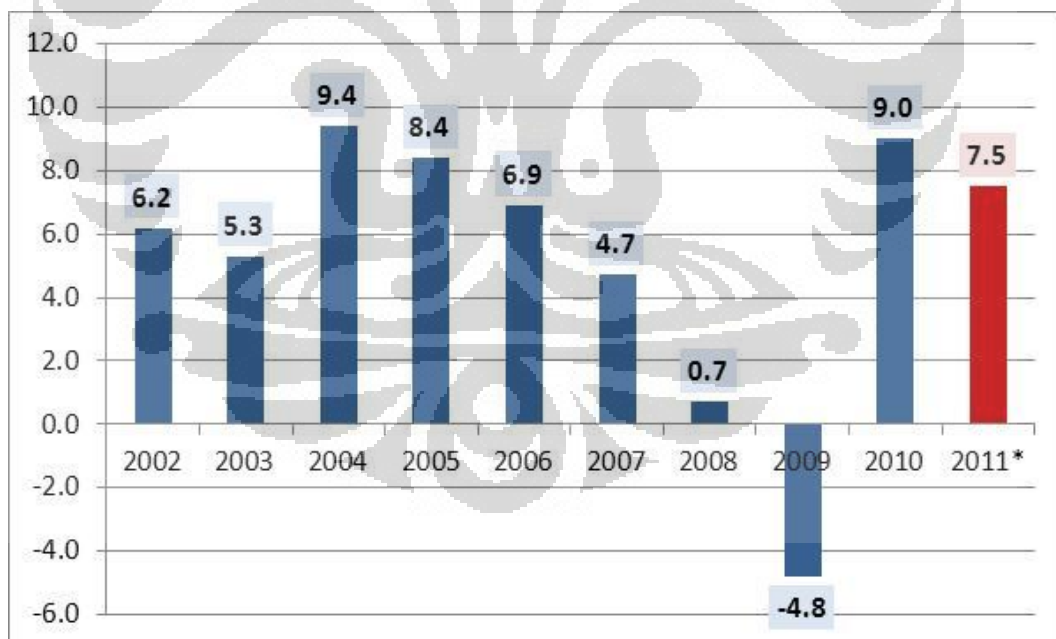
GDP *per capita* Turki sebesar 30% dari rata-rata EU. Untuk agregat GDP Nominal negara-negara di dunia, Turki menempati urutan ekonomi terbesar ke-17, namun dengan GDP *per capita* \$10.052 dan berada pada posisi ke-57. Posisi ini setengah dari Portugal yang menjadi salah satu negara “termiskin” di EU yang mendapatkan nilai GDP *per capita* \$21.600 dan berada pada posisi ke-32. Namun, meski demikian posisi Turki masih lebih baik dibandingkan dengan Romania (\$7500, posisi ke-70) dan Bulgaria (\$6350, posisi ke 74).

Pada 2002-2010, ekonomi tumbuh dengan rata-rata *annual growth rate* sebesar 5.1%. Pada 2009, perekonomian tumbuh negatif sebesar -4.8% seiring

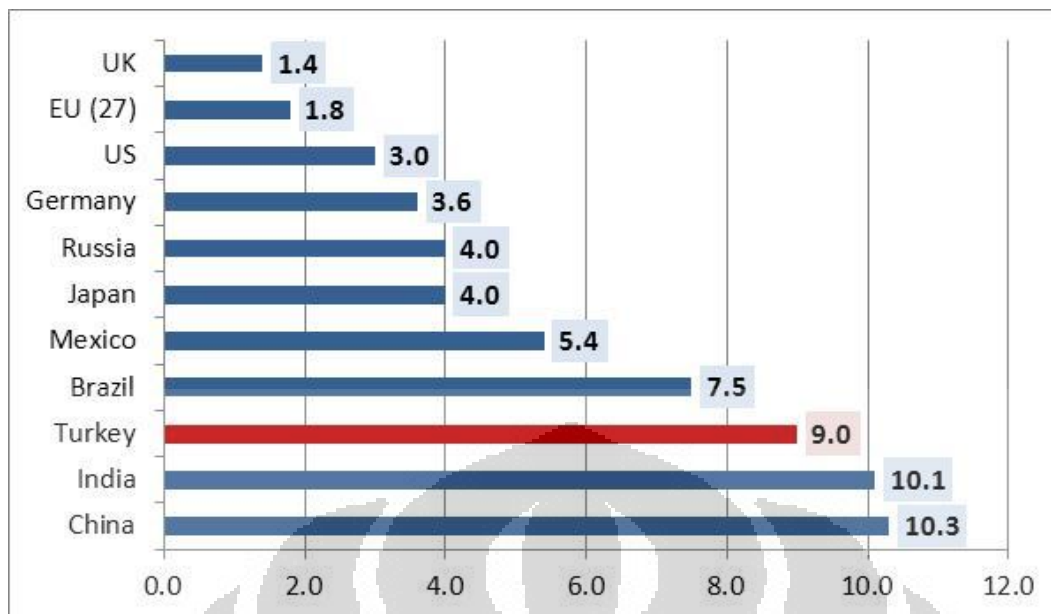
¹⁸¹ SETA, “Turkey in 2011”, *loc. cit.*, hal. 71

terjadinya krisis keuangan global. Krisis keuangan tersebut menimpa sebagian besar negara Eropa, AS, dan sebagian Asia. Namun, setelah itu perekonomian Turki kembali pulih dengan cepat. Pertumbuhan rata-rata sebesar 9.0% pada tahun 2010. Hasil tersebut menjadikan Turki memiliki rata-rata pertumbuhan tercepat di antara negara-negara Eropa. Pada pertengahan pertama 2011, Turki meraih pertumbuhan Real GDP sebesar 10.2%.

Pada 2010, perekonomian Turki tumbuh menjadi 9.0% menempati urutan ketiga setelah China (10.3%) dan India (10.1%). Nilai tersebut lebih baik dari rata-rata perkembangan ekonomi dunia sebesar 7.5% dan melebihi nilai EU dengan nilai 1.8%. IMF memperkirakan Turki mendapatkan 7.8%, tetapi ternyata lebih dari prediksi tersebut. Inflasi Turki saat ini berkisar 5%, di mana sangat jauh turun jika dibandingkan dengan nilai inflasi pada 1980-an dan 1990-an yang berada pada 65%. Dengan pertumbuhan yang cukup besar, Turki memiliki prospek bagi pertumbuhan bisnis domestik maupun kawasan. Hal ini memicu semakin banyak transaksi ekonomi ke dalam maupun ke luar Turki.



Gambar 9. *Annual Economic Growth Rates (2002-2011)*, sumber TURKSTAT diolah dari data IMF, *forecast, Medium Term Programme.



Gambar 10. Real GDP Growth of Selected Countries/Country Groups (2010), sumber TURKSTAT, diolah dari data IMF.

Faktor yang menyebabkan Turki menjadi kekuatan regional, bahkan global adalah perubahan radikal-struktural dalam perekonomian, di mana AKP menjadikan Turki sebagai negara eksportir¹⁸². Perubahan ini sebenarnya mulai dilakukan oleh Turgut Ozal di mana liberalisasi ekonomi menghasilkan kelas pebisnis baru yang sering disebut Anatolian Tigers. Tren liberalisasi perekonomian ala Ozal terus dilanjutkan oleh AKP hingga sekarang. Bahkan, tren ini mengalami peningkatan signifikan semenjak AKP berkuasa. Dengan demikian Turki akan terus mencari pasar baru bagi produk-produk domestiknya, minimal di tiga kawasan yang telah disebutkan di atas.

Optimisme Turki dalam perekonomian sangatlah tinggi. Kepercayaan diri ini berasal dari progresivitas ekonomi yang terus melaju semenjak 2002. Dari negara dengan yang dianalogikan sebagai bayang-bayang perekonomian EU selama beberapa dekade, menjadi negara yang bisa menyamai perekonomian negara-negara di dalamnya—terlebih saat ini Eropa sedang mengalami depresi ekonomi¹⁸³. Meski dengan *market* EU yang besar, pebisnis Turki justru cenderung

¹⁸² Henri J. Barkey, *loc. cit.*, 1-13.

¹⁸³ Husnu M. Ozyegin, pengusaha dan orang terkaya di Turki, mengatakan “If you had told me 10 years ago that Turkey’s financial risk would equal that of Italy, I would have said you were

meningkatkan intensitas bisnis mereka ke negara-negara MENA (Middle East and North Africa)¹⁸⁴—dalam terminologi Buzan dan Wæver disebut MERSC. Kebangkitan Anatolian Tigers membawa perekonomian Turki ke arah pasar-pasar baru dengan tujuan ekspor. Nilai ekspor Turki mencapai \$36 (billion) pada 2002, kemudian meningkat drastis menjadi \$134 (billion) pada 2011. Peningkatan ini terus melaju menuju target Turki pada tahun 2023 mencapai nilai ekspor mencapai \$500 (billion). Turki sekarang menempati posisi ke-30 dari negara-negara pengekspor terbesar di dunia, di antara Norwegia dan Czech Republic.

Impor Turki juga naik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Impor ini didominasi oleh sektor energi, seperti minyak dan gas. Persentase peningkatan impor Turki yang berkisar 30%, bahkan lebih besar dibandingkan ekspor Turki sebesar 18%. Perubahan ini seiring dengan dibangunnya jalur-jalur pipa minyak dan gas baru yang masuk ke Turki.

Tabel 8. Data Ekspor-Impor Turki, data diambil dari Departemen Perekonomian Turki.

Years	Exports		Imports		Balance of Foreign Trade	Volume of Foreign Trade	Proportion of imports covered by Exports %
	Value	Change	Value	Change	Value	Value	
	'000 \$	%	'000 \$	%	'000 \$	'000 \$	
2000	27 774 906	4,5	54 502 821	34,0	-26 727 914	82 277 727	51,0
2001	31 334 216	12,8	41 399 083	-24,0	-10 064 867	72 733 299	75,7
2002	36 059 089	15,1	51 553 797	24,5	-15 494 708	87 612 886	69,9
2003	47 252 836	31,0	69 339 692	34,5	-22 086 856	116 592 528	68,1
2004	63 167 153	33,7	97 539 766	40,7	-34 372 613	160 706 919	64,8
2005	73 476 408	16,3	116 774 151	19,7	-43 297 743	190 250 559	62,9
2006	85 534 676	16,4	139 576 174	19,5	-54 041 498	225 110 850	61,3
2007	107 271 750	25,4	170 062 715	21,8	-62 790 965	277 334 464	63,1
2008	132 027 196	23,1	201 963 574	18,8	-69 936 378	333 990 770	65,4
2009	102 142 613	-22,6	140 928 421	-30,2	-38 785 809	243 071 034	72,5
2010	113 883 219	11,5	185 544 332	31,7	-71.661.113	299 427 551	61,4
2011	134 971 545	18,5	240 834 392	29,8	-105.862.847	375 805 938	56,0

crazy.” Dikutip dari artikel Landon Thomas, “Turning East, Turkey Asserts New Economic Power”, NY Times, 5 Juli 2010, edisi print.

¹⁸⁴ Jean-Piere Lehmann, “Turkey’s 2023 Economic Goal in Global Perspective”, *EDAM Center for Economics and Foreign Policy Studies* (Juni, 2011), hal. 2.

Kawasan yang menjadi target utama ekspor Turki masih didominasi oleh EU dan Middle Eastern. Nilai ekspor Turki ke kawasan EU mencapai \$52.7 (billion) pada 2010 dan meningkat menjadi \$62.4 (billion) pada 2011 dengan persentase perubahan 18.4%. Sedangkan posisi kedua didominasi oleh negara-negara dalam Near & Middle Eastern dengan nilai ekspor mencapai \$23.3 (billion) pada 2010 dan meningkat menjadi \$28 (billion) pada 2011 dengan persentase perubahan 20%. Total ekspor untuk kedua kawasan mencapai jumlah 67% dari total ekspor Turki selama 2011.

Tabel 9. Data Ekspor Turki ke negara berdasarkan region (dalam \$ million), data diambil dari Departemen Perekonomian Turki

(Million \$)	Annual			Januari		
	2010	2011	Change (%)	2011	2012	Change (%)
A-EU (27)	52.685	62.378	18.4	4.552	4.512	(-)0.9
B-Free Zones In Turkey	2.084	2.512	20.5	180	191	6.6
C-Other Countries	59.114	70.065	18.5	4.820	5.671	17.7
1-Other Europe	11.373	12.990	14.2	848	975	15.0
2-Africa	9.283	10.336	11.3	774	855	10.5
North Africa	7.025	6.701	-4.6	546	614	12.5
Other Africa	2.258	3.635	61.0	228	241	5.7
3-America	6.078	7.943	30.7	513	720	40.5
North America	4.242	5.472	29.0	349	525	50.6
Central America & Caraips	598	630	5.3	67	65	-2.5
South America	1.237	1.841	48.8	97	130	33.7
4-Asia	31.876	38.151	19.7	2.631	3.080	17.0
Near & Middle Eastern	23.295	27.954	20.0	2.022	2.327	15.1
Other Asia	8.581	10.198	18.8	609	753	23.6
5-Australia & New Zealand	403	481	19.4	32	36	13.9
6-Other Countries & Regions	102	164	61.2	21	4	-82.9
Total	113.883	134.954	18.5	9.551	10.374	8.6

Ekspor Turki ke negara-negara yang berbatasan langsung semenjak 2002 hingga 2011 mengalami peningkatan signifikan. Iran dari \$334 (billion) naik

menjadi \$3.591 (billion) pada 2011. Irak dari \$829 (billion) menjadi \$8.315 (billion). Suriah dari \$267 (billion) menjadi \$1.611 (billion). Begitu pula nilai ekspor Turki ke Israel, dari \$861 (billion) menjadi \$2.391 (billion) pada 2011. Peningkatan ini terus terjadi di negara-negara sekitar Turki selama kurun waktu 2002-2011. Hal ini menandakan perkembangan positif bagi Turki dan negara-negara di sekitarnya.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Turki banyak membangun jalur pipa minyak dan gas baru dari Timur Tengah. Jalur-jalur ini bukan hanya untuk kebutuhan domestik Turki, tetapi juga transit dan distribusi ke Eropa. Dengan demikian, menjadi hal yang sangat wajar jika pada akhirnya Turki bersikap agresif dalam mengamankan jalur-jalur energi tersebut.



Gambar 11. Jalur pipa minyak dan gas dari Timur Tengah dan Rusia menuju Turki dan Eropa, sumber diambil dari Departemen Perekonomian Turki

Turki telah menjadi kekuatan ekonomi dengan pertumbuhan sangat cepat di dunia. Transformasi ini sangat mencengangkan di mana 10 tahun yang lalu, Turki defisit 16% dari GDP dan inflasi mencapai 72%. Kombinasi sosial konservatis dengan kebijakan ekonomi liberal yang dibawa oleh AKP telah menempatkan Turki pada posisi terbaik selama 20 tahun terakhir. Posisi ini juga semakin mendekatkan Turki ke dalam zona Eropa, atau lebih khusus lagi

European Union. AKP telah memberikan ruang dinamisasi perekonomian Turki sehingga Turki dapat bekerja sama dengan siapa saja seperti Israel, Rusia, Saudi Arabia, Iran, Suriah, dsb yang sesuai dengan ambisi Turki menjadi aktor politik regional yang dominan¹⁸⁵.

3. 3 Persepsi Terhadap Diri Sendiri dan Pengakuan dari Aktor Lain

Buzan dan Wæver mengutip Bull (1997, 200-2)¹⁸⁶, bahwa salah satu unsur pengukuran klasifikasi suatu aktor dianggap sebagai *great power* adalah “*formal recognition of that status by others.*” Pengakuan formal ini didapat dari setidaknya dua hal. Pertama, klaim atau persepsi terhadap diri sendiri yang berpikir dirinya *think themselves “great”*. Kedua, melakukan *behavior* sebagai *great power*. Persepsi terhadap diri sendiri akan memunculkan *statement* atau kebijakan yang berorientasi pada perilaku *great power*, seperti sekuritisasi dan desekuritisasi, orientasi global atau melebarkan pengaruh hingga ke luar *region*, dan *self-confidence* yang tinggi dalam berinteraksi. Sedangkan pengakuan formal datang dari lembaga-lembaga regional maupun internasional.

Semenjak Republik Turki terbentuk hingga sekarang, setidaknya terdapat dua *mainstream* utama ideologi, yaitu Kemalism dan Neo-Ottomanism¹⁸⁷. Kemalism adalah ideologi yang ditanamkan oleh Mustafa Kemal Pasha (Attaturk) setelah berhasil melakukan intervensi terhadap Turki Ottoman yang saat itu menjadi pesakitan (*The Sickman from Europe*). Mustafa Kemal Pasha kemudian merumuskan kebijakan politik guna membentuk identitas baru bagi Turki yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Ia menanamkan karakter uniter dan sekuler bagi Turki dengan orientasi utama adalah Barat. Uniter artinya seluruh warga negara yang tinggal di wilayah Turki haruslah mengadopsi identitas Turki, tak peduli latar belakang etnis dan bahasa. Sedangkan sekuler berarti Turki menjauhkan otoritas teokratis dalam karakter identitas baru Turki ini¹⁸⁸. Pembentukan identitas baru ini diiringi dengan proses westernisasi, modernisasi,

¹⁸⁵ Landon Thomas, *loc. cit.*

¹⁸⁶ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 32.

¹⁸⁷ Rick Brouwer, “Turkey’s Position in the Middle East: Regional Hegemon or Peripheral Bystander?” (Tesis, University Groningen, 31 Januari 2011), hal. 22.

¹⁸⁸ *Ibid.*

dan sekulerisasi. Identitas dan kebijakan Mustafa Kemal Pasha ini kemudian menjadi ideologi resmi Turki semenjak 1920-an dan dilanjutkan oleh pengikut ideologinya yang sering disebut Kemalist.

Sebagai contoh doktrin politik Kemalist, *peace at home and peace abroad* (atau *peace in the world*) telah menjadi dasar kebijakan luar negeri Turki selama Perang Dingin dan relatif pada pasca Perang Dingin. Attaturk memberikan penjelasan mengenai orientasi tersebut dengan kalimat “*Turkey does not desire an inch of foreign territory, but will not give up an inch of what she holds.*”¹⁸⁹ Doktrin ini menyebabkan Turki mengambil sikap pasif dan represif, khususnya berpandangan sekuritisasi hanya dapat diselesaikan dengan jalur militer. Pandangan ini sering diarahkan kepada separatisme isu Islamisme yang merongrong Turki baik dari internal maupun eksternal. Kurdi yang memiliki identitas tersendiri merasa mendapatkan tindakan represif dari pemerintah Turki dengan prinsip uniter Attaturk¹⁹⁰.

Neo-Ottomanisme mulai menjadi isu beranjak dari reformasi ekonomi Turki pada dekade 1980-an yang dilakukan oleh Turgut Ozal. Ozal tidak memiliki latar belakang keagamaan, namun sebutan Neo-Ottoman ditujukan untuk perbaikan hubungan Turki dengan negara-negara bekas wilayah Ottoman sebelum 1923. Belakangan istilah ini sering digunakan sebagai referensi gerakan Islamis yang memang semenjak awal Turki berdiri telah bermunculan. Gerakan ini bertujuan mengembalikan warisan kejayaan Ottoman yang pernah dimiliki Turki baik dari segi historis, sosial, identitas dan kebangsaan¹⁹¹. Pada 1990-an, gerakan ini mulai mendapatkan tempat di publik Turki yang terepresentasi dalam Welfare Party—kemudian diteruskan oleh AKP yang mendulang suara pada dekade berikutnya. Mereka melihat Turki sebagai “*big brother*” bagi dunia Arab-Muslim dan seharusnya Turki tidak melupakan negara-negara di dalamnya¹⁹².

¹⁸⁹ Buzan, Wæver, *op. cit.*, hal. 392.

¹⁹⁰ E. Cornell, Halil Magnus Karaveli, “Prospects for a ‘Torn’ Turkey: A Secular and Unitary Future?” *Silk Road Paper*, Central Asia-Caucasus Institute. Silk Road Studies Program (Oktober 2008), hal. 13.

¹⁹¹ Rick Brouwer, *loc. cit.*, hal. 22.

¹⁹² Norah F. Onar, “Neo-Ottomanism, Historical Legacies and Turkish Foreign Policy”, (*Centre for Economics and Foreign Policy Studies*, discussion paper series, Maret 2009), hal. 12.

Persepsi Kemalist dan Islamis (AKP), secara akar mungkin saja berbeda disebabkan dikotomisasi ideologi Turki menjadi dua. Namun, AKP menyatakan tidak menegasikan ideologi politik Attaturk dan orientasi Baratnya¹⁹³, bahkan melakukan hibrida yang lebih luas dengan pandangan regional dan global kelompok Islamis. Alhasil, Turki sekarang mempersepsikan dirinya sebagai aktor regional dan global (khususnya di Timur Tengah). *Term* pertama AKP berkuasa (2002-2007) sangat terlihat fokus utama dari Turki adalah harmonisasi dengan EU. Ini membuktikan AKP pro-EU dan mendukung identitas ke-Eropa-an Kemalist. Namun, pada *term* berikutnya (2007-2011) AKP mulai dengan eksplisit perubahan orientasi ke timur (MERSC), di mana Turki memproyeksikan diri sebagai stabilisator dan dominan aktor di kawasan tersebut—yang berfungsi pula sebagai broker dan fokus ekonomi di kawasan tersebut¹⁹⁴. Dengan tidak meninggalkan orientasi ke-Barat-annya, Turki ingin menambah kapasitas regional di Balkan, Kaukasus, dan tentu di MERSC.

“The Middle East, the Caucasus, and the Balkans have won as much as Turkey.” Begitulah kalimat “kemenangan” Erdogan ketika AKP berhasil meraup suara mayoritas di parlemen. Erdogan menjanjikan pada tahun 2023, tepat 100 tahun perayaan Republik Turki, Turki akan berada di deretan 10 besar kekuatan dunia¹⁹⁵. Ambisi ini menjadi visi politik baru Turki yang cukup kontras jika dibandingkan dengan era Kemalist. Ambisi Turki untuk menyatukan tiga kawasan keamanan membentuk persepsi Turki sebagai sentral dari ketiganya. Ini sering dinyatakan oleh elit politik Turki saat ini dengan menolak status *insulator*. *Speech act ini* dibuktikan dengan aktivisme Turki di ketiga RSC dalam satu dekade terakhir.

Kondisi negara-negara tetangga Turki seperti Iran, Irak, Suriah, Saudi Arabia, dan Mesir tidak terlalu memperhitungkan Turki sebagai kekuatan regional

¹⁹³ Presiden Abdullah Gull menyatakan bahwa *“Turkey was now a big economic power that hade embraced democracy, human rights, and the free market.”* Dengan yang dimaksudkan mendapatkan inspirasi dari AS dan EU. Gull juga menyatakan Barat harus menerima perkembangan Turki di Timur Tengah, sebab Turki mambantu mempromosikan *Western values* di kawasan tersebut. *The Times*, London, 3 Juli 2010.

¹⁹⁴ Svante E. Cornell, “Changes in Turkey: What Drives Turkish Foreign Policy”, *Middle East Quarterly*, (Winter, 2012), hal. 14.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 13.

disebabkan kedekatan Turki dengan Israel¹⁹⁶. Pada perang Arab-Israel, Turki yang mempunyai kebijakan luar negeri netral pada saat Perang Dingin berlangsung, berubah menjadi lebih dekat dengan Israel. Persepsi ini terus terbentuk hingga periode AKP. Namun, pada pertengahan *term* pertama berkuasa (2002-2007) AKP mulai memberikan tanda-tanda perubahan kebijakan terhadap Israel. Seperti yang telah disebutkan di dalam Bab 2, akhirnya pada periode *years of crisis* (2009-2010), persepsi ini berubah drastis. Peningkatan hubungan dengan negara-negara MERSC yang semakin meningkat memunculkan persepsi baru terhadap Turki, sehingga Turki jauh lebih diterima sebagai aktor regional.

Penerimaan Turki tidak hanya pada level negara, namun pada masyarakat Arab secara umum. TESEV melakukan survei pada 2009 terhadap tujuh negara dengan responden 2000 orang yang meliputi Mesir, Jordan, Palestina, Libanon, Saudi Arabia, Irak dan Suriah¹⁹⁷. Analisa survei ini dilakukan oleh Prof. Meliha Benli Altunsik. Turki merupakan negara kedua yang mendapatkan *image* baik (75%) setelah Saudi Arabia (78%) di tujuh negara Arab. Turki bersama Mesir paling dipercaya membela hak-hak warga Palestina dengan tingkat kepercayaan 79%. Turki dianggap paling bisa didengar dan dilegitimasi sebagai aktor yang mengeluarkan isu religius dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi. Turki mendapatkan dukungan sebesar 77% dapat memainkan peran di dunia Arab dan 76% menyatakan Turki dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses perdamaian di sana. Sebanyak 61% menyatakan Turki dapat menjadi model bagi negara-negara Arab. Hal ini dibenarkan dengan pernyataan sebanyak 75% responden menyatakan merasakan pengaruh kehadiran Turki di kawasan.

Posisi status Turki sebagai negara yang memiliki *power* juga diakui oleh World Bank, IMF, the Economist dalam bidang ekonomi. Turki diakui sebagai negara dengan *budget military* terbesar ke-15 oleh SIPRI dan keenam oleh GFP. Status Turki kadang dimasukkan ke dalam *regional power*—Buzan dan Wæver pun menyatakan bahwa Turki bisa disebut *regional power*. Persepsi Turki untuk menjadikan dirinya sebagai aktor regional dan global telah membawa Turki pada level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, keberadaan Turki dalam kancah

¹⁹⁶ Rick Brouwer, *loc. cit.*, hal. 28.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 30.

internasional cukup diperhitungkan. Sebab, seperti yang telah disampaikan di awal bahwa selain harus memunculkan persepsi “*great power*”, sebuah negara haruslah berperilaku seperti *great power*.

3.4 Sekuritisasi dan Desekuritisasi

Salah satu bagian penting dari skema *three-tier power* dari Buzan dan Wæver adalah proses sekuritisasi dan desekuritisasi. Perbedaan mendasar dari ketiga *-tier power* adalah jangkauan dari pengaruh dan proses sekuritisasi itu terjadi. *Superpower* selalu mampu melakukan sekuritisasi di hampir seluruh sektor dan *region* (kawasan). Sedangkan *great power* dapat melakukan sekuritisasi namun dengan jangkauan yang relatif lebih terbatas dan sektor yang juga lebih terbatas. *Great power*, menurut Buzan dan Wæver akan selalu berpikir dirinya harus terlibat dalam isu-isu keamanan di suatu kawasan, termasuk melakukan sekuritisasi. Menurut mereka hal ini adalah karakter dasar dari *great power* dalam interaksinya di sistem internasional.

Turki dengan visi politik luar negerinya yang cenderung meningkatkan peran regional dan global telah banyak melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi¹⁹⁸. Dampak dari (de)sekuritisasi ini adalah meningkatnya keterlibatan Turki dalam isu keamanan regional baik yang berhubungan langsung dengan Turki ataupun yang bersifat keterlibatan tidak langsung. Beberapa isu yang menjadi perhatian Turki selama satu dekade terakhir di antaranya isu suku Kurdi, isu Palestina, isu Siprus, isu Pan-Islamisme, isu Armenia, dan isu Hatay-Eufrat.

Isu Kurdi telah memakan banyak perhatian Turki selama berpuluh tahun¹⁹⁹. Etnis minoritas Kurdi menuntut hak-hak yang lebih luas dari pemerintah pusat Turki. Tuntutan utama yang sering diminta adalah kemerdekaan penuh yang mencakup wilayah etnis Kurdi di selatan Turki yang berbatasan dengan Irak, Iran dan Suriah. Kondisi yang sama dialami oleh ketiga negara tadi, namun dengan porsi yang berbeda. Di Irak, sekarang suku Kurdi berada dalam wilayah Republik Irak Kurdi di mana KRG diklaim mendukung dan membantu PKK menjalankan

¹⁹⁸ Gulbahar Yelken Aktas, *loc. cit.*, hal 77.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 78

aksi-aksinya. Sedangkan kelompok Kurdi di Iran membentuk PJK yang juga dituding terlibat dalam aksi-aksi separatisme terhadap Turki dan Iran. Suriah juga mengalami hal serupa. Namun, militansi Kurdi di Iran, Irak dan Suriah tidak seperti di Turki. Seringkali Turki menuduh pemerintahan setempat mendukung gerakan suku Kurdi yang ikut membantu PKK. Bagi Turki, isu suku Kurdi adalah isu sensitif yang telah lama mengganggu stabilitas domestik Turki. Turki pun sangat keras dengan aktivitas Kurdi ini.

Salah satu dari dua isu utama sekritisasi Turki adalah isu Islamisme yang dianggap mengancam eksistensi sekulerisme Attaturk²⁰⁰. Kemalists, sebutan bagi pengikut Attaturk, sangat menaruh perhatian terhadap gerakan ini. Militer Turki, yang secara tradisional mengklaim sebagai penjaga sekulerisme Attaturk, melakukan upaya-upaya menghalangi gerakan Islamisme tumbuh subur di Turki. Tindakan keras kadang diambil, seperti kudeta, untuk menghalangi kelompok Islamis berkuasa di Turki. Selain melalui cara-cara kekerasan, Kemalists sering menggunakan aspek legalitas seperti undang-undang dan konstitusi untuk menjegal pengaruh kelompok Islamis di ruang publik Turki. Namun, hal ini nampaknya tidak bertahan lama di periode AKP. AKP yang memiliki akar gerakan Islamis di Turki melakukan upaya-upaya menjegal Kemalists untuk melakukan tindakan melawan demokrasi.

Semenjak *intifada* pertama pada tahun 2000, Turki mulai melakukan kritikan tajam kepada Israel²⁰¹. Padahal sebelumnya diketahui bahwa Turki merupakan satu-satunya negara di MERSC yang sangat dekat dengan Turki. Kedekatan Turki dengan Israel bahkan menciptakan persepsi negatif terhadap Turki di masyarakat Arab pada umumnya. Kondisi ini membuat Turki teralienasi, di samping kebijakan Turki pada masa Perang Dingin yang menjaga jarak dengan MERSC. Pada 2004 terjadi pembunuhan terhadap satu keluarga Palestina di pantai Gaza. Berita ini menjadi perhatian di televisi Turki dan memancing komentar PM Erdogan. Ia mengatakan Israel melakukan *state terrorism*. Pada 2009, Erdogan kembali menunjukkan ekspresi ketidaksukaan dengan perilaku Israel yang ditujukan kepada Presiden Simon Peres dalam forum terbuka World

²⁰⁰ M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey*, Oxford: Oxford University Press, 2003.

²⁰¹ *Ibid.*, hal 80

Economic Forum, di Davos, Swiss. Pada forum itu dengan terang dan jelas Turki menyatakan tindakan Israel memblokade Gaza sangat tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional. Puncak penurunan hubungan diplomatis antara Turki dengan Israel terjadi pada Mei 2010, di mana Israel menewaskan 9 orang aktivis kemanusiaan Turki yang berada dalam kapal Mavi Marmara. Sampai sekarang hubungan keduanya masih memanas sehubungan belum adanya penyelesaian antara Turki dengan Israel untuk kasus ini. Dengan adanya sekuritisasi terhadap isu Palestina, yang artinya Turki dapat secara langsung berhadapan dengan Israel—sebagai aktor utama dalam konflik Palestina-Israel—sangat membuka ruang konflik yang lebih luas. Konflik luas sangat mungkin terjadi mengingat, seperti apa yang dikatakan Buzan, bahwa keamanan regional tidak mungkin terlepas dari keamanan aktor-aktor di dalamnya²⁰². Satu dengan yang lain akan menjalin keterkaitan. Setidaknya, dalam perpektif geografis yang berdekatan, konflik bisa menjalar dengan cepat ke negara tetangga.

Selain desekuritisasi Iran, Irak dan Suriah, Turki masa AKP melakukan hal yang sama untuk kasus Siprus²⁰³. Pendekatan baru digunakan untuk menyelesaikan persengkataan antara Turki-Yunani terkait Siprus. Turki dan Yunani berselisih dalam hal perbatasan di Aegean dan Siprus. Namun, gempa bumi pada 1999 menyebabkan perubahan dramatis dari para politikus kedua negara. Permusuhan menjadi persahabatan ketika dua negara bantu-membantu menangani gempa besar yang melanda keduanya. Lebih jauh lagi, demokratisasi yang dilakukan di internal Turki telah menciptakan pola penyelesaian masalah yang lebih dialogis dan *win-win solution*.

Semenjak perang di Karabakh, Turki menutup perbatasannya dengan Armenia sejauh 200 mil, begitu pula Azerbaijan²⁰⁴. Di waktu yang bersamaan Armenia juga menutup perbatasan di Azeri menyebabkan Armenia dependen terhadap Rusia. Turki memutus hubungan diplomatik dengan Armenia sampai permulaan *Soccer Diplomacy* pada 2008. Pada Oktober 2009, Turki dan Armenia

²⁰² Buzan and Wæver, *op. cit.*, hal. 43.

²⁰³ Gulbahar Yelken Aktas, *loc. cit.*, hal 80.

²⁰⁴ *Ibid.*, hal. 81.

menandatangani protokol pembukaan perbatasan antar kedua negara, kerja sama ekonomi dan diplomatik penuh, serta membentuk komisi sejarah bersama.

Tabel 10. List isu keamanan yang di(de)sekuritisasi oleh Turki, diolah dari berbagai sumber.

Isu keamanan	Pemasalahan	Aktor yang terlibat
Konflik Palestina-Israel	Konflik Palestina-Israel yang melibatkan negara-negara Arab melawan Israel. Konflik ini sudah berlangsung lama dan tanpa penyelesaian yang berarti. Turki semenjak awal tahun 2000 telah mulai mengkritisi Israel. Puncak dari keterlibatan Turki adalah ketika Israel menewaskan 9 orang relawan Turki yang ikut dalam konvoi kemanusiaan <i>Freedom Flotilla</i> pada Mei 2010.	Turki, Israel, Palestina
Separatisme Kurdi	Separatisme Kurdi merupakan masalah utama Turki dan beberapa negara yang berbatasan dengan Turki, seperti Irak, Iran, dan Suriah. Masalah muncul ketika Turki menuduh ketiga negara tersebut mendukung dan membantu aktivitas Kurdi di wilayah mereka masing-masing, yang menyebabkan posisi Kurdi di Turki semakin meningkat.	Turki, Iran, Irak, Suriah
Siprus	Siprus terpecah secara <i>de facto</i> dan <i>de jure</i> . Siprus Utara mengklaim atau diklaim sebagai bagian dari Turki dan mendirikan Republik Siprus-Turki. Sedangkan Siprus selatan diklaim atau mengklaim sebagai bagian dari Yunani dan mendirikan Republik Siprus. Permasalahan muncul dari saling rebut pengaruh antara Turki dengan Yunani	Turki, Yunani, Siprus

	menghasilkan ketegangan di kedua belah pihak. Bahkan, sempat terjadi perang besar antar keduanya.	
Nagorno Karabakh	Etnis Armenia mendeklarasikan diri mendirikan negara di wilayah Azerbaijan. Deklarasi ini memicu perang antara Armenia dan Azerbaijan. Turki semenjak Perang Dingin usai sangat <i>concern</i> terhadap Azerbaijan disebabkan banyak etnis Turki yang berada di sana, termasuk kedekatan budaya. Sebab itu, Turki sangat dekat dengan Azerbaijan.	Turki, Azerbaijan, Armenia, Rusia
Pan-Islamisme, Pan-Turkish	Pan-Islamisme merupakan gerakan lama yang terus tumbuh di Turki, negara-negara di MENA, dan Asia. Pan-Islamisme adalah gerakan politik berbasis agama yang bertujuan menyatukan umat Islam di berbagai negara. Pasca runtuhnya Ottoman, gerakan ini berdiaspora ke beberapa negara dan memiliki visi politik konservatif. Di Turki sendiri gerakan ini bermetamorfosis menjadi berbagai gerakan seperti sufi, ekonomi, dan partai politik. Revolusi Iran diklaim Turki dapat membangkitkan revivalisme Pan-Islamisme	Turki, Iran, Kaukasus
Kebijakan air sungai Eufrat dan provinsi Hatay	Suriah mengklaim wilayah Hatay yang dimiliki Turki adalah wilayahnya. Sehingga memicu reaksi dari Ankara. Di samping itu, kebijakan sungai Eufrat Turki memicu reaksi Suriah.	Turki dan Suriah
Migran dan pengungsi	Turki merupakan salah satu negara emigrasi dan imigrasi terbesar di dunia. Turki juga menjadi negara yang sering dimasuki pengungsi,	Turki dengan negara-negara sekitarnya

	<p>terutama dari konflik yang terjadi di MERSC seperti Suriah dan Irak. Perang Dingin juga ikut ambil andil dalam menciptakan gelombang pengungsi dari Balkan dan Kaukasus memasuki Turki.</p>	
--	--	--

Sebagian besar isu (de)sekuritisasi dalam sub-bab ini telah dipaparkan di dalam Bab 2. Isu-isu (de)sekuritisasi yang telah disebutkan adalah isu regional atau yang mempengaruhi dinamika keamanan regional antara Turki dengan negara lainnya atau antar negara lain di kawasan dengan Turki. Isu-isu lain yang belum disebutkan di sini relatif tidak mempengaruhi pada level regional atau hanya terjadi di dalam level domestik Turki saja seperti sekuritisasi jilbab, aksi-aksi terorisme PKK, atau rivalitas antara gerakan Islamis dengan nasionalis di Turki²⁰⁵.

3. 5 Diperhitungkan oleh Aktor Lain

Salah satu unsur vital yang dipaparkan oleh Buzan dan Wæver sebagai pelengkap dari klasifikasi pengukuran *great power* adalah bagaimana sebuah negara bisa disebut sebagai *great power* saat mendapatkan pengakuan dari negara lain dengan memperhitungkan keberadaannya dalam level internasional. Sebab, poin yang lebih penting bagi *power* sebuah negara—menurut keduanya—adalah ideasional mengenai status yang diwakilkan oleh *formal recognition* dan *calculation* oleh aktor lain dalam level sistem²⁰⁶. Dalam hal ini, sangat sulit menentukan apakah suatu negara mencapai level tertentu atau hanya wacana dari fenomena sementara berdasar kejadian-kejadian khusus seperti sekuritisasi dan desekuritisasi, ekonomi, militer dsb.

Semenjak AKP berkuasa, terjadi peningkatan keterlibatan Turki menjadi pemain penjaga perdamaian (*third party*) di MERSC. Kebijakan ini tentu tidak

²⁰⁵ Gul Ceylan Tok, “The Securitization of The Headscarf Issue in Turkey: ‘The Good and Bad Daughters’ of The Republic”, *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*, Vol. 8 (2009), hal, 11.

²⁰⁶ Buzan dan Wæver, *op. cit.*, hal. 32.

akan terlepas dari ambisi Turki untuk memiliki peran yang lebih di kawasan tersebut. Turki secara resmi menyatakan akan lebih aktif terlibat dalam hal ini. Menteri Luar Negeri Turki, Davutoglu menyatakan, “*Turkey should guarantee its own security and stability by taking on a more active, constructive, role to provide order and security in its environs.*”²⁰⁷ Ini memberikan gambaran visi besar Turki untuk terlibat dalam isu-isu keamanan dan stabilitas di kawasan demi kepentingan Turki sendiri. Untuk itu Turki harus meningkatkan pamor regionalnya dengan lebih aktif terlibat dalam setiap isu global seperti keamanan maupun perekonomian.

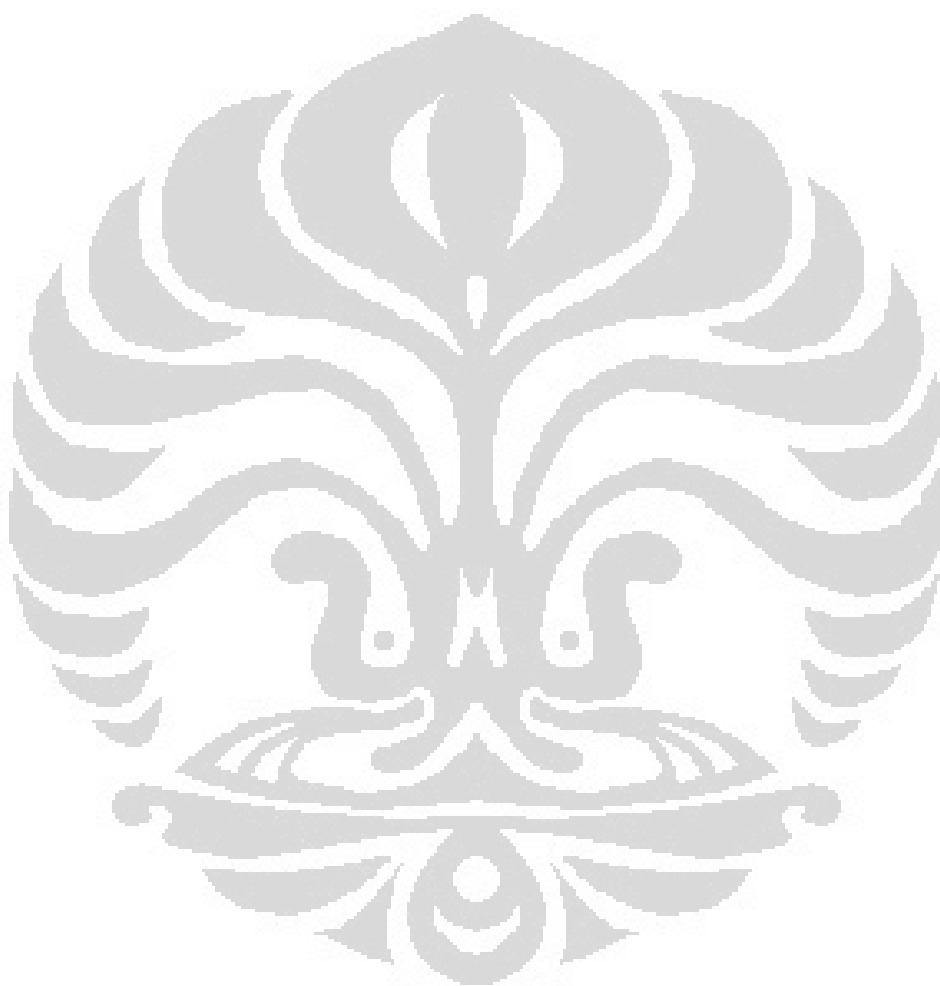
Di bidang keamanan, Turki telah menjadi mediator bagi isu-isu keamanan seperti nuklir Iran. Turki juga memediasi konflik antara Israel dengan Suriah pada 2004 dan menghasilkan kesepakatan damai kedua pihak pada 2008. Pada tahun yang sama (2004), Turki terlibat dalam proses perdamaian di Libanon dan menjadi negara paling aktif dan berpengaruh di Libanon semenjak tahun 2004. Turki juga memfasilitasi perundingan antara Hamas dengan Fatah dan Suriah dengan Irak. Konflik Israel-Palestina tak luput dari pengaruh Turki sebagai mediator. Sebelum memasuki *years of crisis* (2009-2010), Turki sangat aktif memediasi kedua belah pihak. Namun, proses mediasi gagal sebab Turki justru berkonflik dengan Israel akibat pembunuhan Sembilan aktivis kemanusiaan Turki oleh Israel pada Mei 2010. Turki menjadi mediator proses perdamaian konflik Israel-Palestina dengan membentuk komisi perdamaian, jalur diplomasi, tempat netral untuk negosiasi, dan lobi Turki kepada Kuartet (AS, EU, Rusia, dan UN). Penerimaan peran Turki sebagai mediator konflik menandakan kehadiran Turki dapat diterima dan mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan Turki di kawasan, khususnya Timur Tengah, dapat diterima dengan baik oleh negara-negara di dalamnya.

Perekonomian Turki terus berkembang seiring berkembangnya peran Turki di kawasan. Posisi Turki sebagai ekonomi terbesar ke-17 dunia menempatkan Turki memiliki status sebagai negara dengan perkembangan

²⁰⁷ Ahmet Davutoglu, “Turkish Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, *Insight Turkey* (2008), hal. 79, diunduh dari www.insightturkey.com

tercepat ketiga di dunia pada 2010. Seperti yang telah dipaparkan pada Sub Bab Kekuatan Ekonomi Turki, Turki cukup diperhitungkan di level global dengan kemampuan perekonomiannya. Besarnya ekspor Turki menyebabkan interdependensi antara Turki dengan kawasan seperti EU dan MERSC. Hal ini ditambah dengan letak geografis Turki yang menjadi jalur suplai energi dari Timur Tengah ke Eropa. Keberadaan Turki dalam OECD, G-20, dan Custom Union menandakan perekonomian Turki cukup diperhitungkan.

Bagian parameter ini sangatlah abstrak untuk dipaparkan, bagaimana Turki diperhitungkan di level internasional akan sangat nampak dengan menyebutkan seluruh keterlibatan Turki di level tersebut. Poin penting dari parameter ini adalah bagaimana posisi Turki diperhitungkan sebagai aktor yang memiliki *power* dengan menjadi mediator ataupun aktor utama yang mempergunakan kapabilitas materialnya dalam menyelesaikan suatu kasus. Semakin banyak Turki terlibat, semakin besar peluang untuk mengkuantifikasi posisi Turki di level internasional.



BAB 4

TURKI MENJAWAB TEORI *INSULATOR*

4.1 Turki Menantang Teori *Insulator*

Buzan dan Wæver dalam RSCT menyatakan bahwa Turki adalah *insulator state* bersama Afghanistan, Burma, dan Mongolia. Sebuah kondisi yang ditakdirkan untuk menempati kawasan yang dihimpit oleh regional lebih luas yang memiliki kompleksitas keamanan masing-masing. Dalam kasus Turki, RSC tersebut adalah Eropa, Middle Eastern, dan Kaukasus. Namun dengan sedikit catatan, berbeda dengan *insulator* lainnya, Buzan dan Wæver mendeskripsikan Turki sebagai *insulator* yang memiliki karakter spesial²⁰⁸. Buzan dan Wæver mendeskripsikan berbagai kebijakan Turki dari periode konsolidasi rezim Kemalist pasca Perang Dunia ke-2, masa aliansi dengan Barat (NATO) dan isolasi dari MERSC saat Perang Dingin, masa memulai keterbukaan pada masa setelah Perang Dingin hingga tahun 2003 di mana *grand theory* RSCT diterbitkan.

Penjabaran Buzan dan Wæver mengenai Turki terbilang cukup luas, tetapi tidak mendalam. Sehingga, pemahaman yang relevan antara konsep umum *insulator* dengan Turki—sebagai *insulator* spesial—dapat dipahami dengan baik. Terlebih penjelasan mengenai konsep *insulator* sangatlah minim. Sehingga membutuhkan banyak penafsiran dan artikulasi bagi konsep *insulator* Turki. Yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana kemudian Buzan dan Wæver bisa menjelaskan fenomena yang terjadi semenjak teori—khususnya *insulator*—tersebut dipaparkan hingga sekarang, di mana Turki mengalami perubahan yang sangat signifikan?

Kebijakan pasif dan “jaga jarak” yang dipertahankan Kemalist pada era sebelum AKP dan juga era Turgut Ozal, telah menciptakan hubungan yang tidak harmonis dengan negara-negara di dalamnya seperti Iran, Irak, dan Suriah. Hubungan yang terbangun cenderung dipenuhi sinisme dan kecurigaan. Terlebih

²⁰⁸ Buzan dan Wæver, *op.cit.*, hal. 485.

Turki justru membangun hubungan yang erat dengan Israel, di mana diketahui dunia Arab menjadikan Israel sebagai *enmity*. Turki mengalami masa-masa alienasi dan isolasi dari MERSC. Meski demikian, orientasi westernisasi dan modernisasi tetaplah berjalan dengan cukup lambat.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lebih lama, semenjak periode AKP, Turki telah banyak mengalami perubahan fundamental dalam dinamikanya di kawasan. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab 2, perubahan paling mendasar adalah keterlibatan Turki dalam isu-isu keamanan regional di MERSC. Perubahan ini tidak terlepas dari visi besar pemerintahan AKP yang diarsiteki oleh Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gull, dan khususnya Ahmet Davutoglu. AKP memformulasikan visi lokal, regional, dan global yang menempatkan Turki sebagai sentral dari dinamika keamanan. Visi ini direalisasikan dengan keterlibatan Turki dalam beberapa isu keamanan seperti menjadi mediator bagi permasalahan nuklir Iran, konflik di Suriah, konflik antara Israel-Palestina, konflik antara Israel-Suriah, dsb. Dominan keterlibatan ini berasal dari inisiatif Turki sendiri dengan alasan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan yang berdampak pada stabilitas internal Turki.

Posisi Turki sebagai aktor regional juga meningkat seiring keaktifan Turki melakukan desekuritisasi terhadap isu keamanan yang pernah terjadi pada periode pra-AKP seperti isu Kurdi dan Islamisme. Hubungan yang tidak harmonis dengan negara-negara terdekat Turki lebih disebabkan karena ancaman terhadap keamanan domestik Turki. Isu suku Kurdi dan Islamisme sebenarnya perwujudan dari masalah internal Turki yang dianggap mengancam identitas Turki ala Kemalist. Rezim Kemalist melakukan sekuritisasi terhadap kedua isu tersebut sehingga mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, suku Kurdi tidak hanya berada di selatan Turki, melainkan juga menyebar di sebelah utara Suriah, Iran dan Irak. Di keempat negara ini suku Kurdi menjadi minoritas dan diklaim mengalami diskriminasi sosial. Kedua, Islamisme merupakan ancaman potensial bagi negara-negara di kawasan MERSC sebab di kawasan ini didominasi oleh Muslim yang berasal dari berbagai kelompok dan pandangan, termasuk kelompok Muslim politik. Kelompok ini

tidak hanya berada di Turki, melainkan juga tersebar di seluruh negara Arab. Dengan demikian sangat wajar jika pada akhirnya rezim Kemalists melakukan sekuritisasi dua arah: dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Dampak dari sekuritisasi ini adalah hubungan yang tidak harmonis dengan negara-negara yang mempunyai etnis Kurdi. Mengapa pada akhirnya Turki berkonflik dengan Iran, sebab revolusi Iran telah membawa kekhawatiran rezim Kemalists jikalau revolusi tersebut memicu hal yang sama di Turki.

Sekuritisasi Turki terhadap isu Kurdi dan revivalisme Islam dilakukan oleh birokrasi atau militer dan elit politik. Hubungan antara kedua grup elit ini lebih sering didasari oleh rasa saling curiga. Kekuatan yang mendominasi tentu saja militer dengan argumentasi menjaga orientasi modernisasi (baca: westernisasi) dan rezim Kemalists (sekuler)²⁰⁹. Setelah demokratisasi terjadi di Turki, di mana peran militer berkurang drastis, aktor utama sekuritisasi isu Kurdi dan revivalisme Islam tidak mendapatkan tempat. Di sinilah mengapa terdapat korelasi yang kuat antara proses demokratisasi Turki yang dilakukan AKP dengan perubahan kebijakan luar negeri Turki.

Perubahan sikap akibat proses demokratisasi tersebut nampak dari *speech act* yang dikeluarkan aktor politik Turki. Pernyataan Erdogan bahwa ada yang salah dalam menyikapi isu Kurdi menjadikan argumen desekuritisasi semakin kuat. Sebab, selama ini pendekatan yang digunakan oleh Turki dalam menghadapi separatisme Kurdi adalah menggunakan kekuatan militer. Demokratisasi di Turki telah memberikan banyak pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Erdogan, sebab itu jalur diplomatik dan dialogis lebih dikedepankan ketimbang kekuatan militer.

Perbaikan hubungan dengan Suriah hingga mencapai level *strategic partnership* tidak pernah terbayang sebelumnya. Ketegangan antara Turki dengan Suriah tidaklah sedikit. Paling tidak ada empat isu yang membayangi yaitu Kurdi, kebijakan air Turki, klaim Hatay, dan pengungsi Suriah (2010). Tiga isu pertama relatif telah dibahas dan mendapatkan solusi bagi penyelesaian. Desekuritisasi Turki terhadap ketiga isu tersebut telah membawa kedua negara berada pada level kerja sama yang cukup erat. Ini dibuktikan dengan kunjungan resiproksal antara

²⁰⁹ Bulent Aras, *loc. cit.*, hal. 498.

kedua pejabat negara. Namun, kondisi terakhir di Suriah membuat hubungan kedua negara memanas. Hal ini disebabkan aktifnya Turki mengkritisi kebijakan Bashar Assad dalam menghadapi demonstran di Suriah. Turki juga sedikit banyak melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi atau imigran yang membanjiri Turki.

Kompetisi *leadership* antara Turki dengan Iran sampai sekarang masih berlangsung. Dengan komposisi *material power* relatif sama, kedua negara berlomba menanamkan pengaruhnya di kawasan. Permasalahan dengan Iran adalah potensi menyebarnya gagasan revolusi Iran di Turki dan suku Kurdi yang beroperasi di utara Iran. Namun, semenjak AKP memerintah, Turki justru mendekat dengan Iran. Keberpihakan Turki makin nampak pada isu nuklir Iran. Turki menjadi aktif sebagai mediator bagi dialog isu tersebut dengan negara Barat. Ini menunjukkan peran Turki yang signifikan dan semakin meningkat. Sama halnya seperti Irak, di mana Turki melakukan desekuritisasi isu Kurdi dan mengembangkan pola yang lebih dialogis.

Turki menjadi negara dengan dukungan masyarakat Arab untuk menyelesaikan kasus Palestina tertinggi. Turki dipercaya mampu membela hak-hak bangsa Palestina. Hal ini telah ditunjukkan Turki dengan vokal mengkritik kebijakan dan penanganan Israel terhadap kasus ini. Penggunaan jalur kekerasan oleh Israel dianggap tidak berniat melakukan perundingan. Menurunnya hubungan Turki justru terjadi di masa AKP. Perlahan namun pasti, hubungan *amity* berubah menjadi *enmity*. Turki membangkitkan sentimen bangsa Arab dengan menjadi yang terdepan dalam isu Palestina. Dengan demikian, dukungan masyarakat Arab ke AKP semakin luas. Popularitas Erdogan sebagai tokoh sentral AKP semakin mencuat ke permukaan setiap kali pernyataan kontroversialnya keluar terkait dengan Israel. Hal ini dipercaya sebagai upaya AKP untuk mendapatkan perhatian publik dan masyarakat Arab pada umumnya. Publisitas Turki di dunia Arab semakin tinggi.

Meski Turki aktif di Eropa (keanggotaan di NATO, kandidat member EU, juga konflik Turki-Yunani), di MERSC (sempat memiliki hubungan militer cukup erat dengan Israel, permasalahan perbatasan dengan Iran, Suriah dan Irak), dan di Kaukasus (menjalin hubungan politik dan kultural dengan etnis Turki di

dalamnya) interaksi dengan RSC-RSC tersebut tidak cukup kuat untuk membawa kompleksitas keamanan ke dalam satu arena strategis yang koheren²¹⁰. Argumen dalam tesis ini menyatakan kemungkinan yang sangat kecil ada sebuah negara yang dapat menyatukan dua atau lebih RSC, sebab hal itu pasti akan memindahkan polaritas dan memunculkan rivalitas baru dalam satu arena keamanan. Dalam konteks ini, tidak mungkin ada yang dapat membantah teori Buzan dan Wæver, sebab memang sulit untuk menurunkannya, sekalipun *superpower*. Namun, ambisi Turki untuk melakukannya tertuang dalam pernyataan berikut:

“Friendly and brotherly nations from Baghdad, Damascus, Beirut, Amman, Cairo, Sarajevo, Baku, and Nicosia.”²¹¹ “The Middle East, the Caucasus, and the Balkans have won as much as Turkey.”

“From Kars (Turkey) to Morocco and Mauritania, from Sinop (Turkey) to Sudan, from the Istanbul Straits to the Gulf of Aden, Turkish and Arab geographies own the most strategic belt of the world. We want to turn it into a security and economic integration belt. The foreign policy we carry out under the leadership of PM Recep Tayyip Erdogan in fact seeks to turn this whole basin into a single basin.” (Davutoglu, Hurriyet, June 11, 2010)

Menurut Davutoglu, negara-negara di kawasan tetangga seperti Balkan, MERSC, Kaukasus, dan Asia Tengah mengharapkan kepemimpinan yang lebih dari Turki. Sebab mereka percaya bahwa Istanbul adalah persinggungan dari multietnik, multisektarian, multikultural, multi kepentingan, dan multi peradaban ketimbang Eropa. Davutoglu mengklaim, *“I am not a minister of a nation state only.”²¹²* Doktrin *Strategic Depth* berdasarkan HAM, kontinuitas warisan sejarah, perdamaian dan stabilitas kawasan. Dengan visi tersebut, Davutoglu beretorika keinginan Turki untuk berkontribusi bagi kawasan dan lingkungan global.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kebijakan luar negeri Turki yang pro-aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional, serta proses

²¹⁰ Buzan dan Wæver, *op.cit.*, hal. 395.

²¹¹ Svante E. Cornell, *loc. cit.*, hal. 13.

²¹² SEESOX, *loc. cit.*, hal. 9.

sekuritisasi dan desekuritisasi yang dilakukan, memberikan gambaran bahwa Turki tidaklah pasif seperti yang disebutkan Buzan dan Wæver. Turki justru aktif memainkan peran regional, khususnya di MERSC. Karakter pasif sebagaimana normalnya *insulator* tidak lagi relevan bagi Turki kontemporer. Dengan argumen-argumen seperti disebutkan di atas, menjawab pertanyaan mengapa Turki lebih aktif dan agresif di MERSC. Dan memberikan argumen kokoh bahwa Turki saat ini tidak cocok lagi dengan definisi *insulator*.

4. 2 Turki adalah *Great Power In The Making*

Menurut Buzan dan Wæver, normalnya *insulator* ditempati oleh *weak state* dan pasif, tidak dapat menyatukan dua atau lebih RSC dalam satu arena strategis keamanan, tidak mungkin diisi *regional power* dan *great power* sebab polaritas akan berubah. Untuk kasus Turki, meski Buzan dan Wæver menyebut Turki sebagai *insulator* khusus dengan berbagai perilaku khususnya dalam lingkungan RSC, tetap menyisakan tanda-tanya yang mendasar: apa yang menyebabkan Turki begitu agresif di MERSC?

Seperti yang telah disampaikan di argumen awal dalam Bab 4 ini bahwa tidak adanya teori yang lebih umum yang dapat menempatkan Turki sesuai dengan kapasitasnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan ambiguitas. Karakter *weak state* tentu tidak dapat dialamatkan kepada Turki. Sepanjang sejarahnya, Turki selalu memiliki kapasitas dan kapabilitas *strong state*. Hal ini tentu yang membedakan antara Turki dengan Afghanistan, Burma, Mongolia, dsb. Status “*insulator khusus*” saja nampaknya tidak dapat menjawab mengapa pada akhirnya Turki—yang bukan *weak state*—lebih pasif dalam arena keamanan regional dan global pada masa Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin, kemudian menjadi sangat aktif pada masa setelah itu (periode AKP).

Argumen yang dapat digunakan untuk menjawab hal ini adalah akibat faktor siapa aktor keamanan yang berada di balik kebijakan luar negeri Turki. Sebagai contoh, ketika aktor keamanan Turki dikuasai oleh rezim Kemalist yang cenderung menjaga eksistensi sekulerisme-nasionalisme dan westernisasi, serta menjaga jarak dari negara-negara yang dianggap dapat mengimpor gangguan

keamanan, menyebabkan hubungan tak harmonis dengan negara-negara tersebut. Sekuritisasi rezim Kemalist menyebabkan Turki terisolasi dari MERSC. Sedangkan EU masih belum bisa sepenuhnya menerima Turki karena berbagai alasan. NATO sebagai payung keamanan bagi Turki dan AS sebagai inspirator westernisasi menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap Barat. Pada akhirnya menyebabkan Turki tidak banyak berinteraksi keluar. Dampak dari hal ini secara eksplisit sangat terlihat ketika Perang Dingin berakhir. Turki menghadapi kebingungan dan disorientasi. Sebab itu, Turki membutuhkan orientasi baru kemana harus membangun hubungan baik yang menguntungkan. Di momen tersebut akhirnya, Turgut Ozal berhasil membawa perekonomian Turki menjadi lebih baik dengan cara membuka keran impor dan mempromosikan ekspor Turki ke negara-negara di sekitarnya. Pada masa ini, isolasi Turki perlahan memudar dan Turki banyak mengadakan kerja sama dengan negara-negara MERSC, misalnya.

Kehadiran AKP, sebagai aktor keamanan domestik, tidak terlepas dari popularitas Erdogan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat MERSC, khususnya. Dengan popularitas yang didapat, Erdogan—sebagai aktor keamanan—dapat dengan mudah melegitimasi sekuritisasi suatu isu, sebagai contoh isu Palestina. Masyarakat Arab yang menganggap Israel sebagai *enmity* dijadikan bahan populis bagi Erdogan untuk mengangkat sentimen permusuhan dan mendapat dukungan dari Arab secara umum. Dukungan ini penting sebagai legitimasi Turki untuk terlibat di dalam MERSC lebih jauh. Dan, isu populis Palestina menjadi bahan yang cukup untuk mendapatkan simpati masyarakat Arab. Ini sekali lagi menegaskan bahwa aktor yang berkuasa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan sekuritisasi dan desekuritisasi Turki.

Negara *insulator* menurut Buzan dan Wæver menerima begitu banyak beban isu keamanan dari RSC di sekitarnya, namun tidak sanggup mengolahnya menjadi satu isu keamanan bersama (*faces both ways, bearing th burden of this difficult position but not strong enough to unify its two worlds into one*²¹³). Lain

²¹³ *Ibid.*, hal. 48.

hal dengan Turki, Turki justru dalam hal ini terlibat lebih banyak dalam isu keamanan dengan berupaya menciptakan stabilitas kawasan yang kondusif. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa aktivisme Turki ini bukanlah tanpa alasan, setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa Turki terlibat lebih aktif dalam kawasan (bukan terlibat karena keharusan ikut terlibat akibat posisinya sebagai *insulator*). Pertama, kepentingan ekonomi mendorong Turki untuk mengamankan akses, pasar, dan distribusinya. Perekonomian Turki yang begitu pesat semenjak AKP berkuasa memberikan dampak geostrategis Turki yang meningkat. MERSC sebagai pasar utama dan terdekat merupakan rekanan potensial bagi Turki—di samping kedekatan secara politik dan sosial—untuk beberapa puluh tahun ke depan. MERSC bagaimanapun masih menjadi sumber energi dunia, market yang potensial, dan sangat dekat dengan Turki secara geografis. Keamanan dan stabilitas yang semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini yang sangat berkontribusi bagi perekonomian Turki. Sehingga stabilitas di kawasan ini menjadi isu penting bagi Turki. Sebab itu Turki mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan terkait sumber daya dan distribusi, serta semakin memperluas pasar bagi perekonomian Turki yang melesat tajam.

Kedua, pencapaian status *great power* dan peran *soft power* untuk menjaga stabilitas keamanan. Beban dinamika isu keamanan Turki sebagai negara yang berada di antara tiga benua haruslah disikapi dengan proporsional oleh aktor-aktor politik Turki. Selama ini, Turki dikenal dengan *hard militer*-nya. Sekuritisasi beberapa isu disikapi secara militeristik, mengingat sebelum periode AKP, Turki belum mengalami demokratisasi dan reformasi politik dan hukum. Pendekatan *hard power* menjadi solusi untuk menghadapi ancaman keamanan domestik Turki. Turki sekarang lebih mengedepankan proses dialogis dan *soft power* untuk mengatasi permasalahan domestik (isu Kurdi) dan eksternal (isu Siprus). Desekuritisasi dilakukan Turki dengan negara-negara yang selama ini dianggap berpotensi mengimpor gangguan keamanan dalam negeri seperti Iran, Irak dan Suriah.

Seperti yang telah dipaparkan di Bab 3, terlihat jelas kekuatan militer dan ekonomi Turki. Kekuatan material Turki sudah cukup memberikan gambaran mengenai kemampuan Turki dalam level regional dan global. Dalam teorinya Buzan dan Wæver mengklasifikasikan Turki sebagai *regional power* bersama India, China, Indonesia, dsb. Ini kontradiktif dengan pernyataan Buzan dan Wæver sendiri yang mengatakan bahwa jika Turki adalah *regional power*, maka seharusnya polaritas berubah. Turki harus dimasukkan ke dalam RSC tertentu, seperti MERSC. Untuk mengetahui sejauh mana *power* Turki, maka dapat digunakan definisi Buzan dan Wæver sendiri menggunakan *three-tier scheme*.

Untuk berada dalam satu *-tier* dibutuhkan setidaknya empat kriteria sesuai dengan apa yang dikatakan Buzan dan Wæver, yaitu kapasitas dan kapabilitas dalam ekonomi dan militer, persepsi dan penerimaan aktor lain, sekuritisasi dan desekuritisasi, dan posisi yang diperhitungkan. *Regional powers* berada pada *third-tier*, di mana ambisi dan *power*-nya dibatasi pada lokasi di mana mereka berada. *Regional powers* tidaklah menjadi bagian dari keamanan internasional sebab pengaruh dinamika mereka hanya pada level regional saja. Contoh yang diberikan oleh Buzan dan Wæver misalnya India, di mana India—menurut mereka—tidak memenuhi kriteria status sebagai *great power*. Meski India memiliki kapasitas perkembangan ekonomi yang besar, kekuatan militer yang juga besar, khususnya kepemilikan Nuklir, status India tidak lebih tinggi dari Jepang. India tidak dikatakan *great power* sebab *major power* lain tidak menganggapnya berpotensi menjadi *superpower*²¹⁴.

Untuk kasus Turki, sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab 3. Dapat disimpulkan bahwa Turki memiliki kriteria sebagai berikut:

²¹⁴ Buzan dan Wæver, *op. cit.*, hal. 37.

Tabel 11. Klasifikasi *three-tier Scheme*.

Kapasitas dan kapabilitas global (militer & ekonomi)	Persepsi status dan penerimaan atau pengakuan dari yang lain	Sekuritisasi dan desekuritisasi	Posisinya diperhitungkan oleh aktor lain.
<p>Turki memiliki kekuatan militer yang besar. 15 besar dunia, terbesar di Eropa, terbesar di MERSC.</p> <p>Perkonomian Turki menjadi 17 besar dunia dan terus berkembang, OECD, G-20</p> <p>Aktif di dua RSC</p> <p>Menandakan Turki memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.</p>	<p>Persepsi status dari elit politik Turki memberikan gambaran bahwa mereka mempunyai ambisi untuk menjadi kekuatan regional dan global. Untuk tingkat regional, keberadaan Turki sudah diakui dan diterima dengan baik. Artinya, keberadaan Turki juga sudah diperhitungkan. Pengakuan dari aktor internasional, CIA, OKI, SIPRI, World Bank, IMF.</p>	<p>Turki melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi tingkat regional. Seperti yang telah diberikan di dalam list (de)sekuritisasi Turki.</p>	<p>Posisi Turki diperhitungkan oleh negara lain. Ini terbukti dengan keberadaan Turki dalam aktivitas regional. Menjadi mediator isu keamanan, di MERSC dan Kaukasus dan kerja sama dalam aktivitas regional dalam aspek, ekonomi, politik, dsb.</p>

Menurut Buzan, Turki adalah *regional power*, di mana peran Turki hanya sebatas dinamika regional *an sich*. Turki belum memainkan peran global selayaknya *great power* dan (sudah pasti) *superpower*. Tetapi peran Turki di RSC sekitar, pada kenyataannya lebih dari sekadar *regional power* menurut tipologi Buzan dan Wæver. Berdasarkan argumen-argumen yang telah diberikan di bab-bab sebelumnya, di mana Turki mengalami perubahan orientasi yang signifikan, memberikan kejelasan bahwa Turki sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Turki tidak lagi bergerak pada *3rd-tier level*, tetapi sedang bergerak menuju

great power status. Sebab seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa posisi Turki tidak lagi berada pada *regional power* melainkan *great power*. Spektrum *power* Buzan dan Wæver tidak memberikan pilihan bagi Turki untuk berada di tengah-tengah antara *regional power* dan *great power*. Jika Turki bukan lagi *regional power*, dan tidak mungkin berada pada *1st-tier power*, maka Turki adalah *great power*. Pernyataan ini terlalu dini untuk ditujukan kepada Turki, sebab itu, argument yang digunakan dalam tesis ini adalah Turki *great power in the making*, di mana Turki seperti berada di tengah-tengah spektrum *regional power* dan *great power*.

4.3 Perubahan dari Dalam atau Dorongan Eksternal

Peran *soft power* Turki yang sangat terlihat ini diakui oleh para akademisi dan peneliti hubungan internasional. Berbagai buku, jurnal, artikel, *report*, konferensi dsb yang menyatakan bahwa Turki sedang mengalami perkembangan signifikan²¹⁵. Setidaknya ada tiga perubahan besar yang sedang terjadi di Turki. Pertama, Turki jauh lebih demokratis dan liberal. Reformasi politik dan hukum telah membawa Turki menjadi lebih terbuka dan mengedepankan stabilitas. Kedua, Turki, tanpa melepas ikatan dengan Barat (EU dan NATO), sedang membangun hubungan lebih dalam dengan negara-negara MERSC. Terdapat dua argumen mengapa Turki melakukan hal ini. Pertama, disebabkan alasan ekonomis. Stabilitas kawasan menjadi kunci utama signifikansi peningkatan perekonomian Turki dalam satu dekade terakhir. Kedua, sangat berkaitan dengan argumen pertama adalah *soft power* yang dikembangkan Turki merupakan gerakan populis untuk mendapatkan simpati negara-negara MERSC. Hal ini berkaitan dengan stabilitas kawasan (demi kepentingan ekonomi) dan peran regional Turki sebagai *regional power* atau bahkan lebih dari itu (*great power*). Dari sini kemudian banyak yang mengambil kesimpulan bahwa Turki sedang bergerak ke “Timur”. Ketiga, kapasitas dan kapabilitas material Turki memberikan kepercayaan diri tinggi untuk lebih dalam menerapkan kebijakan *Strategic Depth*. Pada akhirnya, membuat Turki jauh lebih aktif terlibat dalam perekonomian maupun isu keamanan di kawasan. Fenomena ini tentu berbeda

²¹⁵ SEESOX, *loc. cit.*, hal. 5.

dibandingkan masa sebelum AKP berkuasa membentuk kekuatan utama pemerintahan.

Menurut Henry J. Barkey, transformasi Turki menjadi kekuatan global setidaknya dipicu oleh dua sebab²¹⁶. Pertama, perubahan cara padangan radikal-struktural perekonomian Turki menuju ekonomi berbasis ekspor, di mana Turki terus mencari pasar baru untuk aktivitas ini. Kedua, faktor ambisi pemerintahan AKP dan elit yang berada pada level tertinggi untuk menjadikan Turki sebagai aktor global. Kedua faktor tersebut diselingi kepercayaan diri yang tinggi sehingga ketika berinteraksi dengan prinsip *zero problem with neighbours*, Turki dapat lebih proaktif dan koheren. Kebutuhan Turki akan pasar baru atau menjaga pasar yang sudah ada tentu harus diseimbangkan dengan hubungan yang baik dengan berbagai aktor negara. Seperti yang telah dibahas dalam Bab 3, Turki memiliki pasar nyata dan fundamental. Gangguan instabilitas di kawasan tersebut berarti gangguan secara langsung terhadap sumber pemasukan bagi Turki yang akan memicu instabilitas bagi perekonomian. Bagaimanapun, ekspor Turki masih menjadi andalan bagi perekonomian domestik. Dalam hal ini, cara-cara sekuritisasi atau Turki terlibat jauh ke dalam isu keamanan negara di kawasan menjadi cara terbaik.

Perkembangan perekonomian Turki tidak akan lepas dari berkembangnya kelompok borjuis religious yang mendukung liberalisasi ekonomi dengan tetap mempertahankan tradisi keagamaan²¹⁷. Kelompok ini yang mengendalikan ekspor-impor di Turki secara massif. Kedekatan kultural dengan AKP menjadikan kelompok ini mudah melakukan bisnis, sehingga banyak dari mereka menjadi borjuis baru di Turki yang kemudian sering disebut sebagai Anatolian Tigers.

Cornell mengatakan bahwa sangat natural jika Turki berada pada level ekonomi yang menjanjikan menyebabkan mereka menjadi lebih percaya diri di dunia internasional²¹⁸. Penemuan kembali Turki terhadap Middle Eastern lebih kepada penemuan market besar bagi perekonomian Turki yang dahulu sempat dilupakan, bahkan dijauhi (jaga jarak sebab isu keamanan). Ekspor Turki butuh

²¹⁶ Henry J. Barkey, *loc. cit.*, hal. 1-13.

²¹⁷ Penjabaran lebih detail dapat dilihat di Sebnem Gumuscu, *loc. cit.*, hal. 1-26.

²¹⁸ Svante E. Cornell, *loc. cit.*, hal. 17.

tempat baru, di saat Eropa sangat potensial menghadapi krisis—berkaca pada krisis berulang kali di benua ini. Baiknya hubungan politis dengan negara seperti Iran, Irak, Suriah memberikan ruang yang leluasa bagi pebisnis Turki untuk melakukan transaksi ekonomi. Pola ini akhirnya menciptakan lingkaran interdependensi antara aktor politik karena saling membutuhkan dalam sisi perekonomian. Dengan Irak Utara misalnya, banyaknya pebisnis Turki yang datang ke daerah otonom ini membantu membuka hubungan politik Turki dengan Kurdish Regional Government (KRG), di mana sebelum ini tensi keduanya meningkat seiring serangan militan PKK di Hakkari, perbatasan Turki dengan Irak.

Pada akhirnya, kepentingan Turki di kawasan nampak pada proses sekuritisasi Turki terhadap isu keamanan yang menyebabkan instabilitas kawasan. Ambivalensi Turki sangat terlihat ketika melakukan desekuritisasi isu keamanan seperti separatisme Kurdi di Iran, Irak, Suriah serta isu keamanan lain di Balkan dan Kaukasus, tetapi di sisi lain Turki melakukan sekuritisasi terhadap sumber-sumber energi dan pasar ekspornya. Dari sini akan jelas terlihat mengapa pada akhirnya Turki sangat aktif di kawasan sekitar, terutama MERSK.

Perubahan Turki juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh proses proposalisme keanggotaan Turki di EU. Syarat dan konsideran EU untuk menerima Turki telah menjadikan Turki bertransformasi dari negara yang terisolasi akibat ketatnya sekuritisasi oleh rezim militer, menjadi negeri yang jauh lebih terbuka menerima perubahan. Banyak pelanggaran HAM dan demokrasi yang dilakukan oleh rezim sebelum AKP sebagai legalisasi penjagaan keamanan negara, seperti isu Kurdi dan revivalisme Islam. Akibat dari sekuritisasi ini—penggunaan kekuatan militer—menimbulkan begitu banyak tindakan represif, termasuk kudeta terhadap pemerintahan yang sah, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Eropa. Sebab itu, jika Turki ingin bergabung dengan EU, maka proses-proses seperti kekuasaan militer dan pelanggaran HAM harus segera direduksi dan diakhiri. Hasilnya, Turki menjadi jauh lebih terbuka dan demokratis seperti sekarang ini. Namun, meski Turki sudah menjalankan syarat-syarat EU secara maksimal, tetap saja Turki menghadapi kendala non-

teknis yang terus mencegah Turki menjadi bagian dari Eropa. Hal ini membuat jenuh masyarakat Turki sendiri. Mereka sama sekali tidak tertarik lagi bergabung dengan EU. Kondisi perekonomian dan stabilitas sosial yang baik, menjadikan mereka lebih percaya diri. Pada tahun 2011, hanya sekitar 34% warga Turki yang mendukung proses menjadi bagian dari EU. Ini sangat kontras di mana terjadi penurunan dukungan dari sekitar 78% di tahun 2004²¹⁹.

Cara ini adalah yang diinginkan oleh EU, sehingga Turki pada akhirnya menerima konsep demokratisasi yang ditawarkan dalam Copenhagen Criteria untuk HAM dan demokrasi. Paket perubahan konstitusi tersebut di antaranya penghapusan hukuman mati pada masa damai, mengembalikan hak kultural etnis minoritas Kurdi seperti penggunaan bahasa dan nama lokal, mengubah komposisi Dewan Keamanan Nasional termasuk melibatkan sipil sebagai Sekretaris Jenderal Dewan, dan meningkatkan kesetaraan gender. Paket ini diterima dengan mulus oleh parlemen Turki yang mayoritas dikuasai oleh AKP sebagai pemenang pemilu 2002.

Pada kenyataannya, proses demokratisasi Turki justru tidak didorong oleh politik domestik seperti AKP *an sich*, terlebih lagi rezim Kemalist. Namun, justru muncul—secara dominan—akibat proses integrasi (proposal) keanggotaan dengan EU dan pengaruh perubahan signifikan di kawasan semenjak Perang Dingin berakhir hingga sekarang²²⁰. Demokratisasi politik dan liberalisasi ekonomi di negara-negara tetangga Turki seperti eks-Soviet dan Timur Tengah pasca Saddam Hussein dan Arab Spring telah menciptakan *spill over effect* terhadap internal Turki. AKP memahami dengan baik bahwa reformasi internal Turki (politik, hukum, ekonomi, kebijakan luar negeri) tidak mungkin dilepaskan dari pengaruh luar. Sehingga, strategi keterlibatan Turki dengan negara-negara tetangga menjadi penting. Pidato Erdogan yang mengucapkan terima kasih atas dukungan orang-orang di Baghdad, Damascus, Beirut, Sarajevo, Baku, Nicosia, dsb dan menyatakan kemenangan AKP adalah kemenangan Timur Tengah, Kaukasus, dan Balkan juga mengindikasikan kesadaran bahwa itu semua tak mungkin terjadi tanpa dukungan atmosfer di sekitarnya.

²¹⁹ Wayne McLean, *loc. cit.*, hal. 53.

²²⁰ Emiliano Alessandri, *loc. cit.*

Kehadiran Turki di MERSC memunculkan kekuatan baru yang ikut mengubah peta polarisasi kekuatan kawasan. Pasca kejatuhan rezim Saddam Hussein, kekuatan utama di MERSC terpolarisasi pada Israel dan Iran yang juga berbeda ideologi. Kedua negara cukup keras permusuhannya dan saling menyatakan ancaman. Kedekatan Turki dengan Israel cukup menjaga jarak dengan Iran. Namun, setelah terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana Turki tidak lagi menjalin hubungan dengan Israel dan menciptakan pola *enmity* baru, memunculkan spekulasi Turki ingin menjadi kekuatan regional di MERSC. Sebelum periode AKP, sebenarnya model pembangunan Turki cukup populer di kalangan pemimpin dan intelektual MERSC. Komitmen Turki untuk melakukan modernisasi menjadi inspirasi khusus bagi negara MERSC seperti Iran, Tunisia, dan Afghanistan²²¹. Dengan hadirnya Turki sebagai kekuatan baru di MERSC membuat keberadaan Iran tidak lagi begitu diperhitungkan. Buah dari Arab Spring justru menokohkan Turki sebagai ikon atau role model perubahan negara-negara di Levant dan Maghreb *subcomplex*. Turki semacam berhasil memenangi perang retorika dan gagasan²²².

4. 4 Kemungkinan Revisi Teori

Pada tahun 1999 dalam jurnal *Survival*, Barry Buzan dan Thomas Diez mengajukan pandangan di mana EU dan Turki harus mencari jalan alternatif untuk keanggotaan penuh Turki²²³. Mereka berpendapat bahwa agenda Eropanisasi dan Westernisasi di Turki justru harus “menguatkan” elit Kemalist (nasionalis, sekuler, dan pro Barat), dibandingkan transformasi internal. Mereka juga menyoroti peran Turki sebagai *insulator* yang mengalami dinamika, sehingga perlu ada tafsir ulang mengenai posisi Turki. Meski Buzan dan Wæver menyebut Turki sebagai *insulator* spesial, hal itu belum cukup untuk memberikan teori umum mengenai *insulator*, khususnya yang sesuai dengan Turki. Perubahan di EU sendiri semenjak 1999 cukup banyak seperti penambahan 10 anggota baru

²²¹ Meliha Benli Altunisik, *loc. cit.*, hal. 41-42.

²²² Mustafa Akyol, “Turkey Vs. Iran: The Regional Battle for Hearts and Minds”, <http://www.foreignaffairs.com/articles/137343/mustafa-akyol/turkey-vs-iran>, 21 Maret 2012, akses pada 10 Juni 2012, pkl. 21.23.

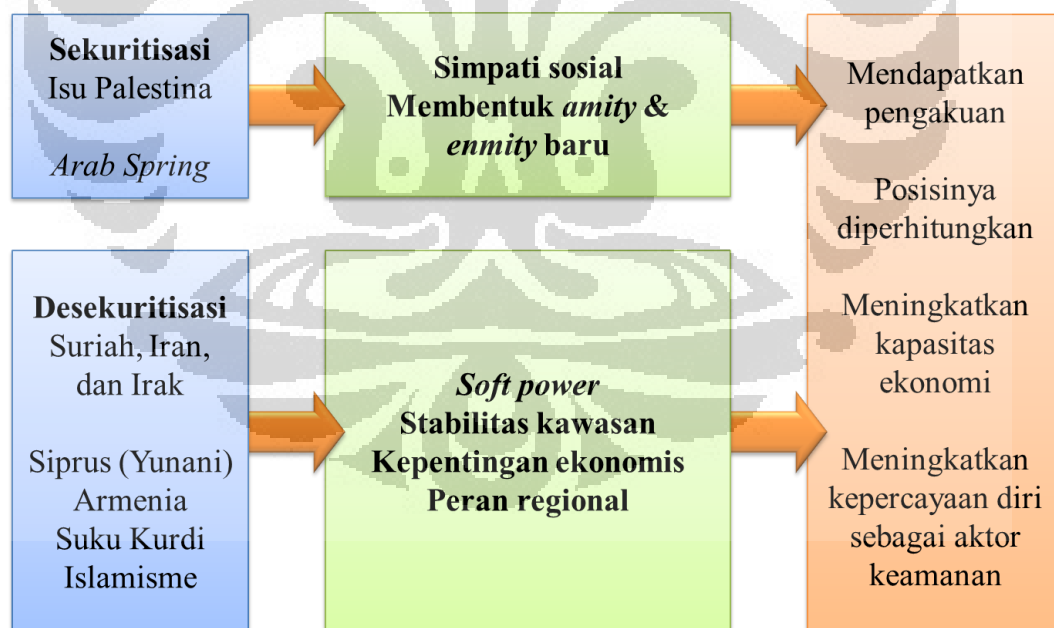
²²³ Seperti disampaikan Thomas Diez dalam paper presentasi untuk The 2nd Pan-European Conference on European Union dengan judul “Turkey, the EU and Security Complexes Revisited”, ECPR Standing Group on EU Politics, Bologna, 24-26 Juni 2004

pada 1 Mei 2004, dan yang paling penting untuk kasus Turki adalah di mana Helsinki European Council memberikan status “kandidat anggota” pada Turki di tahun 1999—langkah lebih signifikan dari pertemuan di Luxembourg pada 1997. Dinamika internal Turki serta merta mempengaruhi proses keanggotaan ini, di mana Diez menyebutnya sebagai “revolusi”. Perubahan yang menjadi catatan Diez seperti tujuh paket amandemen konstitusi yang diterima Parlemen Turki agar sejalan dengan syarat keanggotaan EU, terpilihnya secara mayoritas dan demokratis partai berbasis Islam moderat yang membentuk *single-party government*, relasi dengan Yunani yang membaik, dan desakan dialog untuk penyelesaian kasus Siprus serta dukungan secara terbuka terhadap Annan’s Plan untuk membentuk konstitusi baru Republik Siprus²²⁴. Semua itu, menurut Diez, mengindikasikan kondisi yang berbeda serta menciptakan argumen kontradiktif dari pandangan mereka sebelumnya. Sebab itu kemudian, Diez merevisi argumen sekuriti, kultural dan perubahan EU ke depannya dan kemungkinan keanggotaan alternatif bagi Turki.

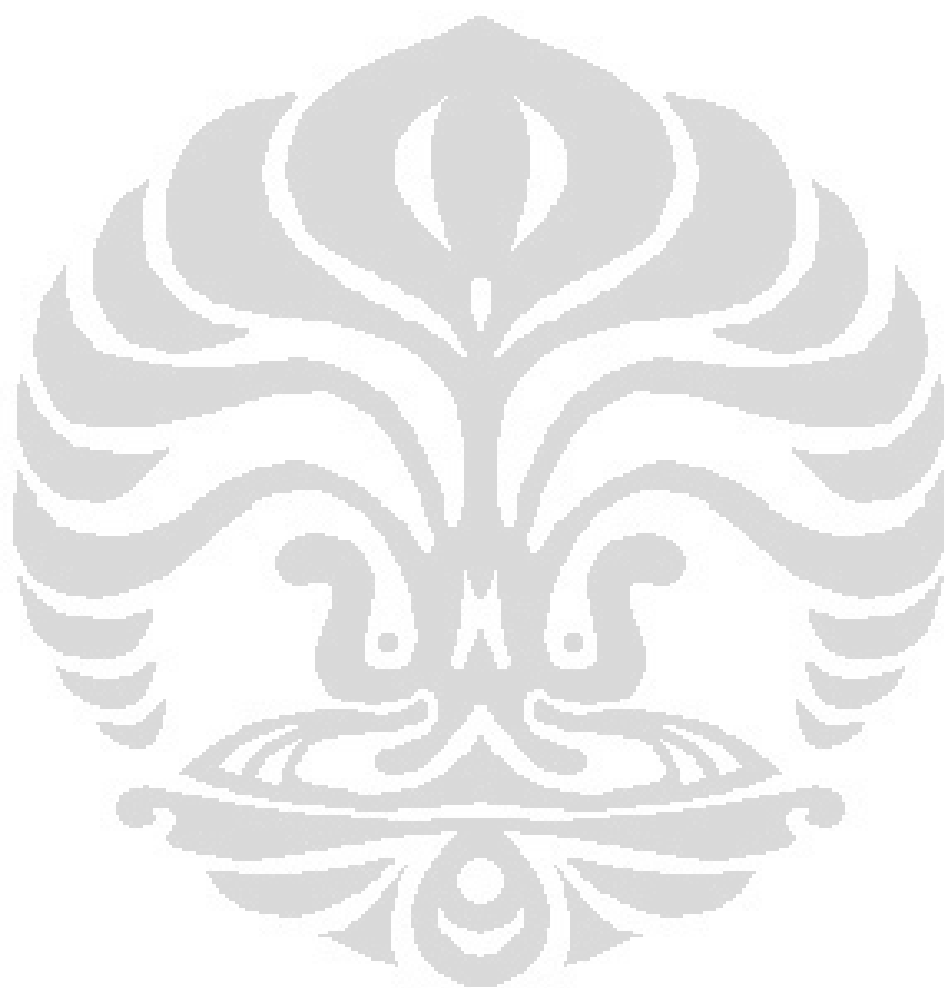
Akademisi seperti Thomas Diez menyadari transformasi yang terjadi di eksternal (dinamika di EU) dan internal (perubahan politik dan regulasi) Turki telah memberikan alat ukur baru bagi argumen insulasi Turki di RSC dan alternatif keanggotaan Turki di EU. Revisi argumen Diez dan Buzan harus dilakukan sebab analisa yang diberikan pada 1999 tidak relevan lagi bagi Turki yang mengalami perubahan. Diskursus mengenai Turki yang berubah dan revisi posisi Turki sebagai *insulator* tidak hanya disampaikan Diez, akademisi lain seperti Bullent Aras juga menyampaikan hal yang sama. Lalu, apakah dengan kondisi yang sudah sangat berubah tersebut menjadi argumen yang cukup untuk saaatnya merevisi *grand theory*, khususnya bab tentang Turki? Nampaknya ini akan menjadi tren diskusi bagi konsep *insulator state* yang dipaparkan Buzan dan Wæver. Jika mengikuti logika Diez, dan akademisi lain, maka seharusnya ada penjelasan alternatif yang merevisi atau bahkan semakin menguatkan teori mengenai Turki sebagai *insulator*. Selama penjelasan tersebut belum ada, maka masukan dan kritikan akademik terhadap konsep *insulator* bagi Turki akan terus bermunculan.

²²⁴ Untuk paparan dinamika Turki telah disampaikan sebagian dalam Bab 2 tesis ini

Di dalam tesis ini, penulis mencoba memberikan rekomendasi teoritik mengenai status Turki. Pertama, jelas Turki tidak relevan untuk dimasukkan ke dalam jajaran negara *insulator*. “*Insulator* khusus” nampaknya tidak cukup dijelaskan dengan definisi umum “*insulator*” yang telah ada. Dengan demikian, perlu ada pengkhususan teori mengenai kasuistik Turki. Kedua, dalam menentukan *-tier power*, mungkin sangat mudah bagi akademisi menggunakan *three-tier scheme* Buzan dan Wæver, namun ketika menemukan kasus seperti Turki, teori tersebut tidak cukup menjelaskan posisi Turki. Temuan dalam tesis ini adalah Turki *great power in the making*. Posisi Turki tidak berada dalam skema *regional power*, tetapi belum cukup untuk menjadi *great power*. Minimnya definisi Buzan dan Wæver untuk posisi ini tentu menyulitkan penulis (mungkin penulis lain juga) dalam mendefinisikan Turki. Sebab itu, perlu ada definisi baru yang memungkinkan negara seperti Turki untuk berada dalam skema *-tier* yang lebih generik.



Gambar 12. Temuan Utama dalam Analisa.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan

Dalam satu dekade terakhir, Turki telah berada dalam perubahan yang sangat besar. Semenjak awal tahun 2000-an, Ankara telah berupaya melakukan demokratisasi dan reformasi hukum yang membawa perubahan stabilitas yang lebih besar. Proses Eropanisasi dengan pengajuan keanggotaan EU (European Union) memberikan dampak positif terhadap hal tersebut. Namun, hal tersebut tidaklah berjalan mulus jika tanpa didukung dan diimplementasikan oleh para pengambil kebijakan. Di sinilah peran AKP, sebagai pemenang pemilu semenjak 2002, telah membawa Turki menjadi negara demokratis dan memberikan stabilitas politik dan ekonomi yang sangat pesat. Dengan transformasi internal ini, telah membawa Turki mengalami perubahan orientasi signifikan dari Barat ke Timur. Agresivitas Turki di MERSC menunjukkan kondisi tersebut.

Demokratisasi Turki telah mereduksi peran militer yang sangat kuat sebelumnya. Militer digadang sebagai penjaga utama rezim Kemalist dan nasionalisme (identitas) Turki. Dampak dari kekuatan militer yang begitu besar adalah proses sekuritisasi yang menempatkan Turki pada posisi *Turks have no friends but Turks*. Ancaman keamanan Turki dianggap berasal dari luar seperti identitas, etnisitas, dan ideologis seperti separatisme Kurdi dan gerakan Islamis. Iran, Suriah, Irak dianggap sebagai penyokong ancaman tersebut. Yunani juga dianggap sebagai ancaman utama dalam kasus Siprus, bahkan Turki mendeklarasikan kesiapan berperang dengan Yunani. Sekuritisasi ini pada akhirnya menyebabkan Turki terisolasi secara sosial dan politik, terutama di kawasan MERSC. Orientasi kebaratan yang digaungkan Kemalist menyebabkan kecurigaan negara-negara di sekitar Turki. Namun, setelah mengalami masa rezim militeristik, Turki sekarang berada pada level yang sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Demokratisasi dan reformasi hukum membawa Turki pada proses

soft power yang lebih besar. Pendekatan yang dialogis dan desekuritisasi menjadi strategi Turki untuk memuluskan keterlibatan Turki yang lebih luas di kawasan.

Era baru Turki yang diperkenalkan oleh AKP telah membawa perubahan signifikan terhadap interaksi Turki dengan dunia luar. Demokratisasi, pembelaan terhadap HAM, dan liberalisasi ekonomi menjadi poin-poin penting perubahan tersebut. Sekuritisasi terhadap Palestina, misalnya, merupakan pengejawantahan dari pembelaan Turki terhadap HAM. Aktifnya Turki mendorong demokratisasi di Timur Tengah pada momen Arab Spring menunjukkan Turki membawa nilai-nilai baru yang tidak populer di RSC tersebut, sehingga memunculkan Turki sebagai inisiator perubahan. Liberalisasi ekonomi menjadikan Turki lebih aktif menjalankan roda perekonomian dan melindungi kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, aktivisme Turki dalam memulai “era baru” Turki sangat mencolok terlihat semenjak AKP berkuasa.

Pendekatan AKP tersebut membawa Turki pada era yang lebih luas. Dengan desekuritisasi terhadap isu-isu lama seperti Kurdi dan Islamisme, Turki mendapatkan tempat di masyarakat Arab. Hal ini meningkatkan pengaruh Turki di kawasan. Hal inilah yang membedakan antara periode sebelum AKP berkuasa dengan setelah AKP berkuasa. Buzan dan Wæver menempatkan Turki sebagai *insulator* pada masa sebelum AKP. Dengan berbagai analisa dan penyesuaian, maka Turki menempati posisi tersebut.

Namun, secara definitif teoritis yang disampaikan Buzan dan Wæver mengenai Turki sebagai *insulator* perlu ditafsir ulang. Sebab, seperti yang telah dipaparkan dalam Bab 2 di mana Turki mengalami reorientasi kebijakan luar negeri, termasuk doktrinnya, Turki sangat aktif dan terlibat di seluruh kawasan. Aktivisme Turki semakin nyata ketika keterlibatan di RSC, MERSC misalnya, bukan sekadar menjadi pendukung tetapi inisiator dan aktor utama dalam isu keamanan kawasan. Sekuritisasi dan desekuritisasi Turki di kawasan sangat kontributif terhadap pola hubungan di MERSC. Sudah barang pasti ada yang menyebabkan Turki berperilaku demikian, terutama semenjak AKP berada dalam tampuk kekuasaan.

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di dua bab sebelum ini, ditambah dengan analisa mendalam dari kedua variable, dapat disimpulkan bahwa Turki bukanlah *regional power an sich* dan meski juga tidak mencukupi syarat menjadi *superpower*. Seperti yang dikatakan Buzan dan Wæver *superpower* menempati spektrum *major power* di satu sudut, sedangkan di sudut lain adalah *regional power*, di antaranya adalah *great power*. Jika Turki telah berada pada level *regional power* dan sekarang lebih dari posisi itu, sesuai dengan spektrum *three-tier scheme* Buzan dan Wæver, maka Turki seharusnya adalah *great power*. Namun, berdasarkan data material Turki belum bisa menandingi empat besar *great power*. Jika demikian adanya, maka Turki berada di tengah-tengah antara *regional power* dengan *great power*. Sebab itu, kesimpulan yang didapat dalam analisa ini adalah Turki sedang menuju (*in the making of*) *great power*.

Dengan kapasitas dan kapabilitas sebagai *great power in the making*, Turki percaya diri untuk lebih dalam terlibat isu keamanan regional. Sekuritisasi Turki terhadap isu Palestina merupakan salah satu contoh nyata bagaimana Turki memainkan peran *enmity* dan *amity* di kawasan. Keterlibatan Turki dalam isu tersebut, menjadikan Turki lebih populer di masyarakat MERSC dan dunia pada umumnya.

5. 2 Saran

Semenjak Buzan dan Wæver mengeluarkan *grand theory Regional Security Complex Theory (RSCT)* dalam bukunya *Regions and Powers: The Structure of International Security* pada 2003, telah banyak akademisi mencoba untuk membahas lebih dalam dan memberikan masukan akademis dalam bentuk jurnal, makalah, tesis, disertasi, artikel, dsb. Banyak dari mereka yang menyatakan teori Buzan dan Wæver ini sudah sangat kokoh dan relevan untuk dijadikan *grand theory* bagi regionalisme dan penelaahan lebih lanjut mengenai studi keamanan di kawasan. Namun, meski demikian tetap ada yang mencoba untuk mendebat Buzan dan Wæver di satu atau lebih teori yang telah dibangun, salah satunya mengenai konsep *insulator*.

Saran untuk penelitian akademik berikutnya adalah menjelaskan lebih jauh mengenai konsep *insulator* Buzan dan Wæver. Sebab, kesulitan yang sangat dirasakan dalam penelitian ini adalah minimnya penjelasan Buzan dan Wæver mengenai konsep *insulator* dan penelitian mengenai hal itupun sangatlah sedikit. Penelitian tersebut sangat berguna untuk menjelaskan mengapa konsep *insulator* dikatakan sesuai bagi suatu negara. Penelitian akademik lain yang bisa dilakukan adalah menjelaskan kembali bahwa konsep *insulator* untuk Turki perlu mengalami semacam revisi. Sebab, kondisi yang berkembang sudah tidak relevan lagi bagi Turki. Penelitian yang dilakukan bisa memberikan definisi baru, selain *insulator* versi Buzan dan Wæver, yang sesuai dengan tren perkembangan Turki berikutnya. Dengan tidak menantang *grand theory* Buzan dan Wæver, tetapi memberikan khazanah baru bagi kajian *regional security complex*, terutama konsep *insulator*.

DAFTAR PUSTAKA

Aktas, Gulbahar Yelken. "Turkish Foreign Policy: New Concepts and Reflection". *Tesis*. Graduate School of Social Sciences, Middle East Technical University (Desember 2010).

Alessandri, Emiliano. "The New Turkish Foreign Policy and the Future of Turkey-EU Relations". *Instituto Affari Internazionali* (3 Februari 2010).

Altunisik, Meliha Benli. "The Possibilities and Limits of Turkey's Soft Power in the Middle East." *Insight Turkey*, Vol. 10, No. 2 (2008).

Altunisik, Meliha Benli. "Turkey's Changing Middle East Policy". Discussion Paper. UNISCI, No. 23 (Mei 2010).

Aras, Bülent dan Rabia Karakaya Polat. "From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey's Relations with Syria and Iran". *Security Dialogue*, Vol. 39, No. 5 (Oktober 2008).

Aras, Bülent. "The Academic Perceptions Of Turkish- Israeli Relations". *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, Vol.1, No.1 (Spring 2002).

Aras, Bülent. "Turkish Foreign Policy Toward Iran: Ideology and Foreign Policy in Flux". *Journal of Third World Studies* 18 (1).

Balamir-Coskun, Bezen. "Turkey, the Middle East and the EU: Bridging Across Troubled Lands or Just Pragmatism?". *Paper for Turkey and the EU: Opportunities and Challenges in the Accession Process*. The University Association for Contemporary European Studies & Turkish University Association for European Studies. Istanbul (16-18 Juni 2010).

Barkey, Henri J. "Turkish Foreign Policy and the Middle East". *CERI Strategy Paper*. CERI CNRS & SciencesPo., No. 10 (6 Juni 2011).

Bengio, Ofra. "Altercating Interests and Orientations between Israel and Turkey: A View from Israel". *Insight Turkey*, Vol. 11, No. 2 (2009).

Bengio, Ofra. *The Turkish-Israeli Relationship: Changing Ties Of Middle Eastern Outsiders*, First Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Biehl, Kristen. "Migration 'Securitization' and Its Everyday Implications: an Examination of Turkish Asylum Policy and Practice". Best participation essay, *CARIM – IV Summer School on Euro-Mediterranean Migration and Development*. European University Institute and European Union (2008).

Bozdaglioglu, Yucel. *Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Approach*. London: Routledge, 2003.

Brouwer, Rick. "Turkey's Position in the Middle East: Regional Hegemon or Peripheral Bystander?" *Tesis*. University Groningen (31 Januari 2011).

Buzan, Barry dan Ole Wæver. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Buzan, Barry et. al. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1998.

Celik, Aliye Pekin dan Leylac Naqvi. "Turkey: Current and Future Political, Economic, and Security Trends". Canadian Defence & Foreign Affairs Institute (Desember 2007).

CIA Factbook Edisi 2012.

Cornell, E. dan Halil Magnus Karaveli. "Prospects for a 'Torn' Turkey: A Secular and Unitary Future?". *Silk Road Paper*. Central Asia-Caucasus Institute. Silk Road Studies Program (Oktober 2008).

Cornell, Svante E. "Changes in Turkey: What Drives Turkish Foreign Policy". *Middle East Quarterly* (Winter 2012).

Diez, Thomas. "Turkey, the EU and Security Complexes Revisited". *The 2nd Pan-European Conference on European Union*. ECPR Standing Group on EU Politics, Bologna.

Dorsey, James M. "Change in the Middle East Puts Turkey in the Eye of the Storm". *Turkish Policy Quarterly*, Vol. 9, No. 4 (2011).

Ekinci, D. "Turkey between the Balkans and the Caucasus in the Post-Cold War Era: 'Insulator' or Player State?". *Cankaya University Journal of Humanity and Social Sciences*, 7/2 (November 2010).

Falleti, Tulia G. "Theory-Guided Process-Tracing in Comparative Politics: Something Old, Something New". *Newsletter of the Organized Section in Comparative Politics of the American Political Science Association* 17 (2006).

George, Alexander L. dan Andrew Bennet. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: The MIT Press, 2005.

Gresh, Alain. "Turkish-Israeli-Syrian Relations and Their Impact on the Middle East". *Middle East Journal*, Vol. 52, No. 2 (Spring 1998).

Gumuscu, Sebnem. "Economic Liberalization, Devout Bourgeoisie, and Change in Political Islam: Comparing Turkey and Egypt". *EUI Working Papers*. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, No. 19 (2008).

Gusten, Susanne. "Mandate for a New Turkish Era". *International Herald Tribune* (16 Juni 2011).

IMF Data Set 2012.

Inbar, Efraim. "Turkey's Changing Foreign Policy and Its International Ramification". *E-Notes*. Foreign Policy Research Institute (February 2011).

Inbar, Efraim. *Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifications*. Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute (2010).

Küçükcan, Talip dan Müjge Küçükkeles. SETA Policy Report. European Perceptions of Turkish Foreign Policy. Report No. 19 (April 2012).

Lehmann, Jean-Pierre. "Turkey's 2023 Economic Goal in Global Perspective". *EDAM Center for Economics and Foreign Policy Studies* (Juni 2011).

McLean, Wayne. *Regional Security Complex Theory and Insulator States: The Case of Turkey*. School of Government, University of Tasmania (2010).

Mearsheimer, John J. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2001.

Mufti, Malik. "Little America: The Emergence of Turkish Hegemony". *Crown Center for Middle East Studies*. No. 51 (Mei 2011).

Onar, Norah F. "Neo-Ottomanism, Historical Legacies and Turkish Foreign Policy". *Discussion paper series*. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (Maret 2009).

Palestine Our Route, Humanitarian Aid Our Load, Flotilla Campaign Summary Report, IHH (2010).

Palmer Report. United Nations Human Rights Council. Dokumen No. A/HRC/15/21.

Pamuk, Sevkett. "Economic Change in Twentieth Century Turkey: Is the Glass More than Half Full?". *Working Paper* No. 41. American University of Paris (22 Januari 2007).

Report of the Secretary-General's Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident (September 2011).

Sandrin, Paula. "Turkish Foreign Policy After the End of Cold War: From Securitising to Desecuritising Actor", <http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/ContemporaryTurkishStudies/Paper%20PS.pdf>

Schmid, Ifri Dorothée. Europe confronting the degradation of Turkish-Israeli relations: Is there room for arbitration? Israel European Policy Network. Final Draft (Mei 2011).

SEESOX (South East European Studies at Oxford). "Turkey's Foreign Policy in a Changing World: Old Alignments and New Neighbourhoods". International Conference, Oxford (30 April – 2 Mei 2010).

SETA. Turkey in 2011. *Policy Report* (Januari 2012).

SIPRI. Military Expenditure Database, <http://www.sipri.org/databases/milex/>

Szymański, Adam. "Crisis in Turkey–Israel Relations". *The Polish Institute of International Affairs*, No. 18 (94). February 3, 2010.

The Military Balance 2011. London: Routledge, 2012.

The Turkel Commission. The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010 (Januari 2011).

Thomas. Landon. "Turning East, Turkey Asserts New Economic Power". *NY Times*. 5 Juli 2010

Tok, Gul Ceylan. "The Securitization of The Headscarf Issue in Turkey: 'The Good and Bad Daughters' of The Republic". *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*, Vol. 8 (2009).

Transatlantic Academy. "Getting to Zero: Turkey, Its Neighbours and the West". *Policy Report* (2010).

Wæver, Ole. "Securitization and Desecuritization". *On Security*. Ronnie Lipschutz (ed.). New York: Columbia University Press, 1995.

Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. New York: Random House, 1979.

Wise Talk 6. “Turkey-Israel Relations in the Last Period”. Interview with Ret. Ambassador Ozdem Sanberk. Wise Men Center for Strategic Studies (Mei 2010).

Yavuz, M. Hakan. *Islamic Political Identity in Turkey*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

<http://www.aljazeera.com/>
<http://www.akparti.org.tr/>
<http://www.bbc.co.uk/>
<http://www.economist.com/>
<http://www.euronews.com/>
<http://www.foreignaffairs.com/>
<http://www.guardian.co.uk/>
<http://www.haaretz.com/>
<http://www.jpost.com/>
<http://www.npr.org/>
<http://www.nytimes.com/>
<http://www.quno.org/>
<http://www.reuters.com/>
<http://www.rt.com/>
<http://www.sipri.org/>
<http://www.spiegel.de/>
<http://www.telegraph.co.uk/>
<http://www.thejakartapost.com/>
<http://www.todayszaman.com/>
<http://www.worldbank.org.tr/>
<http://stats.oecd.org/>



Lampiran 1. Data Ekspor-Impor Turki Semenjak 1980-2011.

Years	Exports		Imports		Balance of Foreign Trade	Volume of Foreign Trade	Proportion of imports covered by Exports %
	Value	Change	Value	Change	Value	Value	
	'000 \$	%	'000 \$	%	'000 \$	'000 \$	%
1980	2 910 122	28,7	7 909 364	56,0	-4 999 242	10 819 486	36,8
1981	4 702 934	61,6	8 933 374	12,9	-4 230 439	13 636 308	52,6
1982	5 745 973	22,2	8 842 665	-1,0	-3 096 692	14 588 639	65,0
1983	5 727 834	-0,3	9 235 002	4,4	-3 507 168	14 962 836	62,0
1984	7 133 604	24,5	10 757 032	16,5	-3 623 429	17 890 636	66,3
1985	7 958 010	11,6	11 343 376	5,5	-3 385 367	19 301 386	70,2
1986	7 456 726	-6,3	11 104 771	-2,1	-3 648 046	18 561 497	67,1
1987	10 190 049	36,7	14 157 807	27,5	-3 967 757	24 347 856	72,0
1988	11 662 024	14,4	14 335 398	1,3	-2 673 374	25 997 422	81,4
1989	11 624 692	-0,3	15 792 143	10,2	-4 167 451	27 416 835	73,6
1990	12 959 288	11,5	22 302 126	41,2	-9 342 838	35 261 413	58,1
1991	13 593 462	4,9	21 047 014	-5,6	-7 453 552	34 640 476	64,6
1992	14 714 629	8,2	22 871 055	8,7	-8 156 426	37 585 684	64,3
1993	15 345 067	4,3	29 428 370	28,7	-14 083 303	44 773 436	52,1
1994	18 105 872	18,0	23 270 019	-20,9	-5 164 147	41 375 891	77,8
1995	21 637 041	19,5	35 709 011	53,5	-14 071 970	57 346 052	60,6
1996	23 224 465	7,3	43 626 642	22,2	-20 402 178	66 851 107	53,2
1997	26 261 072	13,1	48 558 721	11,3	-22 297 649	74 819 792	54,1
1998	26 973 952	2,7	45 921 392	-5,4	-18 947 440	72 895 344	58,7
1999	26 587 225	-1,4	40 671 272	-11,4	-14 084 047	67 258 497	65,4
2000	27 774 906	4,5	54 502 821	34,0	-26 727 914	82 277 727	51,0
2001	31 334 216	12,8	41 399 083	-24,0	-10 064 867	72 733 299	75,7
2002	36 059 089	15,1	51 553 797	24,5	-15 494 708	87 612 886	69,9
2003	47 252 836	31,0	69 339 692	34,5	-22 086 856	116 592 528	68,1
2004	63 167 153	33,7	97 539 766	40,7	-34 372 613	160 706 919	64,8
2005	73 476 408	16,3	116 774 151	19,7	-43 297 743	190 250 559	62,9
2006	85 534 676	16,4	139 576 174	19,5	-54 041 498	225 110 850	61,3
2007	107 271 750	25,4	170 062 715	21,8	-62 790 965	277 334 464	63,1
2008	132 027 196	23,1	201 963 574	18,8	-69 936 378	333 990 770	65,4
2009	102 142 613	-22,6	140 928 421	-30,2	-38 785 809	243 071 034	72,5
2010	113 883 219	11,5	185 544 332	31,7	-71.661.113	299 427 551	61,4
2011	134 971 545	18,5	240 834 392	29,8	-105.862.847	375 805 938	56,0

Lampiran 2. GDP Nominal (dalam \$ billion) Turki beserta negara-negara di sekitarnya.

Country	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Russia	259.702	306.583	345.126	430.289	591.177	763.704	989.932	1,299.703	1,660.846	1,222.693	1,487.293	1,850.401
Greece	127.604	131.144	147.910	194.990	230.342	242.696	265.318	311.236	348.674	327.331	305.415	303.065
Romania	37.333	40.586	45.985	59.466	75.795	99.173	122.696	170.617	204.340	164.344	164.437	189.776
Ukraine	31.262	38.009	42.393	50.133	64.884	86.183	107.753	142.719	180.116	117.227	137.934	164.960
Azerbaijan	5.273	5.708	6.236	7.276	8.682	13.245	21.027	33.090	46.378	43.076	51.698	62.321
Bulgaria	12.904	13.869	15.979	20.668	25.283	28.894	33.210	42.115	51.824	48.569	47.727	53.514
Cyprus	9.197	9.605	10.475	13.176	15.659	16.920	18.421	21.769	25.250	23.474	23.000	24.949
Georgia	3.042	3.205	3.395	3.992	5.126	6.411	7.768	10.224	12.870	10.768	11.638	14.347
Armenia	1.912	2.118	2.376	2.807	3.577	4.900	6.384	9.206	11.662	8.648	9.371	10.106
Moldova	1.288	1.481	1.662	1.981	2.598	2.988	3.408	4.401	6.055	5.438	5.813	7.003
Turkey	266.439	195.545	232.280	303.262	392.206	482.685	529.187	649.125	730.318	614.417	734.587	778.089
Iran	96.440	115.435	116.019	137.435	168.481	202.940	241.697	307.355	350.588	360.625	419.118	482.445
Iraq	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	31.386	45.082	56.987	86.531	64.231	81.112	115.388
Syria	19.861	20.979	22.758	21.702	25.204	28.881	33.404	40.438	52.573	53.939	59.957	n/a
Israel	124.894	122.942	112.974	118.672	126.572	133.968	145.479	167.112	201.660	194.865	217.445	242.897
European Union	8,503.786	8,587.786	9,392.073	11,430.508	13,185.542	13,773.204	14,689.536	16,994.148	18,341.543	16,360.161	16,258.996	17,577.691
United States	9,951.475	10,286.175	10,642.300	11,142.225	11,853.250	12,622.950	13,377.200	14,028.675	14,291.550	13,938.925	14,526.550	15,094.025

Data: IMF, GDP \$ b., current prices (International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012)